



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan daerah berperan dan memiliki fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan kedalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
 - c. konsistensi antara RPJPD dengan RTRW Daerah; dan
 - d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJPD; dan
 - b. pelaksanaan RPJPD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJPD;
 - b. pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. hasil RPJPD.
- (5) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pengembangan Daerah.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.

- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (14-230/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu disusun RPJPD selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Selanjutnya terkait tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian antara visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah dengan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 174

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM	I-3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-4
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
1.4.1 Maksud.....	I-6
1.4.2 Tujuan	I-6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-41
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-42
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-43
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-46
2.3 ASPEK DAYA SAING	II-55
2.3.1 Daya Saing Ekonomi	II-56
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-70
2.3.3 Daya Saing Infrastruktur.....	II-77
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-81
2.3.4.1 Indeks Daya Saing Daerah	II-81
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-84
2.5 HASIL EVALUASI RPJPD 2005-2025.....	II-93
2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	II-96
2.6.1 Proyeksi Penduduk.....	II-96
2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana.....	II-99
2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH.....	II-114
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	III-2
3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III-4
3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	III-8
3.1.4 Aspek Pelayanan Umum	III-12
3.2 ISU STRATEGIS.....	III-17
3.2.1 Tren Pembangunan Global	III-17
3.2.2 Isu Pembangunan Nasional.....	III-19

3.2.3	Isu Pembangunan Provinsi	III-21
3.2.4	Isu Pembangunan Perwilayahan (Gelang manggung).....	III-22
3.2.5	Isu Strategis Daerah	III-22
3.2.6	Integrasi Isu Strategis Daerah RPJPD Kabupaten Temanggung dengan Isu Strategis KLHS dan RTRW.....	III-27
BAB IV		IV-1
VISI DAN MISI.....		IV-1
4.1	VISI DAERAH.....	IV-1
4.1.1.	Rumusan Visi Daerah	IV-1
4.1.2.	Sasaran Utama Visi.....	IV-5
4.2	MISI DAERAH	IV-6
BAB V.....		V-1
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK		V-1
5.1	ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1.1	Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	V-4
5.1.2	Arah Kebijakan Tahun 2030-2034	V-6
5.1.3	Arah Kebijakan Tahun 2035-2039	V-9
5.1.4	Arah Kebijakan Tahun 2040-2045	V-11
5.2	SASARAN POKOK.....	V-14
5.2.1	MISI 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya	V-166
5.2.2	MISI 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	V-19
5.2.3	MISI 3: Mewujudkan Lingkungan yang Memiliki Daya Dukung Memadai, Berketahanan dan Berkelanjutan	V-21
5.2.4	MISI 4: Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Adaptif dan Berdaya Saing	V-25
5.2.5	MISI 5: Mengembangkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Digital dan Peningkatan Konektivitas Wilayah	V-28
5.2.6	MISI 6: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	V-30
BAB VI PENUTUP.....		VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Lainnya	I-6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Temanggung.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi dan Kelerengan Kabupaten Temanggung	II-4
Gambar 2.3	Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung	II-5
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung	II-8
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung.....	II-8
Gambar 2.6	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung	II-11
Gambar 2.7	Peta Lahan Kritis Kabupaten Temanggung	II-13
Gambar 2.8	Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung	II-16
Gambar 2.9	Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan.....	II-17
Gambar 2.10	Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air.....	II-21
Gambar 2.11	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim	II-22
Gambar 2.12	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim	II-23
Gambar 2.13	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air dan Banjir	II-24
Gambar 2.14	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air dan Banjir	II-25
Gambar 2.15	Persentase Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana.....	II-26
Gambar 2.16	Persentase Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana.....	II-27
Gambar 2.17	Persentase Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiveritas.....	II-28
Gambar 2.18	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiveritas	II-29
Gambar 2.19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	II-30
Gambar 2.20	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Temanggung	II-32
Gambar 2.21	Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2044	II-34
Gambar 2.22	Peta Rawan Bencana Banjir Sungai Kabupaten Temanggung	II-35
Gambar 2.23	Peta Rawan Bencana Angin Topan Kabupaten Temanggung	II-35
Gambar 2.24	Peta Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Temanggung	II-36
Gambar 2.25	Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan Kabupaten Temanggung.....	II-37
Gambar 2.26	Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Temanggung ...	II-37
Gambar 2.27	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Temanggung berdasarkan Inarisk Tahun 2019-2023.....	II-38
Gambar 2.28	Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ..	II-39
Gambar 2.29	Total Pencapaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Kabupaten Temanggung 2010-2023	II-40
Gambar 2.30	Peta Sebaran Aksi Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Temanggung	II-41
Gambar 2.31	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023	II-44
Gambar 2.32	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023.....	II-44

Gambar 2.33	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023.....	II-46
Gambar 2.34	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022-2023	II-50
Gambar 2.35	Indeks Toleransi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ...	II-54
Gambar 2.36	Kontribusi PDPB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Katagori Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013-2023	II-59
Gambar 2.37	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2023.....	II-60
Gambar 2.38	PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023.....	II-61
Gamabr 2.39	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023.....	II-71
Gambar 2.40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Temanggung 2007-2023.....	II-76
Gambar 2.41	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung 2019-2023	II-77
Gambar 2.42	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	I
Gambar 2.43	Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-83
Gambar 2.44	Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-83
Gambar 2.45	Peta Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Temanggung.....	II-117
Gambar 3.1	Proses Perumusan Permasalahan, Tantangan dan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Temanggung.....	III-1
Gambar 3.2	Padanan Isu Strategis Kabupaten Temanggung dengan Isu Pembangunan Nasional dan Provinsi.....	III-27
Gambar 3.3	Padanan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Temanggung dengan Isu KLHS dan RTRW.....	III-29
Gambar 4.1	Rumusan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 Berdasarkan Isu Strategis	IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kelas Kemiringan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung	II-2
Tabel 2.2	Curah Hujan Tiap Kecamatan Kabupaten Temanggung	II-5
Tabel 2.3	Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung.....	II-7
Tabel 2.4	Tabel Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Temanggung ..	II-10
Tabel 2.5	Pembagian Wilayah DAS Kabupaten Temanggung.....	II-11
Tabel 2.6	Luasan Lahan Kritis Kabupaten Temanggung Tahun 2023 .	II-12
Tabel 2.7	Kebutuhan Beras Kabupaten Temanggung.....	II-14
Tabel 2.8	Produksi Beras Kabupaten Temanggung	II-15
Tabel 2.9	Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.....	II-17
Tabel 2.10	Status Daya Dukung Air Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	II-20
Tabel 2.11	Luas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung.....	II-22
Tabel 2.12	Luas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air Banjir Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung.....	II-24
Tabel 2.13	Luas Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan Bencana dan Perlindungan Bencana Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung.....	II-27
Tabel 2.14	Luas Jasa Lingkungan Hidup Biodiversitas Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung.....	II-29
Tabel 2.15	Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ..	II-30
Tabel 2.16	Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ..	II-31
Tabel 2.17	Neraca Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.....	II-32
Tabel 2.18	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024.....	II-33
Tabel 2.19	Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-39
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023.....	II-41
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	II-42
Tabel 2.22	Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-45
Tabel 2.23	Persentase Cagar Budaya Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-46
Tabel 2.24	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-47
Tabel 2.25	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-48
Tabel 2.26	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-48
Tabel 2.27	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun) Tahun 2019-2023	II-49
Tabel 2.28	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri Tahun 2023	II-51
Tabel 2.29	Persentase Tertanganinya Konflik di Masyarakat Tahun 2023.....	II-52
Tabel 2.30	Prevalensi Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-53

Tabel 2.31	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-53
Tabel 2.32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-55
Tabel 2.33	Identifikasi Data Komposit Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-58
Tabel 2.34	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-61
Tabel 2.35	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-63
Tabel 2.36	Rasio Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-64
Tabel 2.37	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-64
Tabel 2.38	Capaian Rasio Kewirausahaan Daerah Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-65
Tabel 2.39	Capaian Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-65
Tabel 2.40	Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-66
Tabel 2.41	Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019-2023.....	II-67
Tabel 2.42	Total dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-68
Tabel 2.43	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-69
Tabel 2.44	Return on Aset (ROA) BUMD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019-2023.....	II-69
Tabel 2.45	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-71
Tabel 2.46	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013.....	II-73
Tabel 2.47	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	II-73
Tabel 2.48	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Tahun 2024	II-74
Tabel 2.49	Porposi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	II-75
Tabel 2.50	Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-78
Tabel 2.51	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-78
Tabel 2.52	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi.....	II-79
Tabel 2.53	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantab Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-79
Tabel 2.54	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-80
Tabel 2.55	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023	II-80
Tabel 2.56	Cakupan Layanan Air Minum Aman Perpipaan Perkotaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-81

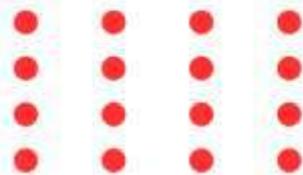
Tabel 2.57	Indeks Kemudahan Berusaha Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-84
Tabel 2.58	Indikator Aspek Pelayanan Umum	II-84
Tabel 2.59	Target Kinerja dan Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-88
Tabel 2.60	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 (jiwa).....	II-96
Tabel 2.61	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 (jiwa).....	II-96
Tabel 2.62	Proyeksi Proporsi Rasio Ketergantungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.....	II-97
Tabel 2.63	Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Temanggung.....	II-98
Tabel 2.64	Proyeksi Kebutuhan Hunian Kabupaten Temanggung 2025-2045.....	II-100
Tabel 2.65	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Temanggung 2025-2045.....	II-101
Tabel 2.66	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Temanggung 2025-2045.....	II-101
Tabel 2.67	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Temanggung 2025-2045.....	II-102
Tabel 2.68	Capaian Pemanfaatan Sampah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-103
Tabel 2.69	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	II-104
Tabel 2.70	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	II-105
Tabel 2.71	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2030.....	II-105
Tabel 2.72	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2035.....	II-106
Tabel 2.73	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2040.....	II-107
Tabel 2.74	Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2045.....	II-107
Tabel 2.75	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung Kategori Rumah Sakit Tahun 2023	II-108
Tabel 2.76	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung Kategori Puskesmas Tahun 2023	II-109
Tabel 2.77	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung Kategori Puskesmas Pembantu dan Klinik Tahun 2023	II-109
Tabel 2.78	Ketersediaan Tempat Tidur pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	II-110
Tabel 2.79	Proyeksi Kebutuhan Unit Tempat Tidur Fasilitas Kesehatan Kabupaten Temanggung 2025-2045.....	II-111
Tabel 2.80	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.....	II-112
Tabel 3.1	Isu Strategis Nasional.....	III-19
Tabel 3.2	Tren Pembangunan Global, Isu Pembangunan Nasional, Isu Pembangunan Provinsi, Isu Pembangunan Perwilayahan dan Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2045.....	III-25
Tabel 4.1	Rumusan Pernyataan Visi Kabupaten Temanggung 2045 ...	IV-2

Tabel 4.2	Penjelasan Visi Kabupaten Temanggung 2045.....	IV-3
Tabel 4.3	Padanan Visi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan Visi RPJP Nasional dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	IV-3
Tabel 4.4	Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	IV-4
Tabel 4.5	Padanan Visi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan Visi Rekomendasi KLHS dan Tujuan RTRW Kabupaten Temanggung.....	IV-5
Tabel 4.6	Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.....	IV-6
Tabel 4.7	Rumusan Misi Kabupaten Temanggung	IV-6
Tabel 4.8	Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	IV-8
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.....	V-2
Tabel 5.2	Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kabupaten Temanggung dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	V-3
Tabel 5.3	Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Temanggung dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	V-14
Tabel 5.4	Sasaran Pokok dan Indikator Misi 1	V-18
Tabel 5.5	Sasaran Pokok dan Indikator Misi 2	V-20
Tabel 5.6	Sasaran Pokok dan Indikator Misi 3	V-23
Tabel 5.7	Sasaran Pokok dan Indikator Misi 4	V-26
Tabel 5.8	Sasaran Pokok dan Indikator Misi 5	V-29
Tabel 5.9	Sasaran Pokok dan Indikator Misi 6	V-31
Tabel 5.10	Cascading Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tahapan Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator dan Target RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045	V-34



BAB I

PENDAHULUAN



MEMUAT LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM PENYUSUNAN, KETERKAITAN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAIN, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA SISTEMATIKA PENULISAN.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan daerah yang berkualitas di masa depan perlu ditunjang oleh perencanaan pembangunan yang matang, sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya mendasar untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut. Dokumen perencanaan pembangunan merupakan penuntun bagi setiap pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem tersebut perlu dimuat dalam satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut dijelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD menjadi dokumen penting untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan.

Selain berpedoman pada RTRW, penyusunan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 juga mengacu pada hasil KLHS yang memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Isu strategis yang menjadi rekomendasi dalam dokumen KLHS menjadi bagian dalam penegasan isu strategis RPJPD. Rekomendasi sasaran strategis dan kebijakan serta target dalam dokumen KLHS juga menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD.

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode RPJPD Kabupaten Temanggung tahun 2005-2025, maka sesuai amanat Undang-undang perlu dilakukan penyusunan rancangan dokumen RPJPD yang baru (RPJPD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2045). Selain amanat undang-undang, penyusunan RPJPD yang baru perlu dilakukan sebagai respon terhadap semakin kompleks dan beragamnya tantangan juga masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam dokumen RPJPD 2025-2045. Perkembangan ekonomi dan perdagangan, perubahan kondisi sosial demografis masyarakat, perkembangan teknologi, serta perubahan iklim merupakan beberapa tren atau skenario tantangan masa depan yang akan dihadapi dalam skala nasional hingga lokal.

Mendasarkan pada Pasal 201 ayat (8) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa calon kepala daerah menyusun visi, misi dan program berpedoman kepada RPJPD. Dengan akan berakhirnya RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan RPJPD tahun 2025-2045. Rancangan RPJPD dilaksanakan tahun 2023 sebagai dasar bagi calon kepala daerah dalam menyusun rancangan Visi dan Misi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Berdasarkan uraian tersebut, maka Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
9. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045.
10. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tertanggal 17 April 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJPD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya:

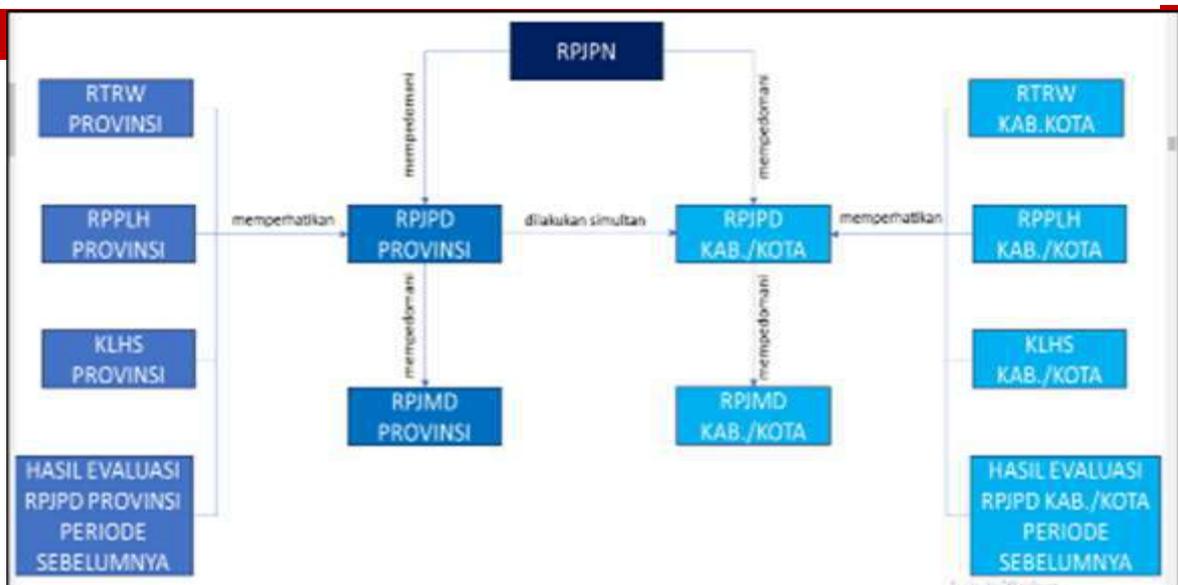
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun dokumen RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. RPJPD perlu diselaraskan RPJPN sebagai bentuk dukungan daerah terhadap pencapaian visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Tata ruang perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional. RPJPD dan RTRW saling terkait karena visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD harus selaras dengan pengaturan tata ruang yang diatur dalam RTRW. Keterkaitan ini membantu mengarahkan pembangunan fisik dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah agar selaras dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang daerah.
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. KLHS RPJPD merupakan Instrumen Pembangunan Berkelanjutan agar bisa dilaksanakan kedalam Dokumen Perencanaan Daerah. Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS RPJPD memadukan isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Daya Dukung Daya Tampung, dan Isu-isu daerah lainnya sebagai dasar dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Secara umum, keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat yaitu adanya sinkronisasi, di mana perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB). Sedangkan keterkaitan di tingkat daerah yaitu konsistensi, di mana sesuatu yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Secara rinci keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Temanggung digambarkan sebagai berikut

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Lainnya



1.4.1 Maksud

RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 20 tahun.

1.4.2 Tujuan

RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045 disusun dengan tujuan:

1. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung selama rentang tahun 2025-2045
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan rancangan RPJPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyajian rancangan RPJPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a) BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, keterkaitan RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lain, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

b) BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Temanggung dari aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, aspek daya saing ekonomi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, dan investasi serta aspek pelayanan umum. Bagian ini juga mencakup evaluasi dan rekomendasi hasil RPJPD periode sebelumnya (2005-2025), tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat perwilayahan.

c) BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan, tantangan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Temanggung

d) BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat visi dan misi daerah Kabupaten Temanggung

e) BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pada bagian ini memuat arah kebijakan dalam periode 5 tahunan dalam satuan tahapan pembangunan, sasaran pokok, dan indikator pembangunan

f) BAB VI PENUTUP

Memuat harapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2045 serta menggarisbawahi tentang pentingnya RPJPD bagi pembangunan daerah tahun 2025-2045.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Temanggung dari aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, aspek daya saing ekonomi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, dan investasi serta aspek pelayanan umum. Bagian ini juga mencakup evaluasi dan rekomendasi hasil RPJPD periode sebelumnya (2005-2025), tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat perwilayahan.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

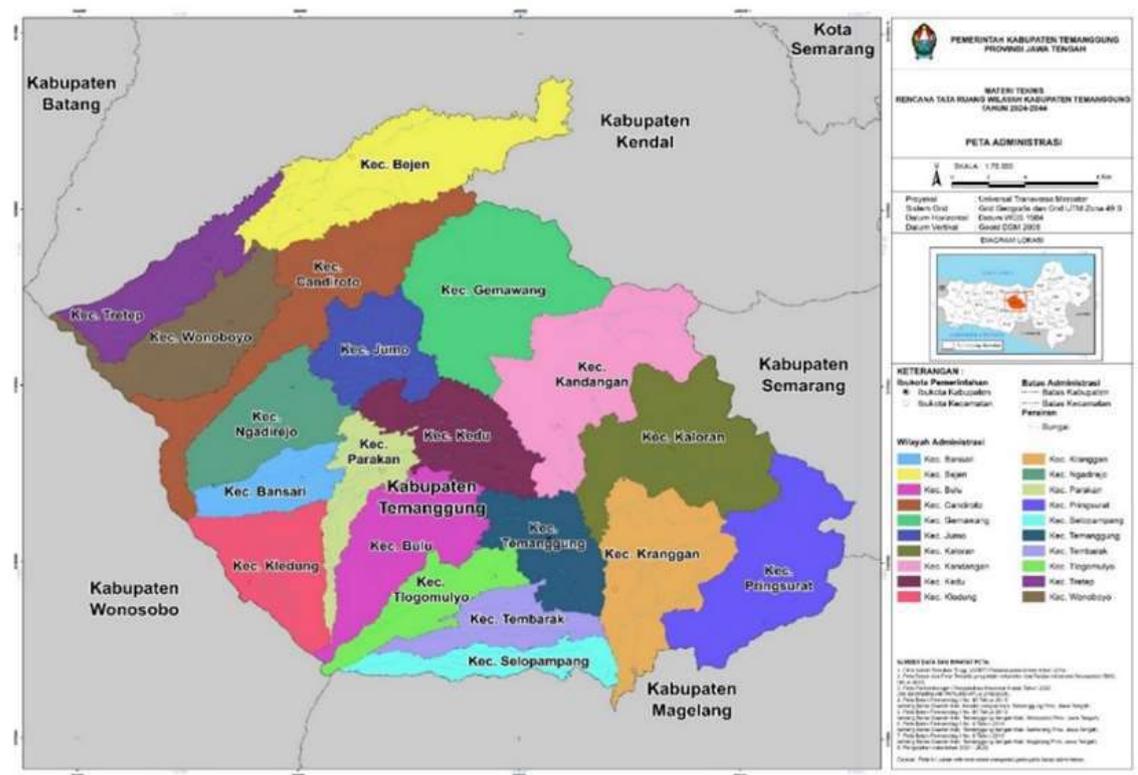
2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Pada kondisi geografis menguraikan mengenai kondisi fisik Kabupaten Temanggung baik dari batas administrasi, aspek topografi, hidrologi, serta penggunaan lahan yang direpresentasikan secara spasial. Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak antara 7°32'14" - 7°32'35" Lintang Selatan dan 110°46'23" - 110°46'30" Bujur Timur. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 86.483 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kecamatan Bejen, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gemawang, dan Kecamatan Candiroto;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, dan Kecamatan Pringsurat;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kledung, Kecamatan Ngadirejo, dan Kecamatan Wonobojo;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Pringsurat.

Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Peta wilayah administrasi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2024

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Temanggung

2.1.1.2 Topografi

Secara Topografi Kabupaten Temanggung termasuk dalam wilayah dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh 2 buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 mdpl) dan Gunung Sindoro (3.151 mdpl).

Kabupaten Temanggung memiliki relief yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, dan sangat terjal. Kelas kemiringan Kabupaten Temanggung dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Kelas Kemiringan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung

KECAMATAN	KELERENGAN				TOTAL LUAS (Ha)
	> 40 %	0-2 %	15-40 %	2-15 %	
Bansari	304,09	-	823,16	910,19	2.037,44
Bejen	669,28	18,87	4.137,20	1.783,41	6.608,75
Bulu	1.046,67	-	1.741,85	1.732,25	4.520,77
Candiroto	1.923,96	32,06	2.824,75	1.539,29	6.320,06
Gemawang	3.622,14	-	2.632,92	908,84	7.163,90
Jumo	820,46	-	612,34	1.662,39	3.095,19
Kaloran	1.043,39	-	3.121,45	2.202,45	6.367,29
Kandangan	1.822,74	-	2.770,77	2.467,43	7.060,93
Kedu		-	144,02	3.573,04	3.717,05
Kledung	1.288,82	-	2.267,73	148,14	3.704,70
Kranggan		-	1.857,62	3.459,09	5.316,71
Ngadirejo	78,21	-	1.052,97	2.651,91	3.783,09
Parakan	235,62	-	371,14	1.745,62	2.352,38
Pringsurat	275,45	-	2.150,98	3.528,74	5.955,16

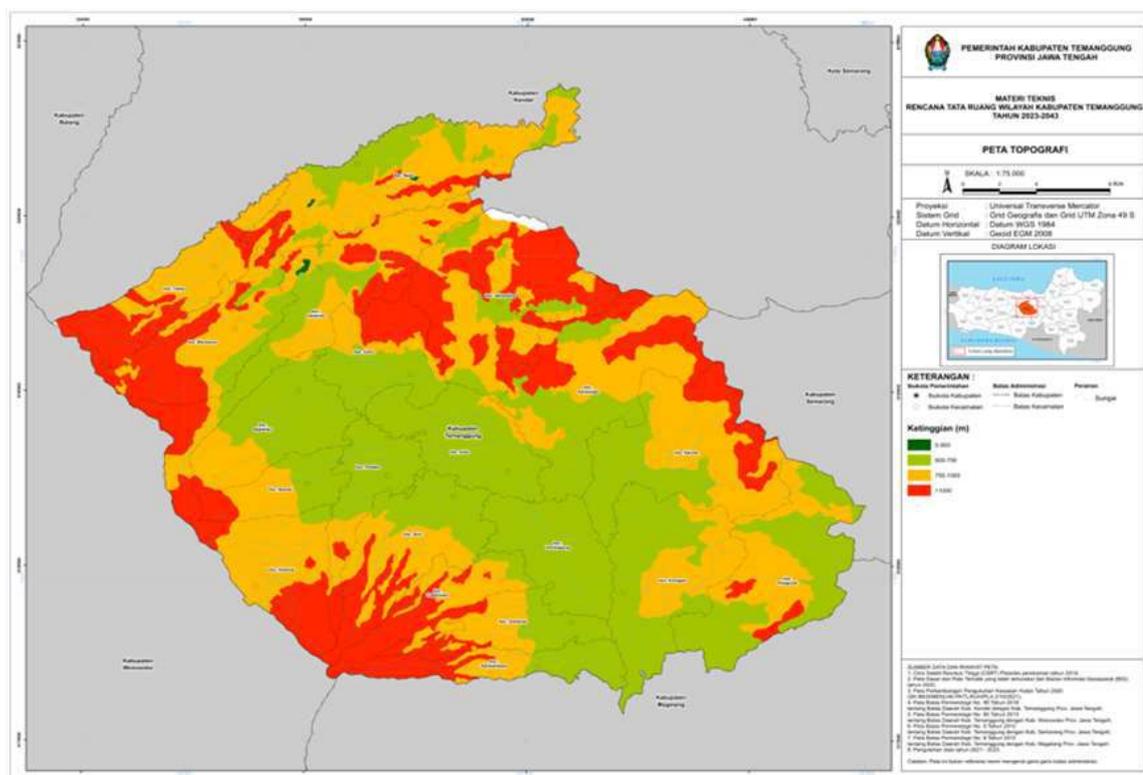
KECAMATAN	KELERENGAN				TOTAL LUAS (Ha)
	> 40 %	0-2 %	15-40 %	2-15 %	
Selopampang	713,69	-	568,87	957,56	2.240,12
Temanggung		-		3.229,02	3.229,02
Tembarak	445,69	-	1.051,71	960,00	2.457,40
Tlogomulyo	1.212,78	-	1.169,41	263,49	2.645,67
Tretep	1.461,94	-	2.071,60	-	3.533,54
Wonobojo	1.949,86	-	1.699,07	725,29	4.374,22
TOTAL LUAS (Ha)	18.914,78	50,93	33.069,55	34.448,15	86.483,41

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Dari tabel diatas letak kemiringan wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi empat kelas kelerengan sebagai berikut:

1. Kelas lereng I (kemiringan 0 – 2 %) seluas 50,93 Ha dengan penyebarannya di sebagian Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Bejen.
2. Kelas lereng II (kemiringan 2 – 15%) seluas 34.448,15 Ha dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Bulu, Kecamatan Parakan, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Jumo, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Kedu, dan Kecamatan Bejen.
3. Kelas lereng III (kemiringan 15 – 40%) seluas 33.069,55 Ha dengan penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kedu, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Bejen, Kecamatan Parakan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Kledung.
4. Kelas lereng IV (kelerengan > 40%) seluas 18.914,78 Ha dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, Kecamatan Bejen, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Tretep, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Gemawang.

Peta topografi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.2.

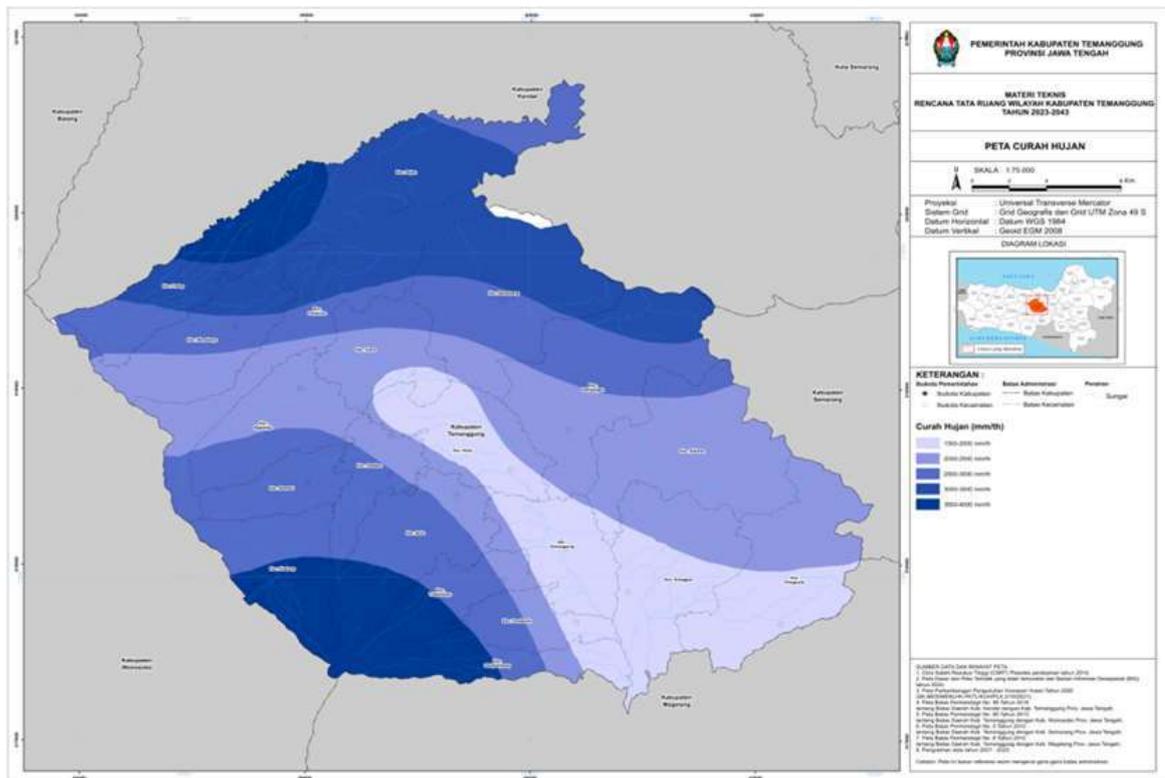


Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Temanggung

2.1.1.3 Klimatologi

Kabupaten Temanggung mempunyai sifat iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Wilayah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin, terutama di Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu (lereng Gunung Sumbing), Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Candiroto. Kabupaten Temanggung memiliki suhu udara relatif sejuk yaitu antara 22,0 °C – 23,6 °C, berada pada kawasan yang relatif tinggi. Peta curah hujan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.3.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.3 **Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung**

Curah hujan tiap kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Curah Hujan Tiap Kecamatan Kabupaten Temanggung

KECAMATAN	SKOR HUJAN	KETERANGAN					TOTAL LUAS (Ha)
		1500-2000 mm/th	2000-2500 mm/th	2500-3000 mm/th	3000-3500 mm/th	3500-4000 mm/th	
Bansari	70	-	0,36	2037,07	-	-	2037,44
Bejen	140	-	-	1209,45	4239,63	1159,68	6608,75
Bulu	140	16,27	896,87	2324,73	-	1282,90	4520,77
Candiroto	160	-	1647,41	1477,71	3194,95	-	6320,06
Gemawang	140	13,29	954,56	2348,52	3847,53	-	7163,90
Jumo	90	499,86	1789,71	805,62	-	-	3095,19
Kaloran	90	164,99	5597,74	604,56	-	-	6367,29
Kandangan	140	79,07	2862,10	2619,78	1499,99	-	7060,93
Kedu	50	2648,21	1068,84	-	-	-	3717,05
Kledung	90	-	-	1815,26	-	1889,44	3704,70
Kranggan	50	3327,48	1989,24	-	-	-	5316,71
Ngadirejo	70	-	2236,99	1546,09	-	-	3783,09
Parakan	140	26,67	811,85	1254,13	-	259,74	2352,38
Pringsurat	50	3182,16	2773,00	-	-	-	5955,16
Selopampang	140	591,93	300,29	401,08	-	946,82	2240,12
Temanggung	50	2912,60	316,42	-	-	-	3229,02
Tembarak	140	466,90	604,96	839,86	-	545,69	2457,40
Tlogomulyo	140	17,29	423,03	906,44	-	1298,91	2645,67
Tretep	170	-	93,72	1242,27	1220,95	976,61	3533,54
Wonoboyo	170	-	1787,51	1440,96	1114,46	31,30	4374,22
TOTAL LUAS (Ha)	2230	13.946,72	26.154,59	22.873,52	15.117,50	8.391,08	86.483,41

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Rata-rata curah hujan tertinggi di Kabupaten Temanggung yaitu 2.000-2500 mm/tahun dengan luas total 26.154,59 Ha. Curah hujan tertinggi tercatat pada Kecamatan Gemawang dengan luasan 7163,90 Ha dan terendah adalah Kecamatan Bansari dengan luas 2037,44 Ha. Karakteristik penyebaran curah hujan rerata bulanan berdasarkan klasifikasi Oldeman bervariasi dari yang memiliki bulan basah terpanjang dan bulan kering terpendek (B2) seperti Kledung, Tretep, Candiroto dan Pringsurat sampai yang memiliki bulan basah terpendek dan bulan kering terpanjang (D3) seperti Badran dan Kranggan. Sedangkan tipe agroklimat lain yang dijumpai adalah C2 pada stasiun Jumo, Parakan, Ngadirejo, Jumprit, Temanggung, dan Kranggan serta C3 adalah Kandangan. Sifat hujan di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh pola musim, curah hujan tertinggi pada bulan Desember-Januari dan periode kering antara bulan Juni - September, dan sebarannya dipengaruhi oleh sifat lokal (orografis).

2.1.1.4 Jenis Tanah

Pada wilayah Kabupaten Temanggung memiliki lahan seluas Lahan seluas 86.483 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi latosol merah kekuningan yakni seluas 31.979,81 Ha (36,98%), latosol coklat seluas 28.915,25 Ha (33,43%), regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 Ha (14,01%), latosol coklat kemarahan seluas 8.559,87 Ha (9,90%), regosol kuning seluas 2.856,40 Ha (3,30%) dan andosol seluas 2.052,14 Ha (2,37%).

Jenis tanah Latosol Coklat membentang dari arah barat laut ke tenggara, Latosol Coklat Kemerahan membentang di bagian timur ke tenggara, sedangkan Latosol Merah Kekuningan membentang di bagian timur dan barat dan termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang agak peka terhadap erosi.

Sementara itu, jenis tanah Regosol membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal. Jenis tanah Andosol ditemui pada sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat dan jenis tanah ini termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang peka terhadap erosi.

Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran aluvial dan kaki gunung api. Dataran aluvial dan kaki gunung api sendiri memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara yang berasal dari material erupsi gunung api yang mengandung berbagai mineral. Kemampuan tanah dari dataran ini mampu mengalirkan air dengan baik. Tekstur tanah berupa pasir memiliki ruang antar pori yang menjadi lokasi untuk cadangan air tanah sehingga ketersediaannya tetap terjaga. Tanah

aluvium memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan mengalirkan air.

Jenis tanah Kabupaten Temanggung dibedakan menjadi 6 jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

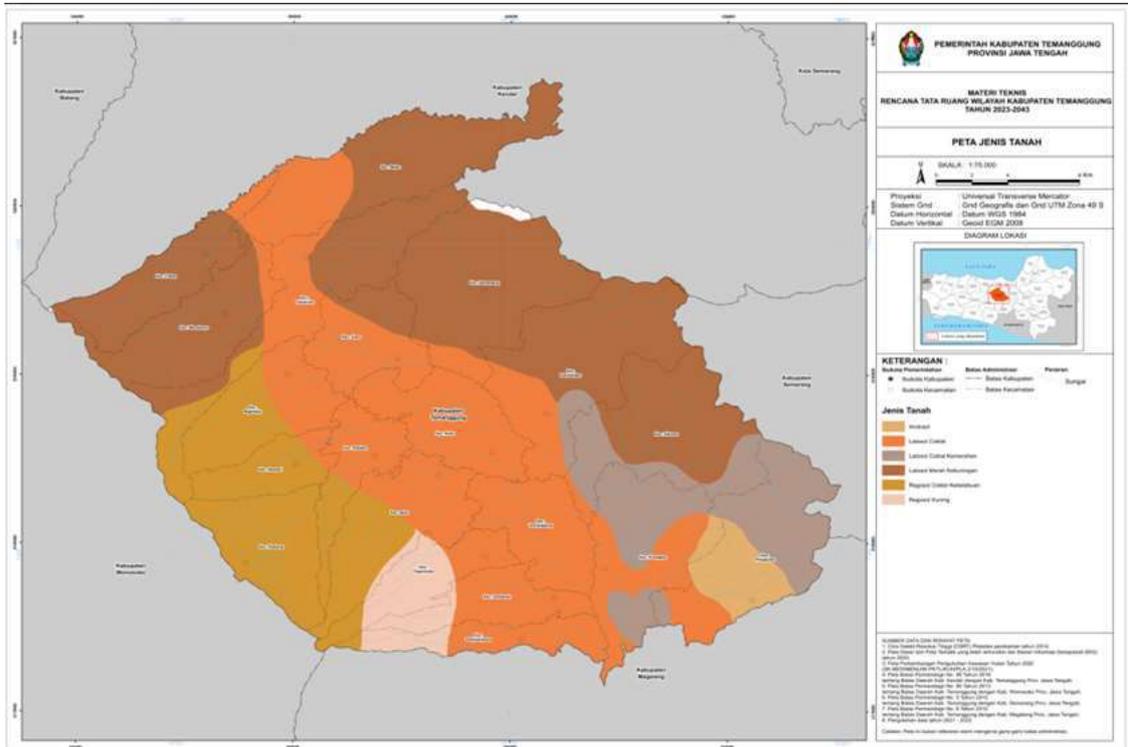
Tabel 2.3
Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Andosol	Latosol Coklat	Latosol Coklat Kemarahan	Latosol Merah Kekuningan	Regosol Coklat Kekelabuan	Regosol Kuning	TOTAL (Ha)
Bansari	-	289	-	-	1.748	-	2.037
Bejen	-	2.158	-	4.451	-	-	6.609
Bulu	-	2.153	-	-	2.180	187	4.521
Candiroto	-	1.611	-	3.580	1.129	-	6.320
Gemawang	-	495	-	6.669	-	-	7.164
Jumo	-	2.257	-	838	-	-	3.095
Kaloran	-	162	1.983	4.222	-	-	6.367
Kandangan	-	1.678	436	4.947	-	-	7.061
Kedu	-	3.717	-	-	-	-	3.717
Kledung	-	-	-	-	3.705	-	3.705
Kranggan	253	2.256	2.808	-	-	-	5.317
Ngadirejo	-	1.631	-	-	2.152	-	3.783
Parakan	-	1.560	-	-	792	-	2.352
Pringsurat	1.799	822	3.333	-	-	-	5.955
Selopampang	-	1.551	-	-	88	602	2.240
Temanggung	-	3.229	-	-	-	-	3.229
Tembarak	-	1.897	-	-	0	561	2.457
Tlogomulyo	-	813	-	-	326	1.507	2.646
Tretep	-	302	-	3.232	-	-	3.534
Wonobojo	-	335	-	4.040	-	-	4.374
TOTAL (Ha)	2.052	28.915	8.560	31.980	12.120	2.856	86.483

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Sebagian besar jenis tanah yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu latosol merah kekuningan yakni seluas 31.979,81 Ha (36,98%), latosol coklat seluas 28.915,25 Ha (33,43%), regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 Ha (14,01%), latosol coklat kemarahan seluas 8.559,87 Ha (9,90%), regosol kuning seluas 2.856,40 Ha (3,30%) dan andosol seluas 2.052,14 Ha (2,37%).

Sebaran jenis tanah di Kabupaten Temanggung dapat terlihat pada gambar 2.4.



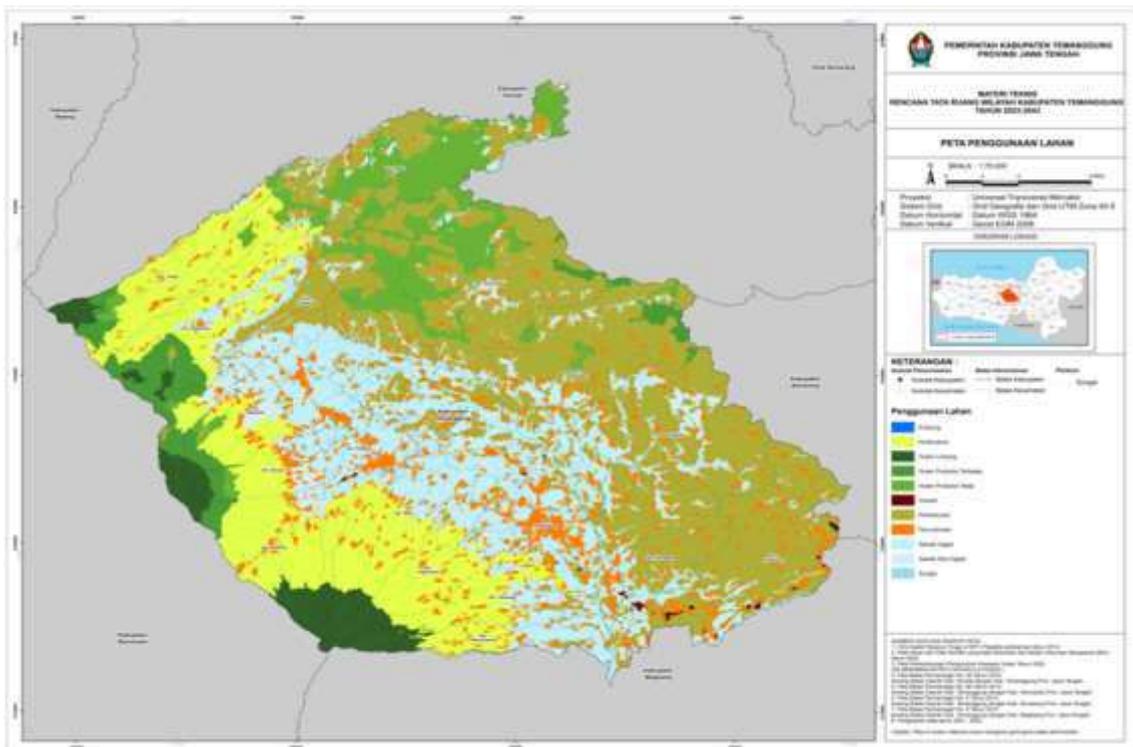
Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Lahan merupakan wadah bagi segala aktivitas penduduk kota yang merupakan pencerminan kegiatan masyarakat ke dalam wujud ruang. Klasifikasi tutupan lahan dan klasifikasi penggunaan lahan adalah upaya pengelompokan berbagai jenis tutupan lahan ke dalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu.

Peta penggunaan lahan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.5.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung

Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung yang memiliki luasan paling tinggi yaitu Perkebunan seluas 28.297,413 Ha atau 32,72% dari total luas wilayah. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan terkecil yaitu Embung yang hanya memiliki luasan 2,307 Ha atau setara dengan 0,003% dari luas total. Selain itu, penggunaan lahan industri di Kabupaten Temanggung juga memiliki luasan yang kecil, hanya seluas 137,205 Ha atau 0,159% dari total luas wilayah.

Penggunaan lahan per Kecamatan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Tabel Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Embung	Hortikultura	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Industri	Perkebunan	Permukiman	Sawah Irigasi	Sawah Non Irigasi	Sungai	Total (Ha)
Bansari	-	701,989	148,367	153,383	110,471	-	26,834	239,224	445,170	190,710	21,291	2.037,439
Bejen	-	529,024	-	-	3.078,882	-	2.156,351	230,278	478,715	55,040	80,463	6.608,752
Bulu	-	2.210,561	391,459	-	-	-	48,362	453,739	1.380,417	6,316	29,913	4.520,768
Candiroto	-	500,992	413,948	576,695	1.188,097	-	2.184,856	320,821	980,802	123,633	30,220	6.320,063
Gemawang	-	-	-	153,999	1.723,596	-	4.443,985	335,120	478,765	15,031	13,409	7.163,904
Jumo	-	-	-	-	417,361	-	1.137,517	271,854	1.245,277	7,026	16,158	3.095,192
Kaloran	-	-	-	8,116	5,017	-	4.221,132	607,211	1.284,158	197,924	43,728	6.367,286
Kandangan	0,377	-	-	381,687	285,513	3,071	4.417,490	538,192	1.407,074	5,605	21,925	7.060,935
Kedu	-	-	-	-	-	4,801	901,295	526,621	2.234,984	0,160	49,191	3.717,052
Kledung	0,711	2.399,051	659,996	215,246	-	-	4,056	230,378	44,681	145,902	4,679	3.704,699
Kranggan	-	8,673	-	-	-	39,054	3.257,699	705,399	1.169,729	93,644	42,517	5.316,714
Ngadirejo	-	1.001,465	70,454	236,144	142,260	1,280	87,229	491,633	1.519,899	222,286	10,436	3.783,086
Parakan	-	482,682	86,257	-	-	10,116	108,550	440,866	1.146,598	41,860	35,451	2.352,381
Pringsurat	1,220	-	-	-	-	71,042	4.536,049	768,571	488,855	76,491	12,937	5.955,164
Selopampang	-	666,492	461,899	-	-	-	149,503	179,609	715,908	45,192	21,513	2.240,116
Temanggung	-	143,985	-	-	-	6,817	321,511	953,529	1.758,393	-	44,787	3.229,021
Tembarak	-	1.238,217	103,474	-	-	1,024	108,658	283,384	713,482	1,877	7,286	2.457,403
Tlogomulyo	-	1.642,566	445,709	-	-	-	17,224	204,443	329,270	2,681	3,780	2.645,673
Tretep	-	2.620,244	225,440	274,091	191,619	-	11,431	167,808	33,535	4,781	4,592	3.533,541
Wonobojo	-	2.154,814	204,074	974,106	10,077	-	157,678	219,988	619,886	19,665	13,934	4.374,223
TOTAL (Ha)	2,307	16.300,755	3.211,076	2.973,466	7.152,892	137,205	28.297,413	8.168,668	18.475,597	1.255,823	508,212	86.483,413
TOTAL (%)	0,003	18,848	3,713	3,438	8,271	0,159	32,720	9,445	21,363	1,452	0,588	100,000

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

2.1.1.6 Daerah Aliran Sungai

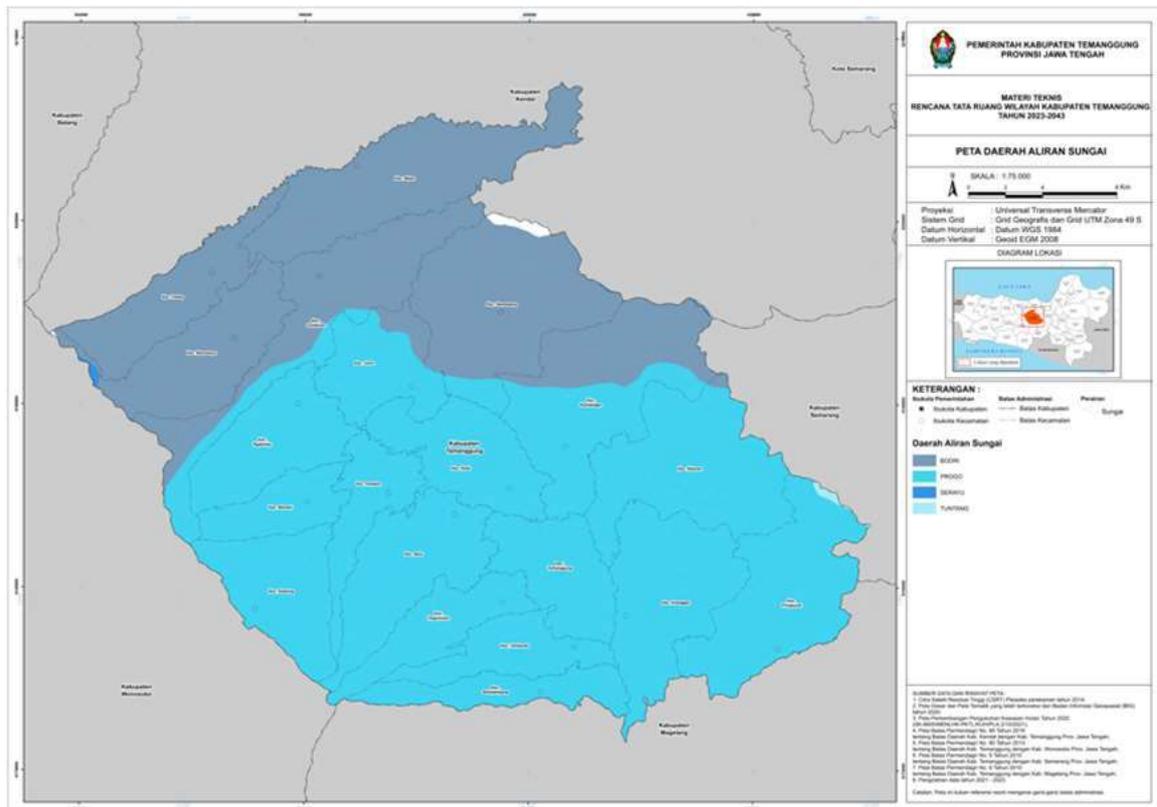
Kabupaten Temanggung cukup potensial akan mata air, terutama di bagian Barat (sekitar lereng Gunung Sindoro dan Sumbing serta Ungaran yaitu Kecamatan yang berbatasan langsung seperti Kledung, Tretep, Bejen, Wonobojo, Selopampang, Bansari, Ngadirejo dan Pringsurat). Sumberdaya air sungai di Kabupaten Temanggung terbagi dalam tiga wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni DAS Progo, DAS Bodri, DAS Serayu dan DAS Tuntang. Sementara itu, Tercatat 773 mata air yang tersebar di 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung dengan perkiraan kapasitas debit air mencapai 2.217,25 liter per detik. Adapun luas pembagian DAS Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pembagian Wilayah DAS Kabupaten Temanggung

No	DAS	Luas (Ha)
1	DAS Progo	56.449
2	DAS Bodri	29.903
3	DAS Serayu	54
4	DAS Tuntang	77
Total Luas DAS Kabupaten Temanggung		86.483

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui gambar berikut.



Sumber: Data diolah dari Dokumen Fakta Analisa RTRW Kabupaten Temanggung

Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung

2.1.1.7 Luasan Lahan Kritis

Luas lahan kritis (sangat kritis, kritis sudah berteras batu, kritis dan agak kritis) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 tercatat seluas 14.815,37 Ha. Rincian luasan lahan kritis Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut.

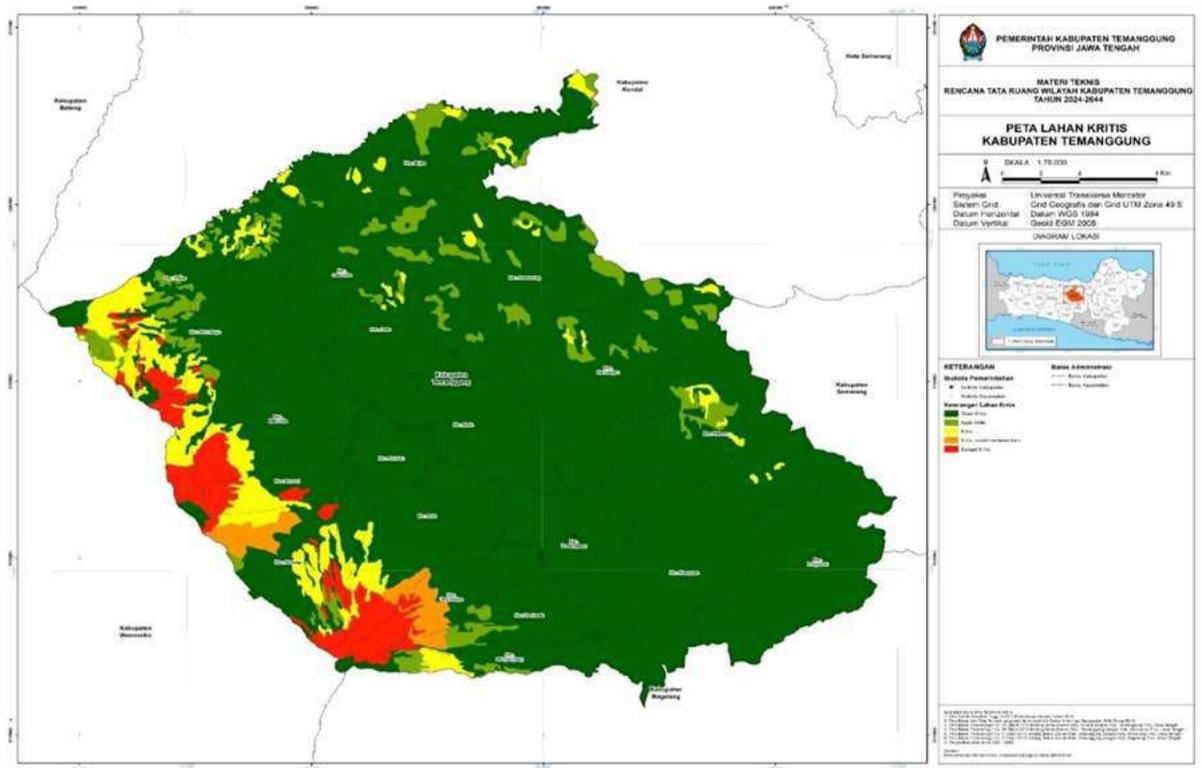
Tabel 2.6
Luasan Lahan Kritis Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

No	Kecamatan	Tidak Kritis	Agak Kritis	Kritis	Kritis, Sudah Berteras Batu	Sangat Kritis	Total
1	BANSARI	1274,292386		402,920326		360,225867	2037,438579
2	BEJEN	5567,469245	636,1531781	405,111164			6608,733587
3	BULU	3422,133263		371,4189533	168,8595594	558,3559413	4520,767717
4	CANDIROTO	4834,625773	463,2666547	475,3797389		546,7912639	6320,063431
5	GEMAWANG	6265,111487	793,1616666	109,8822752			7168,155429
6	JUMO	2980,547402	73,24483737	41,40007127			3095,192310
7	KALORAN	5826,776491	339,9050795	200,6040888			6367,285659
8	KANDANGAN	6432,093691	542,2830841	86,5581956			7060,934971
9	KEDU	3717,052242					3717,052242
10	KLEDUNG	1748,644294	182,773866	721,4026761	602,6068867	449,2716439	3704,699366
11	KRANGGAN	5316,714408					5316,714408
12	NGADIREJO	2957,465045		333,0302695		492,5910482	3783,086363
13	PARAKAN	2078,530842	14,37425922	177,8145223		81,66110579	2352,38073
14	PRINGSURAT	5955,164106					5955,164106
15	SELOPAMPANG	1711,986708	242,7536232	212,6996532		72,67601153	2240,115996
16	TEMANGGUNG	3229,020846					3229,020846
17	TEMBARAK	1938,763216	306,8866734	14,90172299	134,8499608	62,00109549	2457,402669
18	TLOGOMULYO	1630,866557	24,59615416		455,7532757	534,4337322	2645,649719
19	TRETEP	1842,256672	595,3403993	958,5619319		133,3795488	3529,538552
20	WONOBOYO	2938,729268	376,6735474	705,0032416		353,8163362	4374,222394
TOTAL		71668,24394	4591,413023	5216,688831	1362,069683	3645,203594	86483,61907

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Luas lahan kritis terbesar yaitu di Kecamatan Kledung dengan luas 1956,05 Ha. Lahan kritis di Kabupaten Temanggung diindikasikan dengan tingkat bahaya erosi yang berat. Kajian Tingkat Bahaya Erosi (TBE) pada lahan pertanian sayuran yang dilakukan Balitbang Pertanian khususnya di Desa Batusari dan Desa Kledung menunjukkan tingkat kehilangan tanah dalam satu tahun berkisar antara 28,1-63,1 ton per ha per tahun dimana angka ini tergolong berat hingga sangat berat.

Sebaran luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.7.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.7 Peta Lahan Kritis Kabupaten Temanggung

2.1.1.8 Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan menurut dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045. Analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam hal ini kebutuhan padi/beras dihitung mengacu pada pendapat pakar Fuad, *et, al* (2016) yang termuat dalam makalah Seminar nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun rencana.

1. Dari Sisi Permintaan (*Demand*)

- a) Menghitung laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan data rata-rata laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2022 sebesar 0,69%.
- b) Menghitung jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043 berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2043.
- c) Jumlah penduduk tahun 2023: 808.446 jiwa (Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2024)
- d) Jumlah penduduk Tahun 2043: 910.131 jiwa (hasil perhitungan proyeksi penduduk)
- e) Menentukan indeks konsumsi beras per tahun

- f) Dalam hal ini, indeks konsumsi beras per tahun ditentukan dengan mengacu kepada indeks konsumsi beras Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar 70,616 kg/kapita/tahun.
- g) Menghitung kebutuhan beras di Kabupaten Temanggung berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi dan indeks konsumsi beras penduduk per tahun dengan cara:
- h) Kebutuhan beras total = penduduk hasil proyeksi x indeks konsumsi beras
- i) Menghitung kebutuhan padi dengan cara:
- j) Kebutuhan padi = kebutuhan beras/0,6384 (konversi gabah ke beras)
- k) Menghitung kebutuhan luas panen dengan cara:
Kebutuhan luas panen = kebutuhan padi/ 6,33 ton GKP/ha atau 5,23 ton GKG/ha (rata-rata produktivitas padi Kabupaten Temanggung Tahun 2023)

Hasil perhitungan kebutuhan beras Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Kebutuhan Beras Kabupaten Temanggung

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Luas Panen (Ha)	Produksi Padi/GKG (Ton)	Kebutuhan Beras (Ton)
2023	808.446	17.103,2	89.425,474	57.089,2
2025	821.118	17.371,29	90.827,175	57.984,1
2029	848.910	17.959,25	93.901,361	59.946,6
2034	870.638	18.418,92	96.304,782	61.481,0
2039	885.931	18.742,45	97.996,403	62.560,9
2045	895.025	18.934,84	99.002,327	63.203,1

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung 2023 (data diolah)

2. Dari Sisi Ketersediaan (*Supply*)

- a) Menghitung produksi padi di Kabupaten Temanggung dengan pendekatan:

Total produksi padi (ton)= luas panen (ha) x Produktivitas padi (ton/ha)

Keterangan:

- Luas panen = luas tanam padi lahan dalam 1 tahun (luas panen) sebesar 18.038,8 ha (Tahun 2023)

- Produktivitas padi 5,23 ton GKG/ha (Tahun 2023)

b) Menghitung produksi beras di Kabupaten Temanggung dengan pendekatan:

Total produksi beras (ton) = total produksi padi (ton) x indeks konversi padi ke beras.

Catatan: Indeks konversi padi ke beras (1 kg GKG = 0,6384 kg beras).

Hasil perhitungan produksi beras di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Produksi Beras Kabupaten Temanggung

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	Produksi Padi/GKG (Ton)	Indeks Konversi Beras (kg)	Produksi Beras (Ton)
2023	808.446	18.084	91.491,5	0,6384	58.408,2
2025	821.118	15.972	80.806,3	0,6384	51.586,8
2029	848.910	15.846	80.168,9	0,6384	51.179,8
2034	870.638	15.687	79.364,5	0,6384	50.666,3
2039	885.931	15.531	78.575,2	0,6384	50.162,4
2045	895.025	15.345	77.634,2	0,6384	49.561,7

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung 2023 (data diolah)

Menunjukkan tingkat produktivitas lahan sawah dalam pemenuhan beras penduduk di Kabupaten Temanggung.

Data berdasarkan Indeks Konsumsi Beras Kabupaten Temanggung Hasil Susenas Tahun 2023 yaitu apabila produksi beras kurang dari kebutuhan beras, maka dapat dikatakan defisit dan apabila produksi beras lebih dari kebutuhan beras, maka dapat dikatakan surplus.

Daya dukung pangan menurut kajian analisa Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

1) Ketersediaan Pangan Pokok

Ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Temanggung dihitung berdasarkan produksi beras di Tahun 2023. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung maka produksi Gabah Kering Panen (GKP) Tahun 2023 sebesar 114.471,12 ton kemudian dikonversi menjadi beras menghasilkan 60.363,04 ton/tahun. Wilayah dengan Jasa Lingkungan Hidup (JLH) penyedia pangan tinggi (tutupan lahan berupa lahan pertanian) maka ketersediaan pangannya juga tinggi.

2) Kebutuhan Pangan Pokok

Kebutuhan pangan pokok di Kabupaten Temanggung dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan pangan pokok selama satu tahun (70,616 kg/orang/tahun). Sehingga perhitungan kebutuhan pangan sebagai berikut.

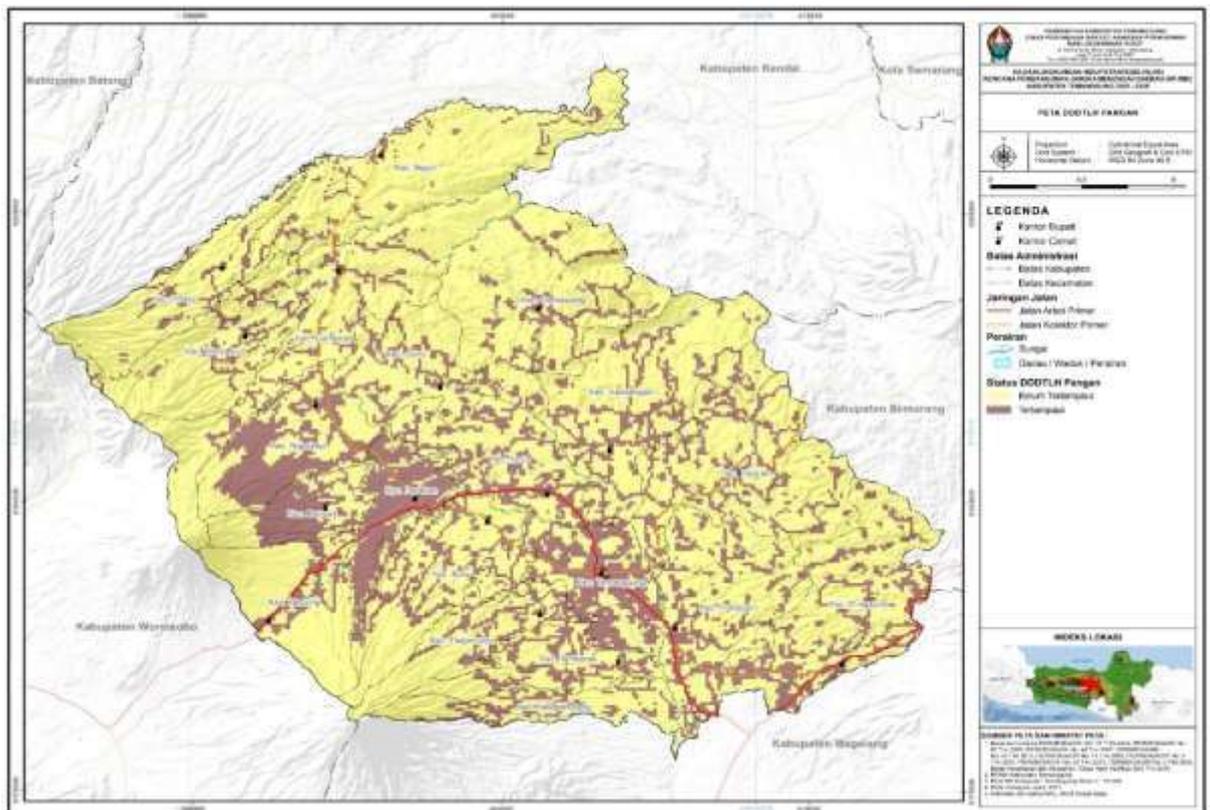
$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan pangan} &= \text{jumlah penduduk (jiwa)} \times \text{kebutuhan} \\ &\quad \text{pangan pokok selama satu tahun} \\ &= 808.446 \text{ jiwa} \times 0,070616 \text{ ton/tahun} \\ &= 57.089,22 \text{ ton/tahun} \end{aligned}$$

3) Status Daya Dukung Pangan Pokok

Status daya dukung pangan merupakan selisih ketersediaan dan kebutuhan total dengan ketentuan:

- Apabila selisih <0 maka dikategorikan “terlampau”
- Apabila selisih ≥ 0 maka dikategorikan “belum terlampau”

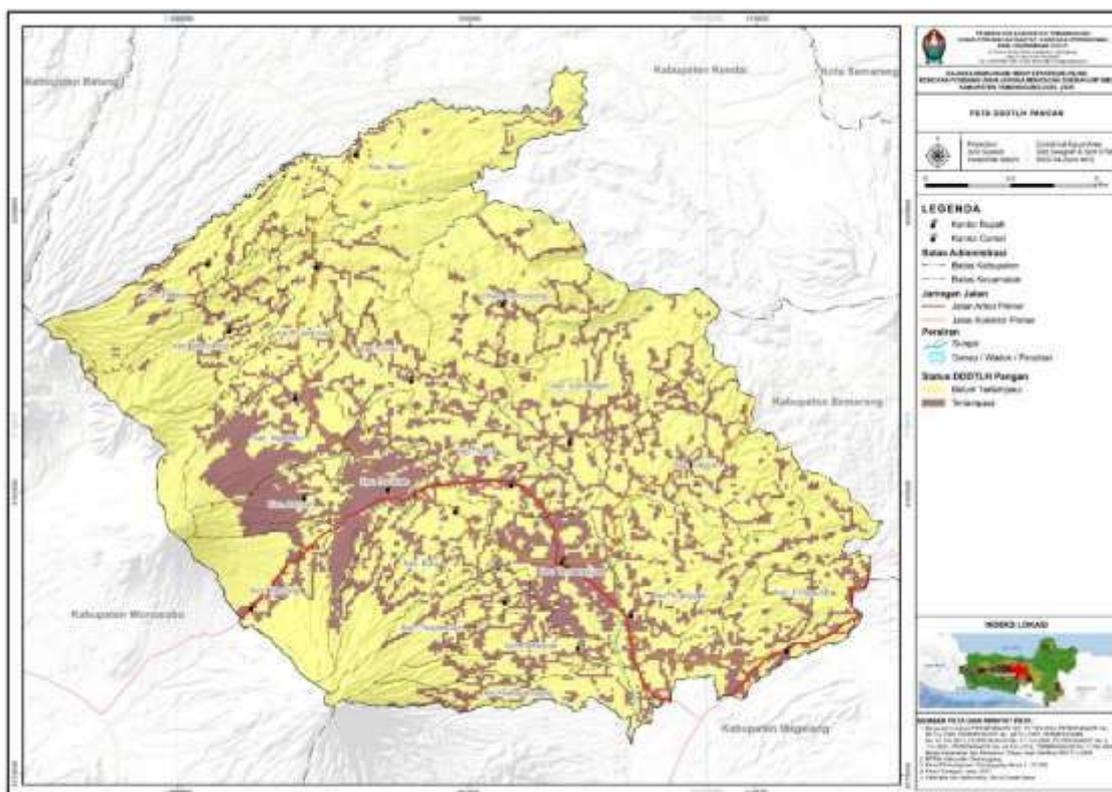
Kondisi daya dukung pangan pokok Kabupaten Temanggung masih surplus sebesar 3.273,82 ton/tahun, dengan rincian 73,19% belum terlampau atau setara dengan 63.297,95 Ha dan terlampau 26,81% atau setara dengan 23.185,47 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhannya.



Sumber: Analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2024

Gambar 2.8 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung

Peta jasa lingkungan pangan tiap kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.9.



Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2024

Gambar 2.9 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Status daya dukung pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan rincian 73,19% dengan status belum terlampaui dan 26,81% dengan status terlampaui. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan pangan (belum terlampaui) lebih tinggi dari pada kebutuhan pangannya (sudah terlampaui). Tahun 2023 daya dukung pangan di Kabupaten Temanggung masih dalam kondisi surplus.

Daya dukung pangan berdasarkan Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk ditampilkan dalam tabel 2.9.

**Tabel 2.9
Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045**

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	Produksi Padi/GKG (Ton)	Indeks Konversi Beras (kg)	Produksi Beras (Ton)	Kebutuhan Beras (Ton)	Defisi/Surplus
2023	808446	18.084	91.491,48	0,6384	58.408,16	57.089,22	1.318,94
2025	821118	15.972	80.806,34	0,6384	51.586,77	57.984,07	- 6.397,30

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	Produksi Padi/GKG (Ton)	Indeks Konversi Beras (kg)	Produksi Beras (Ton)	Kebutuhan Beras (Ton)	Defisi/Surplus
2029	848910	15.846	80.168,88	0,6384	51.179,81	59.946,63	- 8.766,82
2034	870638	15.687	79.364,45	0,6384	50.666,27	61.480,97	-10.814,71
2039	885931	15.531	78.575,21	0,6384	50.162,42	62.560,90	-12.398,49
2045	895025	15.345	77.634,19	0,6384	49.561,67	63.203,09	-13.641,42

* LP2B (Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah)

** Menggunakan Indeks Konsumsi Beras Kabupaten Temanggung (70,616)

Sumber : DKPPP,2024, data diolah

Daya Dukung Pangan Kabupaten Temanggung tahun 2025 diperkirakan akan mengalami defisit dikarenakan 2 hal utama, yakni penurunan luas panen padi dan peningkatan jumlah penduduk yang mendorong jumlah kebutuhan beras.

Proyeksi luas panen padi tahun 2025 adalah 15.972 ha dengan potensi produksi beras 51.586,77 ton. Luas panen padi pada 2025 diproyeksikan turun disebabkan oleh tren penurunan luas panen padi beberapa tahun kebelakang (>5 tahun kebelakang). Penurunan luas panen padi didorong oleh (i) alih komoditas dari padi menjadi komoditas lain seperti cabai; (ii) alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian.

Dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 821.118 jiwa dan indeks konsumsi beras 70,616 kg/kapita/tahun (Susenas Tahun 2023) maka kebutuhan beras Kabupaten Temanggung mencapai 58.003,36 ton/tahun. Dari angka proyeksi tersebut maka tampak angka defisit sebesar - 6.416,60 ton.

Di tahun 2023, produksi beras masih surplus dikarenakan panen periode Bulan Januari sd Maret yang tinggi sebagai akibat dari capaian tanam Bulan Oktober sd Desember 2022 yang tinggi (estimasi umur panen padi 4 bulan). Sebagai gambaran, puncak tanam padi Kabupaten Temanggung utamanya berlangsung pada bulan November sd Desember.

2.1.1.9 Daya Dukung Lingkungan Hidup

1) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

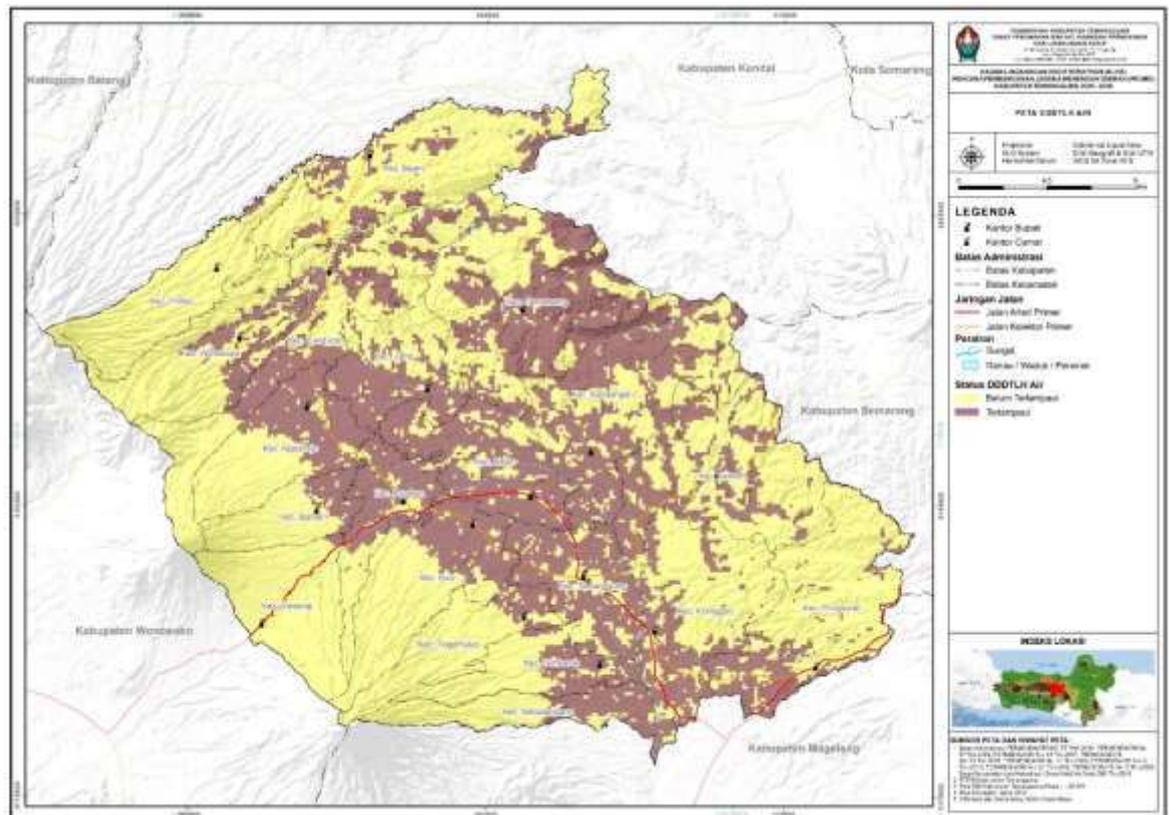
Jasa lingkungan hidup penyedia air bersih berkaitan dengan segala jenis sumber air yang tersedia dalam suatu ekosistem, baik itu berupa permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Besaran jasa lingkungan hidup penyedia jasa air bersih sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat

menyimpan air, bentang lahan, tutupan lahan, serta vegetasi. Penyediaan jasa air bersih juga sangat dipengaruhi oleh lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti ekoregion bentang lahan. Berdasarkan tabel dan gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa mayoritas wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan jasa lingkungan hidup penyedia air dengan status belum terlampaui pada kisaran 61,59% dan status terlampaui pada kisaran 38,41%. Dengan tingkat ketersediaan air 780.178.878,92 m³/tahun dan ketinggian kebutuhan air total 763.986.572,68 m³/tahun dengan kondisi surplus 16.188.306,24 m³/tahun. Tabel distribusi jasa lingkungan penyedia air bersih tiap kecamatan di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Status Daya Dukung Air Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air Domestik (m3/tahun)	Kebutuhan Air Pertanian (m3/tahun)	Kebutuhan Air Total (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
Kec. Bansari	21.820.832,06	2.116.627,20	16.149.103,09	18.265.730,30	3.555.101,76	73,51%	26,49%
Kec. Bejen	60.374.678,69	1.901.664,00	30.650.008,34	32.551.672,34	27.823.006,35	80,22%	19,78%
Kec. Bulu	47.440.821,89	4.298.486,40	44.659.395,35	48.957.881,75	-1.517.059,86	64,60%	35,40%
Kec. Candiroto	58.715.252,92	2.862.172,80	44.000.563,96	46.862.736,76	11.852.516,16	63,55%	36,45%
Kec. Gemawang	58.692.946,57	2.950.992,00	45.832.114,01	48.783.106,02	9.909.840,55	41,50%	58,50%
Kec. Jumo	30.272.712,82	2.624.486,40	36.500.665,79	39.125.152,20	-8.852.439,37	41,67%	58,33%
Kec. Kaloran	58.490.049,31	4.002.480,00	64.697.914,97	68.700.394,97	-10.210.345,67	62,42%	37,58%
Kec. Kandangan	58.479.187,96	4.631.299,20	62.404.264,03	67.035.563,23	-8.556.375,27	39,27%	60,73%
Kec. Kedu	36.079.460,92	5.225.385,59	51.104.497,94	56.329.883,54	-20.250.422,62	21,27%	78,73%
Kec. Kledung	33.688.983,48	2.459.203,20	14.245.741,04	16.704.944,24	16.984.039,24	98,31%	1,69%
Kec. Kranggan	49.625.556,32	4.386.009,61	50.901.781,13	55.287.790,74	-5.662.234,42	65,14%	34,86%
Kec. Ngadirejo	33.992.773,15	4.967.568,00	34.841.837,77	39.809.405,78	-5.816.632,63	54,88%	45,12%
Kec. Parakan	19.507.514,16	4.679.251,20	23.378.642,67	28.057.893,87	-8.550.379,71	34,90%	65,10%
Kec. Pringsurat	49.069.261,42	4.632.595,19	44.241.127,54	48.873.722,73	195.538,69	76,24%	23,76%
Kec. Selopampang	23.109.287,02	1.803.427,20	20.680.745,23	22.484.172,42	625.114,60	61,74%	38,26%
Kec. Temanggung	30.405.550,25	7.283.001,60	38.363.293,90	45.646.295,50	-15.240.745,25	26,64%	73,36%
Kec. Tembarak	22.179.223,58	2.766.787,20	20.369.995,52	23.136.782,71	-957.559,13	66,67%	33,33%
Kec. Tlogomulyo	21.257.300,06	2.047.507,20	13.291.918,13	15.339.425,33	5.917.874,73	85,55%	14,45%
Kec. Tretep	30.953.119,81	1.876.089,60	14.762.942,71	16.639.032,30	14.314.087,50	97,20%	2,80%
Kec. Wonoboyo	36.020.366,55	2.334.700,80	23.060.285,16	25.394.985,96	10.625.380,59	78,68%	21,32%
Grand Total	780.174.878,92	69.849.734,39	694.136.838,30	763.986.572,68	16.188.306,24	61,59%	38,41%

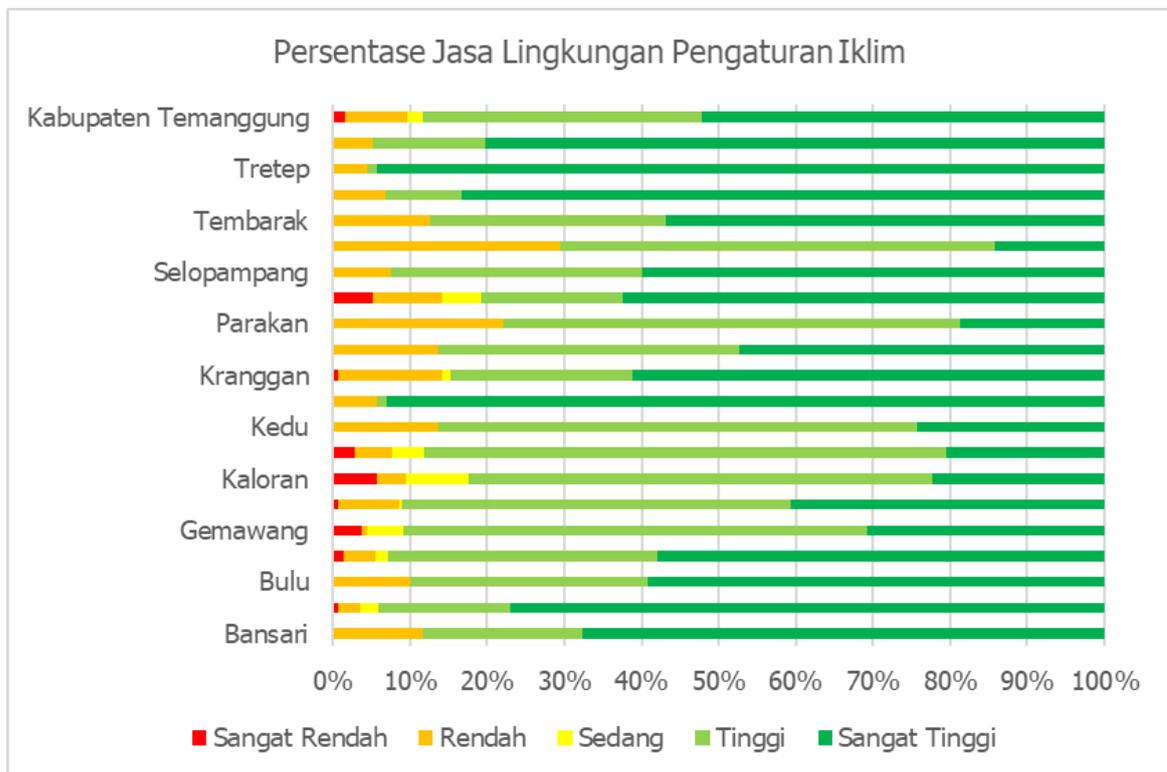
Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2024



Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2024
Gambar 2.10 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

2) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis jasa lingkungan penyedia pengaturan iklim berkaitan dengan segala perubahan dan adaptasi terhadap iklim. Jasa lingkungan hidup pengatur iklim merupakan salah satu yang penting karena memiliki manfaat sebagai informasi mengenai cuaca/iklim yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Informasi berbasis jasa lingkungan pengaturan iklim secara tidak langsung dapat memberikan informasi pengaruh kerentanan wilayah untuk mengadaptasi adanya perubahan iklim. Jasa pengaturan iklim sendiri meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dengan topografi tinggi seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca. Persentase jasa lingkungan pengatur iklim dapat dilihat pada gambar 2.11.



Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

Gambar 2.11 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim

Berdasarkan tabel 2.12 dilihat bahwa mayoritas wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan pengatur dengan kelas sangat tinggi. Luas wilayah dengan kelas penyedia jasa lingkungan sangat tinggi ialah 45.310,63 Ha sedangkan untuk kelas penyedia jasa lingkungan tinggi adalah 31339.05 Ha dengan persentase. Kecamatan dengan persentase luas wilayah penyedia jasa lingkungan sangat tinggi terbesar adalah Kecamatan Kledung dengan luas 3.860,32 Ha.

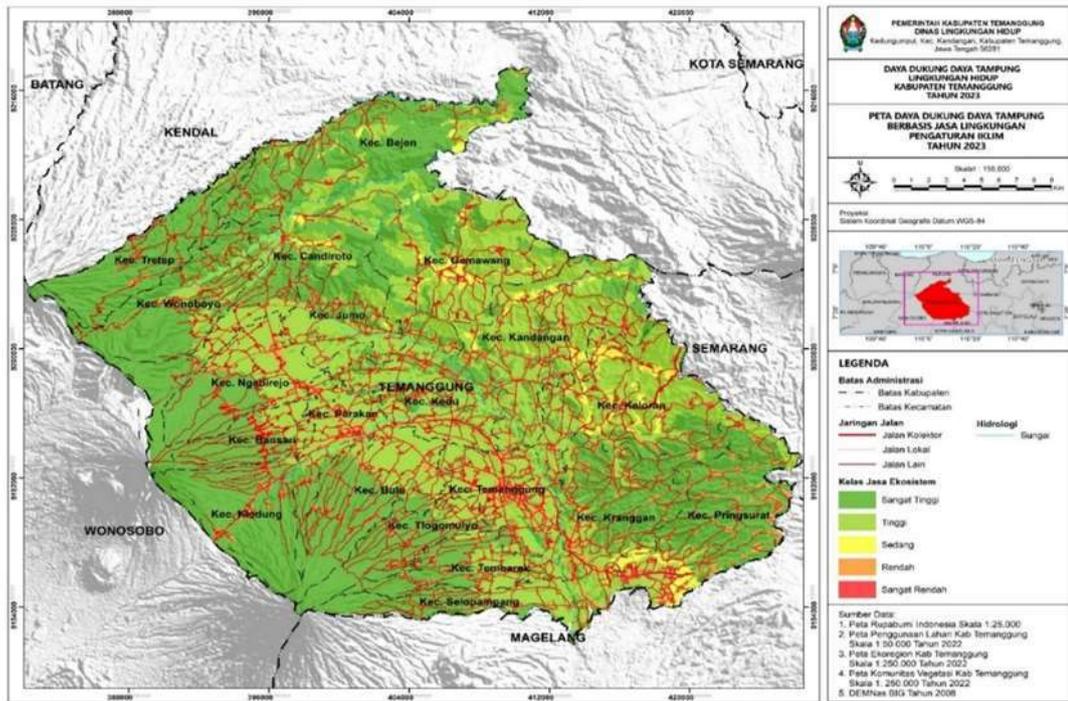
**Tabel 2.11
Luas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Tiap Kecamatan
di Kabupaten Temanggung**

Kecamatan	Distribusi Luas (Ha) Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bansari	-	239.11	-	428.53	1392.29	2059.94
Bejen	39.52	190.77	161.16	1126.83	5082.46	6600.75
Bulu	-	471.19	-	1443.65	2772.18	4687.03
Candiroto	83.07	234.90	95.66	2024.81	3356.34	5794.78
Gemawang	274.44	61.51	349.63	4539.53	2315.15	7540.26
Jumo	19.62	251.02	11.39	1573.34	1270.78	3126.15
Kaloran	363.52	248.27	516.19	3864.77	1436.07	6428.81
Kandangan	204.59	340.20	287.44	4754.19	1450.51	7036.94
Kedu	-	510.69	-	2312.51	903.45	3726.66
Kledung	-	233.49	-	56.86	3860.32	4150.67
Kranggan	32.78	705.72	58.76	1237.52	3208.50	5243.27
Ngadirejo	-	489.14	-	1396.52	1688.93	3574.58
Parakan	-	451.72	-	1209.94	381.27	2042.93
Pringsurat	305.56	543.30	302.61	1094.42	3742.37	5988.26
Selopampang	-	177.22	-	768.51	1415.09	2360.81
Temanggung	-	976.44	-	1874.60	473.80	3324.84
Tembarak	-	282.81	-	686.95	1278.34	2248.10
Tlogomulyo	-	190.08	-	271.92	2322.93	2784.94
Tretep	-	167.72	-	42.19	3513.66	3723.58

Kecamatan	Distribusi Luas (Ha) Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Wonoboyo	-	219.28	-	631.46	3446.17	4296.90
Jumlah	1323.09	6984.57	1782.85	31339.05	45310.63	86740.19

Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

Peta jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.12.

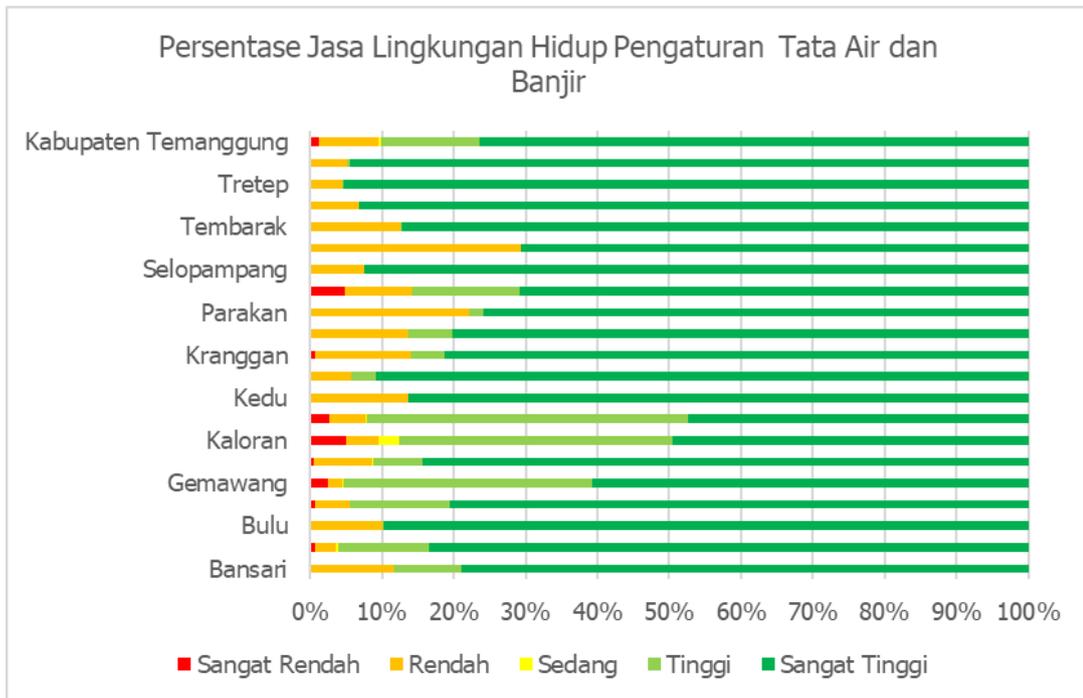


Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

Gambar 2.12 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim

3) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air dan Banjir

Jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir berkaitan dengan kemampuan ekosistem dalam pengaturan tata air meliputi penyimpanan air, pengendalian banjir, serta pemeliharaan ketersediaan air. Jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiografi wilayah serta tutupan lahan. Semakin rapat tutupan vegetasi, maka potensi pengaturan tata aliran air dan banjir akan semakin baik karena keberadaan tumbuhan dapat menjadi penyimpan cadangan air dari proses hidrologi. Selain itu, kondisi kelerengan juga menjadi penentu potensi tata aliran air dan banjir yang berkaitan dengan potensi ancaman banjir akibat arah aliran ataupun limpasan air permukaan pada gambar 2.13.



Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

Gambar 2.13 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air dan Banjir

Luas jasa lingkungan hidup pengatur tata air dan banjir tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat di lihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.12 Luas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air Banjir Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

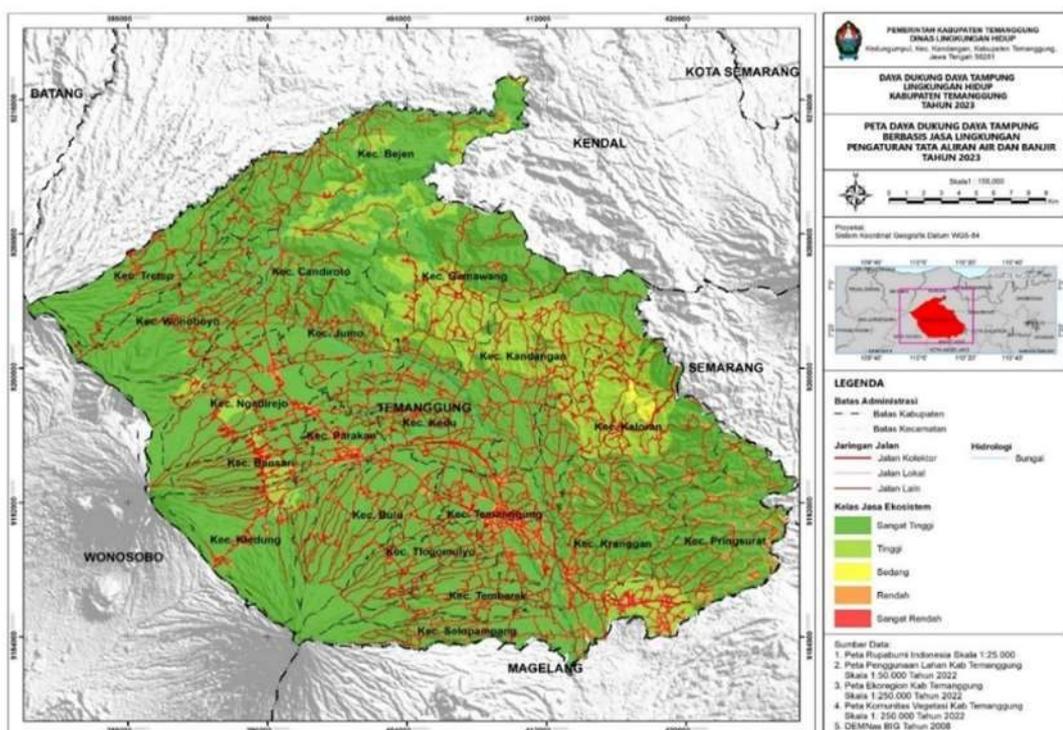
Kecamatan	Distribusi Luas (Ha) Jasa Lingkungan Pengaturan Air					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bansari		239.11		194.49	1626.34	2059.94
Bejen	39.524	190.77	32.64	829.66	5508.15	6600.75
Bulu		471.19		8.99	4206.84	4687.03
Candiroto	35.712	282.26		811.11	4665.69	5794.78
Gemawang	186.623	149.33	9.79	2616.95	4577.58	7540.26
Jumo	15.728	254.91	3.01	212.40	2640.11	3126.15
Kaloran	316.519	295.26	186.28	2450.31	3180.44	6428.81
Kandangan	184.810	359.98	3.45	3149.44	3339.26	7036.94
Kedu		510.69		0.17	3215.80	3726.66
Kledung		233.49		145.75	3771.43	4150.67
Kranggan	32.779	705.72	0.35	241.80	4262.63	5243.27
Ngadirejo		489.14		219.34	2866.11	3574.58
Parakan		451.72		41.96	1549.25	2042.93
Pringsurat	284.601	564.26	1.95	900.05	4237.41	5988.26
Selopampang		177.22		0.30	2183.29	2360.81
Temanggung		976.44			2348.40	3324.84
Tembarak		282.81		1.88	1963.41	2248.10
Tlogomulyo		190.08			2594.86	2784.94
Tretep		167.72		6.60	3549.26	3723.58
Wonoboyo		219.28		18.83	4058.79	4296.90
Jumlah	1096.296	7211.37	237.47	11850.02	66345.04	86740.19

: Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

Berdasarkan tabel 2.13 dan gambar 2.14 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan pengatur

dengan kelas tinggi dan sangat tinggi. Luas wilayah dengan kelas penyedia jasa lingkungan sedang adalah 11850.02 Ha sedangkan untuk kelas penyedia jasa lingkungan sangat tinggi adalah 66345.04 Ha. Kecamatan dengan persentase luas wilayah penyedia jasa lingkungan sangat tinggi terbesar adalah Kecamatan Candiroto. Terdapat pegunungan di Wilayah Kabupaten Temanggung yang berciri memiliki punggung bukit struktural mendukung tata aliran air dan banjir. Kerapatan vegetasi yang rendah seperti yang terlihat pada wilayah perkotaan Temanggung, luas dan tajuk yang sempit membuat volume air hujan yang ditahan tidak sebesar di kawasan hutan lindung dan juga hutan produksi. Kondisi ini membuat air hujan yang langsung masuk menuju ke tanah akan lebih besar. Potensi untuk pengaturan tata air dan banjir akan berkurang. Dataran aluvial yang sudah menjadi permukiman mempunyai potensi rendah dan sangat rendah.

Peta jasa lingkungan hidup pengatur tata air dan banjir dapat dilihat pada gambar 2.14.



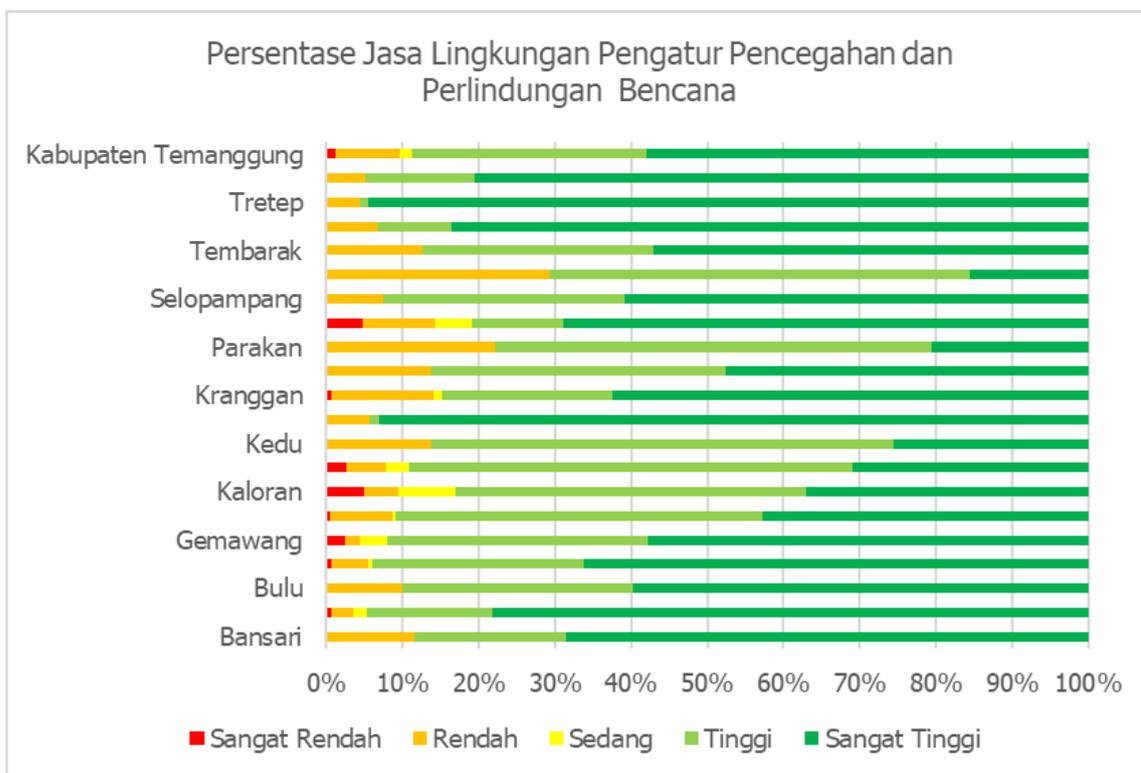
Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

Gambar 2.14 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air dan Banjir

4) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik

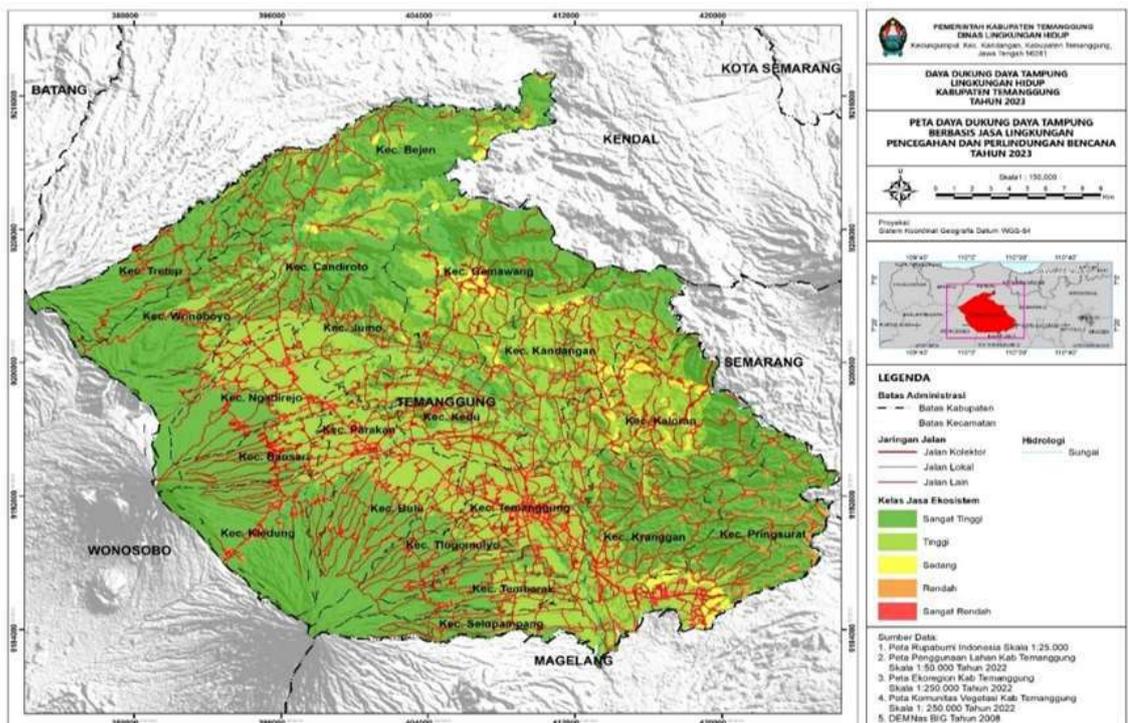
berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Bencana yang mengancam Kabupaten Temanggung antara lain tanah longsor, kekeringan, banjir dan angin puting beliung. Tabel 2.14 dan gambar 2.15 dan 2.16 di bawah menunjukkan luasan lahan, persentase dan gambaran spasial untuk Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana.



Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

Gambar 2.15 Persentase Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi jasa lingkungan yang besar untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Lahan yang berpotensi pada kelas tinggi memiliki luas wilayah 26590.73 Ha dan pada kelas sangat tinggi dengan luas 50357.65 Ha. Sedangkan persentase potensi dampak terkecil jasa lingkungan untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di kabupaten Temanggung, terdapat pada kelas sangat rendah hanya 1096.30 Ha.



Sumber: Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023
Gambar 2.16 Persentase Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Tabel Luas Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan Bencana dan Perlindungan Bencana Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.14.

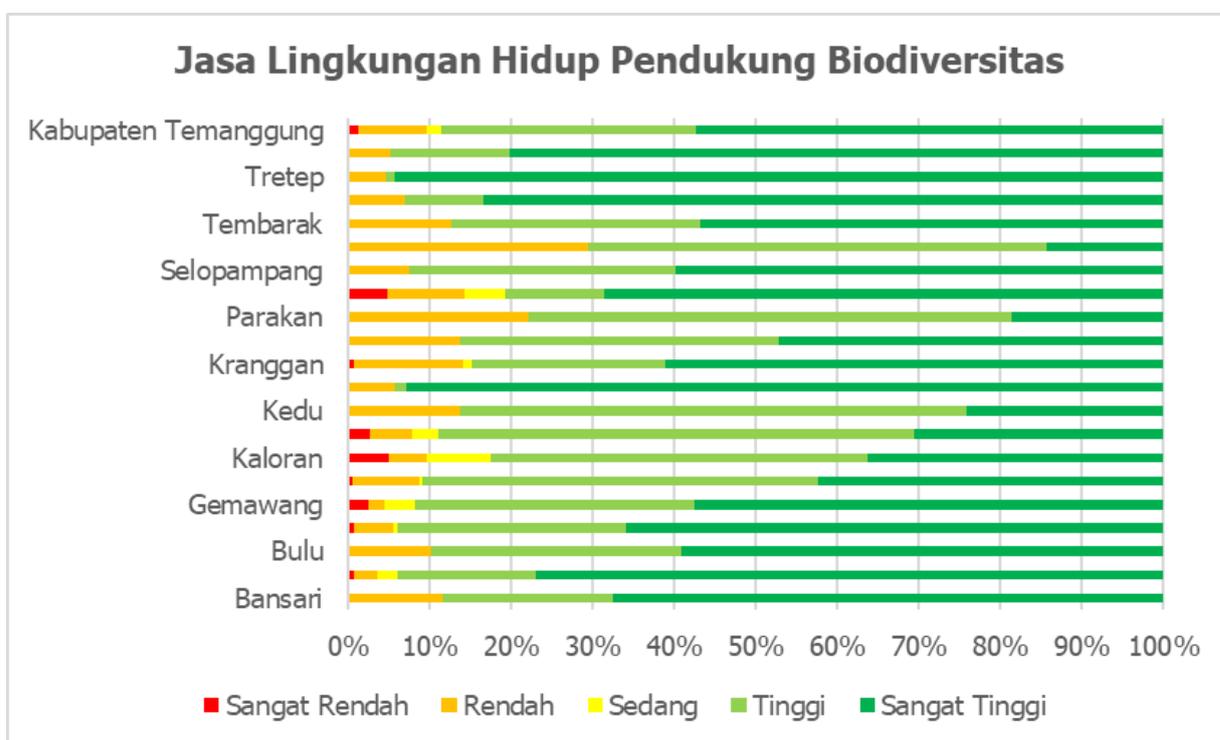
Tabel 2.13
Luas Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan Bencana dan Perlindungan Bencana Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Distribusi Luas (Ha) Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bansari	-	239.11	-	409.83	1410.99	2059.94
Bejen	39.52	190.77	119.43	1085.67	5165.35	6600.75
Bulu	-	471.19	-	1413.08	2802.76	4687.03
Candiroto	35.71	282.26	29.19	1606.78	3840.83	5794.78
Gemawang	186.62	149.33	264.18	2577.67	4362.46	7540.26
Jumo	15.73	254.91	11.30	1505.37	1338.83	3126.15
Kaloran	316.52	295.26	482.98	2954.59	2379.46	6428.81
Kandangan	184.81	359.98	225.57	4091.82	2174.77	7036.94
Kedu	-	510.69	-	2264.50	951.47	3726.66
Kledung	-	233.49	-	51.11	3866.07	4150.67
Kranggan	32.78	705.72	57.47	1169.42	3277.89	5243.27
Ngadirejo	-	489.14	-	1385.95	1699.50	3574.58
Parakan	-	451.72	-	1172.48	418.74	2042.93
Pringsurat	284.60	564.26	294.01	721.79	4123.60	5988.26
Selopampang	-	177.22	-	747.13	1436.47	2360.81
Temanggung	-	976.44	-	1829.64	518.76	3324.84
Tembarak	-	282.81	-	681.02	1284.27	2248.10
Tlogomulyo	-	190.08	-	268.18	2326.68	2784.94
Tretep	-	167.72	-	36.91	3518.94	3723.58
Wonoboyo	-	219.28	-	617.80	3459.82	4296.90
Jumlah	1096.30	7211.37	1484.15	26590.73	50357.65	86740.19

Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

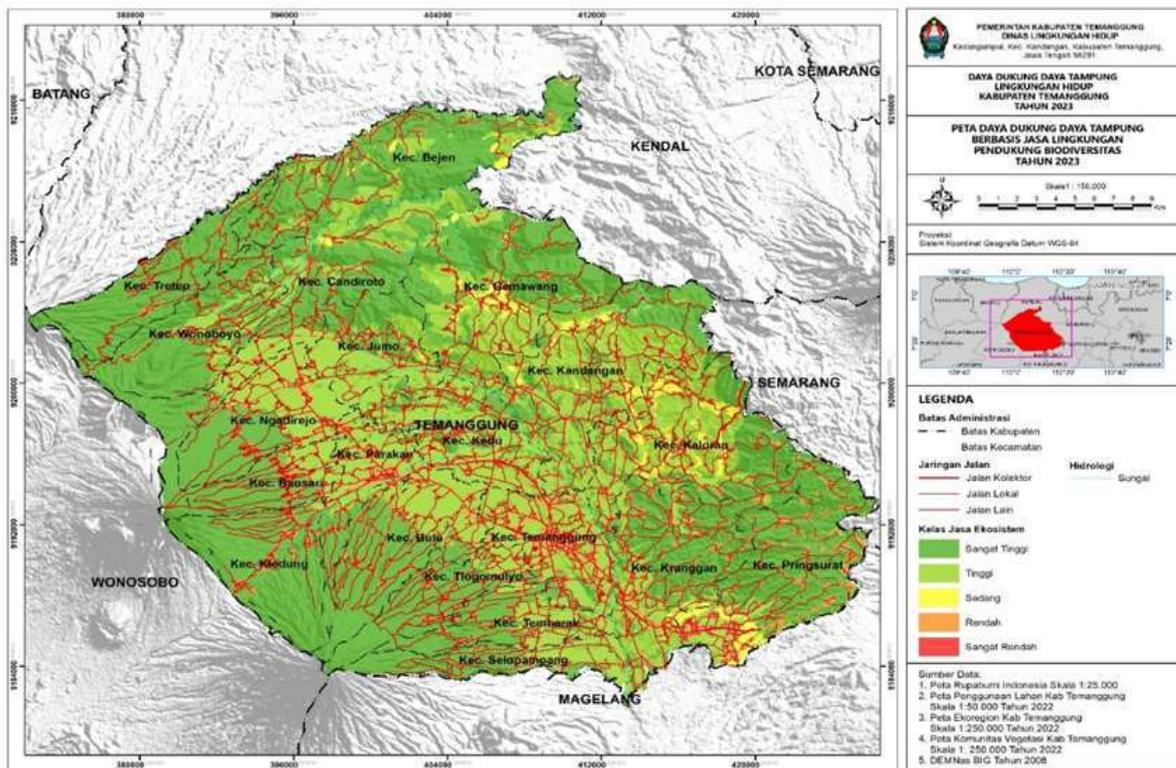
5) Jasa Lingkungan hidup Pendukung Biodiversitas

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap peri kehidupan. Keanekaragaman hayati lokal di Temanggung seperti ikan uceng atau tembakau srinthil merupakan salah satu bentuk kelestarian biodiversitas masih terjaga dengan baik. Kelestarian kondisi alam akan menjaga daya dukung untuk habitat flora dan fauna tersebut. Mengingat dua flora fauna tersebut dijadikan komoditas ekonomi oleh masyarakat Temanggung sampai saat ini. Tabel 2.15, gambar 2.17 dan 2.18 menunjukkan luasan lahan, persentase dan gambaran spasial untuk jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas.



Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

Gambar 2.17 Presentase Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiveritas



Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

Gambar 2.18 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiveritas

Jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas. tiap kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.14
Luas Jasa Lingkungan Hidup Biodiversitas Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Distribusi Luas (Ha) Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Biodiversitas					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bansari	-	239.11	-	428.53	1392.29	2059.94
Bejen	39.52	190.77	161.16	1126.83	5082.46	6600.75
Bulu	-	471.19	-	1443.65	2772.18	4687.03
Candirototo	35.71	282.26	34.09	1623.66	3819.06	5794.78
Gemawang	186.62	149.33	280.30	2582.18	4341.84	7540.26
Jumo	15.73	254.91	11.39	1522.27	1321.85	3126.15
Kaloran	316.52	295.26	510.99	2973.42	2332.62	6428.81
Kandangan	184.81	359.98	229.28	4111.01	2151.86	7036.94
Kedu	-	510.69	-	2312.51	903.45	3726.66
Kledung	-	233.49	-	56.86	3860.32	4150.67
Kranggan	32.78	705.72	58.76	1237.52	3208.50	5243.27
Ngadirejo	-	489.14	-	1396.52	1688.93	3574.58
Parakan	-	451.72	-	1209.94	381.27	2042.93
Pringsurat	284.60	564.26	298.65	734.21	4106.54	5988.26
Selopampang	-	177.22	-	768.51	1415.09	2360.81
Temanggung	-	976.44	-	1874.60	473.80	3324.84
Tembarak	-	282.81	-	686.95	1278.34	2248.10
Tlogomulyo	-	190.08	-	271.92	2322.93	2784.94
Tretep	-	167.72	-	42.19	3513.66	3723.58
Wonoboyo	-	219.28	-	631.46	3446.17	4296.90
Kabupaten Temanggung	1096.30	7211.37	1584.61	27034.75	49813.17	86740.19

Sumber : Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, DPRKPLH, 2023

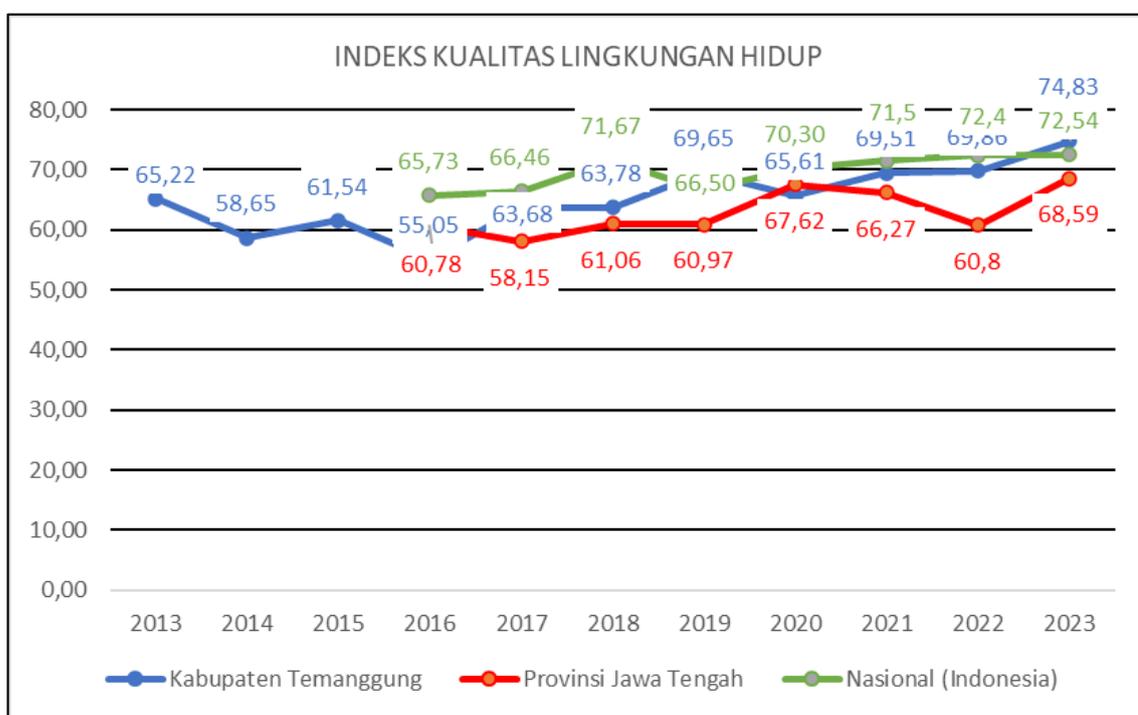
Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai jasa lingkungan pendukung biodiversitas yang besar. Lahan yang berpotensi

pada kelas tinggi memiliki luas wilayah 27.034,75 Ha dan pada kelas sangat tinggi memiliki luas wilayah 49.813,17 Ha. Sedangkan untuk Kecamatan yang memiliki wilayah jasa lingkungan pada kelas sangat tinggi dengan luasan terbesar adalah Bejen, Kaloran, Kandangan, Pringsurat dan Gemawang.

Jasa lingkungan pengatur iklim, pengatur tata air dan banjir, pengatur pencegahan dan perlindungan bencana, serta pendukung biodiversitas masih menggunakan analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan masih menggunakan data luasan lahan RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2031.

2.1.1.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2013-2022 Kabupaten Temanggung memiliki nilai indeks yang fluktuatif dengan tren yang meningkat. Pada tahun 2013 nilai indeks adalah 65,22 yang kemudian meningkat menjadi 74,83 pada Tahun 2023. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding nilai Provinsi Jawa Tengah dan juga nilai Nasional.



Sumber: Diolah dari Dokumen IKLH, Kementerian LHK Indonesia 2023

Gambar 2.19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Sedangkan capaian IKLH Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.16 :

Tabel 2.15
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	IKLH	69,65	65,61	69,51	69,86	74,83

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU	81,96	83,65	80,89	83,82	85,10
2	IKA	51,11	41,11	54,45	52,22	64,07
3	IKTL	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
Perhitungan Rumus Lama		Perhitungan Rumus Baru				
IKLH = (30% X IKA)+(30% X IKU)+(40% X IKTL)		IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKTL)				

Sumber : Data Pokok DPLKPLH, 2023

Keterangan satuan IKA dan IKU (angka), IKTL (%)

Tabel 2.16
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Tahun	Kabupaten /Kota	Penduduk	Luas Wilayah (KM ²)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
1	2019	Temanggung	789.508	870,65	81,96	51,11	74,33	69,65
2	2020	Temanggung	794.055	870,65	83,65	41,11	74,33	65,61
3	2021	Temanggung	762.980	870,65	80,89	54,45	74,33	69,51
4	2022	Temanggung	801.267	870,65	83,82	52,22	74,33	69,86
5	2023	Temanggung	808.446	86.483	85.10	64,07	74,33	74,83

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.16 dapat diketahui nilai IKLH tertinggi selama rentang waktu 5 tahun yaitu 74,83 yakni Tahun 2023 dengan katagori baik. Hal ini dipengaruhi karena adanya peningkatan kualitas air maupun udara di Kabupaten Temanggung, akan tetapi masih terdapat kendala atau hambatan diantaranya hasil uji kualitas air tidak bisa langsung diketahui, melalui Pengujian di Laboratorium terlebih dahulu hingga keluar sertifikat hasil uji.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, terdapat perubahan metode perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang merupakan variabel dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sehingga hasil konversi perhitungan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 berubah dari angka 74,83 menjadi 75,12.

2.1.1.11 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Penggunaan lahan Kabupaten Temanggung didominasi oleh lahan non terbangun. Pertanian lahan kering menjadi jenis penggunaan lahan yang mendominasi 51,95% atau seluas 44.906,1 ha. Kemudian diikuti oleh sawah irigasi dengan luas mencapai 17.917 ha atau 20,73% dari keseluruhan penggunaan lahan. Sementara itu, pemukiman memiliki luas sebesar 8296,6 ha atau sebesar 9,6% dari luas keseluruhan. Adapun jika dibandingkan dengan rencana pola ruang, maka kesesuaian pemanfaatan

ruang di Kabupaten Temanggung adalah 88,40%. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding Tahun 2017 dengan 76,9%. Berdasarkan tren 5 tahun terakhir tingkat kesesuaian tersebut terus meningkat.



Sumber: Diolah dari Dokumen Materi Teknis RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 2023

Gambar 2.20

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Temanggung

Rencana pola ruang kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna mengatur pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar sektor pembangunan kota. Rencana pola pemanfaatan ruang Kabupaten Temanggung dibedakan atas ruang-ruang yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Neraca Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17

Neraca Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

No	Rencana Pola Ruang	Luasan (Ha)	Lokasi
1	Badan Air	508	Seluruh kecamatan
2	Kawasan Cagar Budaya	10	Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo
3	Kawasan Hutan Produksi tetap	7.391	Kecamatan Bansari, Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kaloran, Kandangan, Ngadirejo, Tretep, dan Wonoboyo
4	Kawasan Hutan Produksi terbatas	2.973	Kecamatan Bansari, Candiroto, Gemawang, Kaloran, Kandangan,

No	Rencana Pola Ruang	Luasan (Ha)	Lokasi
			Kledung, Ngadirejo, Tretap, Wonoboyo
5	Kawasan Tanaman Pangan	17.671	Seluruh kecamatan
6	Kawasan Hortikultural	14.140	Seluruh kecamatan
7	Kawasan Perkebunan	25.871	Seluruh kecamatan
8	Kawasan Peruntukan Industri	991	Sebagian Kecamatan Kranggan dan sebagian Kecamatan Pringsurat
9	Kawasan Permukiman Perkotaan	4.026	Sebagian kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, Candiroto, Bejen, Kranggan, dan Pringsurat
10	Kawasan Permukiman Perdesaan	9.600	Seluruh kecamatan
11	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	90	Desa Gentan Kaloran dan Desa Gandon Kecamatan Kaloran
	Total	86.483	

Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 yang baru ditetapkan ini menyesuaikan beberapa peraturan-peraturan terbaru, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah Kabupaten Temanggung dengan kabupaten sekitar, sehingga luasan Kabupaten Temanggung menjadi 86.483 Ha. Hal ini mungkin akan berdampak dalam rumusan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terdapat penambahan luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang berupa luasan KKPR yang sesuai rencana tata ruang seluas 2,23 Ha. Sehingga jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang pada triwulan II Tahun 2024 adalah 77.974,6 Ha. Sehingga persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang adalah 90,16%. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang Tahun 2023-2024 dapat terlihat pada tabel 2.18.

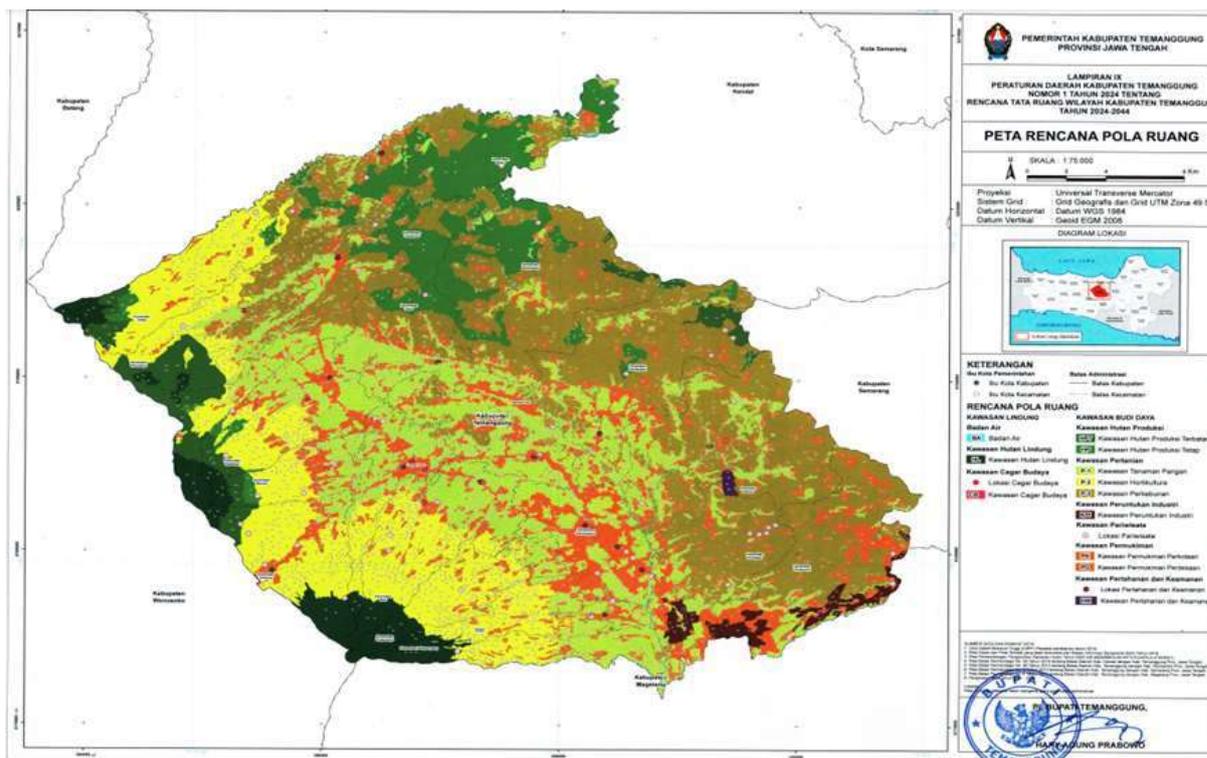
Tabel 2.18
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	77.972,37	77.974,60
2	Jumlah luasan wilayah kabupaten Temanggung	87.065	86.483
3	Persentase %	89,56%	90,16%
4	Capaian kinerja s.d. triwulan I	100%	100%

Sumber: Data Pokok DPUPR, 2024

Ada perbedaan luas wilayah pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, Dimana pada Tahun 2024 luas wilayah sudah disesuaikan dengan Perda RTRW Tahun 2023-2044 dengan luas wilayah 86.483 Ha.

Peta pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 dapat dilihat pada gambar berikut.



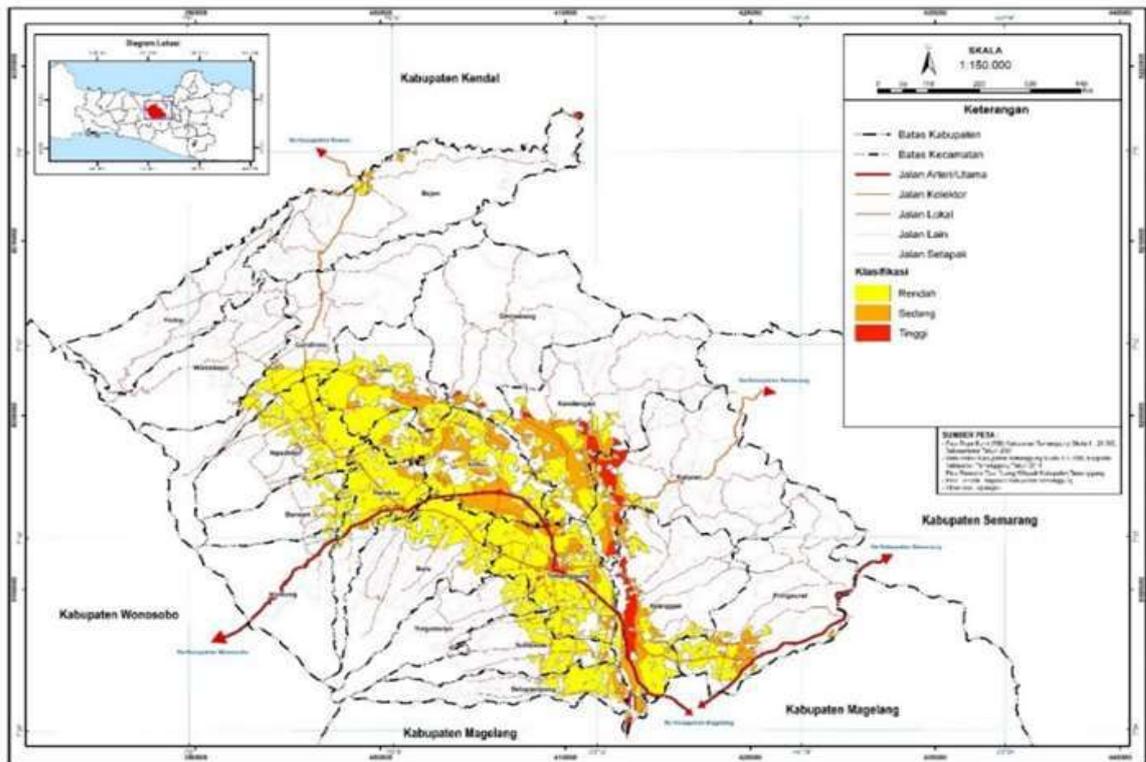
Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.21

Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2044

2.1.1.12 Kebencanaan

Bencana alam di Kabupaten Temanggung terdiri dari Rawan Cagar Bencana Longsor, Angin Topan, Banjir, Kekeringan, Gerakan Tanah. Bencana Alam tersebar di 217 desa rawan bencana di berbagai Kecamatan yang sudah direka dalam Kejadian Bencana Tahun 2021 di Kabupaten Temanggung. Berikut merupakan beberapa bencana yang ada di Kabupaten Temanggung:

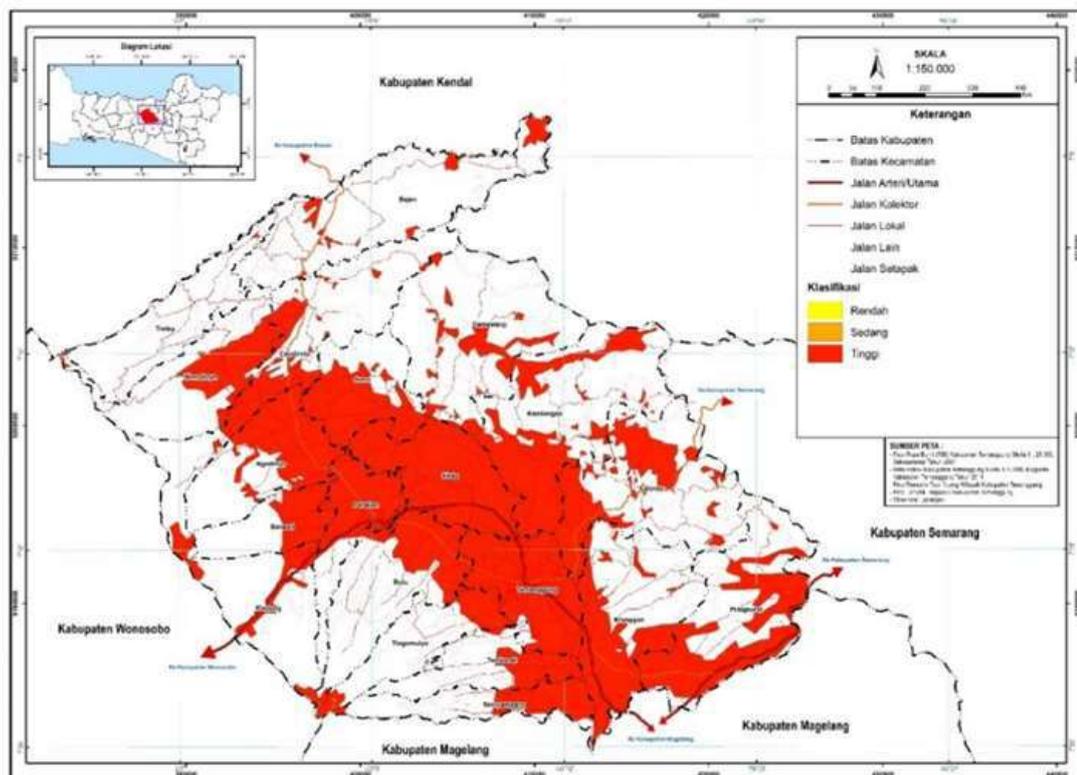


Data diolah dari Dokumen Fakta Analisa RTRW Kabupaten Temanggung

Gambar 2.22

Peta Rawan Bencana Banjir Sungai Kabupaten Temanggung

Klasifikasi rawan banjir di Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 3 yaitu klasifikasi rendah, sedang dan tinggi. Adapun klasifikasi rendah yang berwarna kuning merupakan kawasan yang mempunyai tingkat rawan bencana banjir yang rendah yang mendominasi di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain itu masih terdapat juga daerah dengan klasifikasi tinggi dan sedang yang mayoritas berlokasi di kawasan perkotaan.

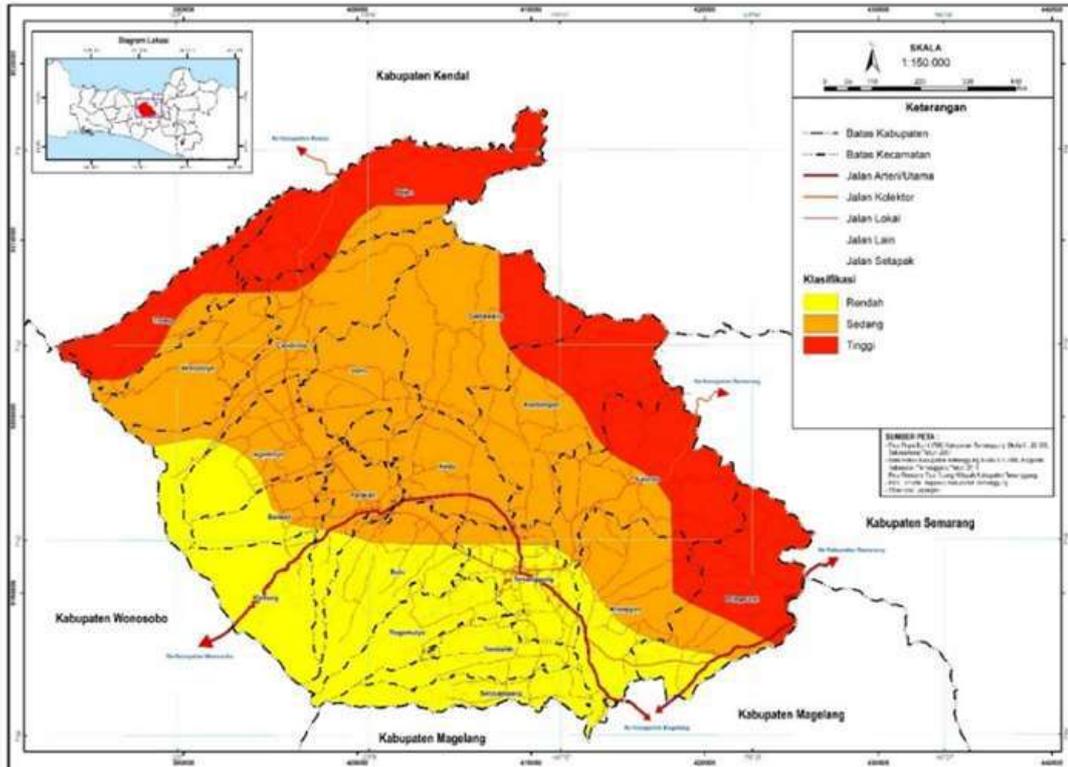


Data diolah dari Dokumen Fakta Analisa RTRW Kabupaten Temanggung

Gambar 2.24

Peta Rawan Bencana Angin Topan Kabupaten Temanggung

Klasifikasi rawan bencana angin topan di Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 3 yaitu rendah, sedang, tinggi. Namun Kabupaten Temanggung memiliki tingkat rawan bencana angin topan yang tergolong tinggi.

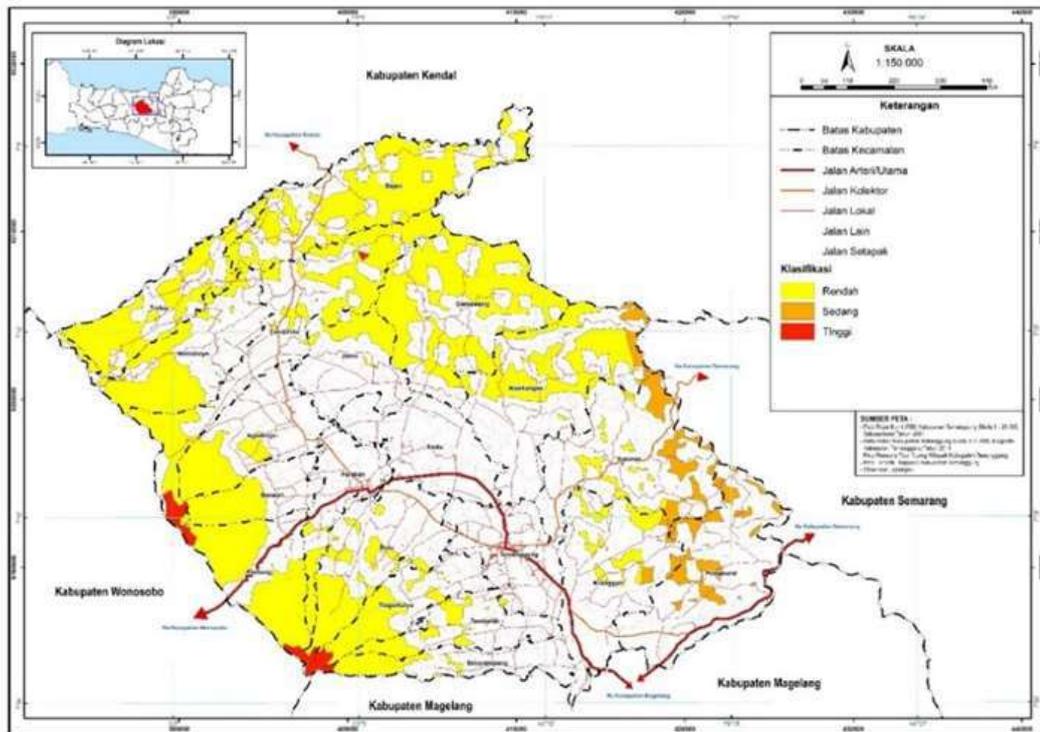


Data diolah dari Dokumen Fakta Analisa RTRW Kabupaten Temanggung

Gambar 2.25

Peta Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Temanggung

Klasifikasi rawan bencana kekeringan di Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 3 klasifikasi yakni rendah, sedang, dan tinggi. Wilayah Kabupaten Temanggung rata-rata memiliki tingkat rawan bencana kekeringan dalam kategori sedang. Daerah yang memiliki tingkat rawan bencana kekeringan tinggi yakni Kecamatan Tretep, Kecamatan Bejen, dan Kecamatan Pringsurat.

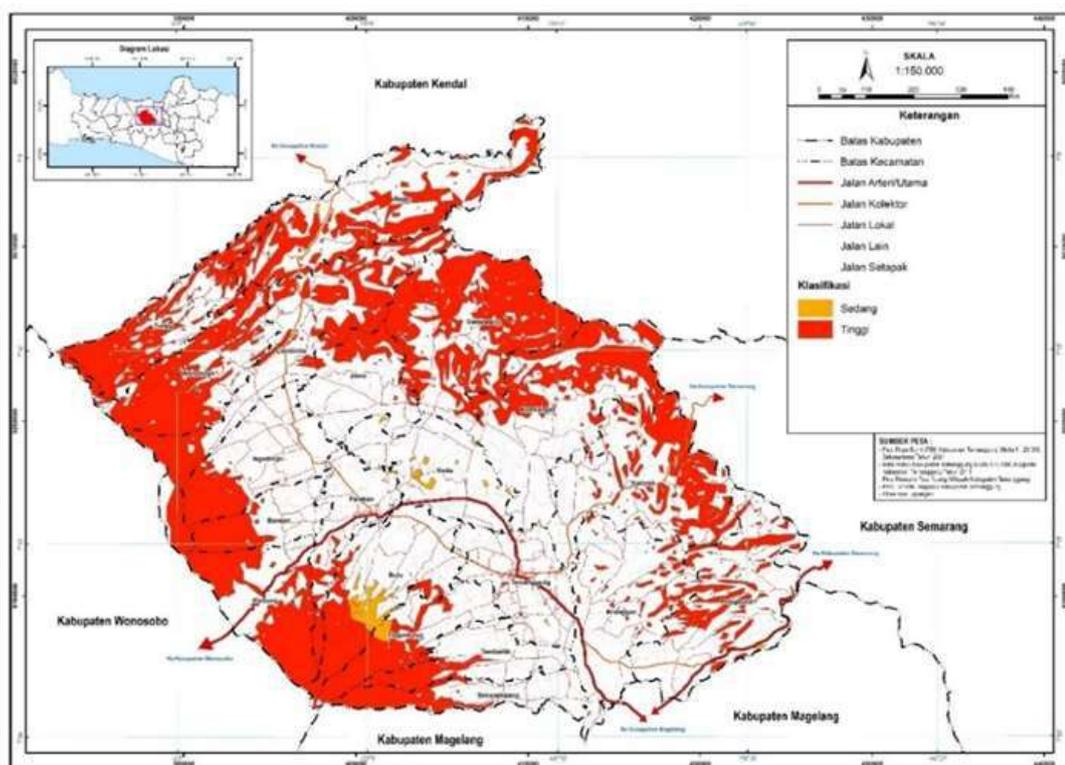


Data diolah dari Dokumen Fakta Analisa RTRW Kabupaten Temanggung

Gambar 2.26

Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan Kabupaten Temanggung

Klasifikasi rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Wilayah Kabupaten Temanggung rata-rata memiliki tingkat kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan yang rendah. Hal tersebut karena Kabupaten Temanggung tidak memiliki lahan gambut.



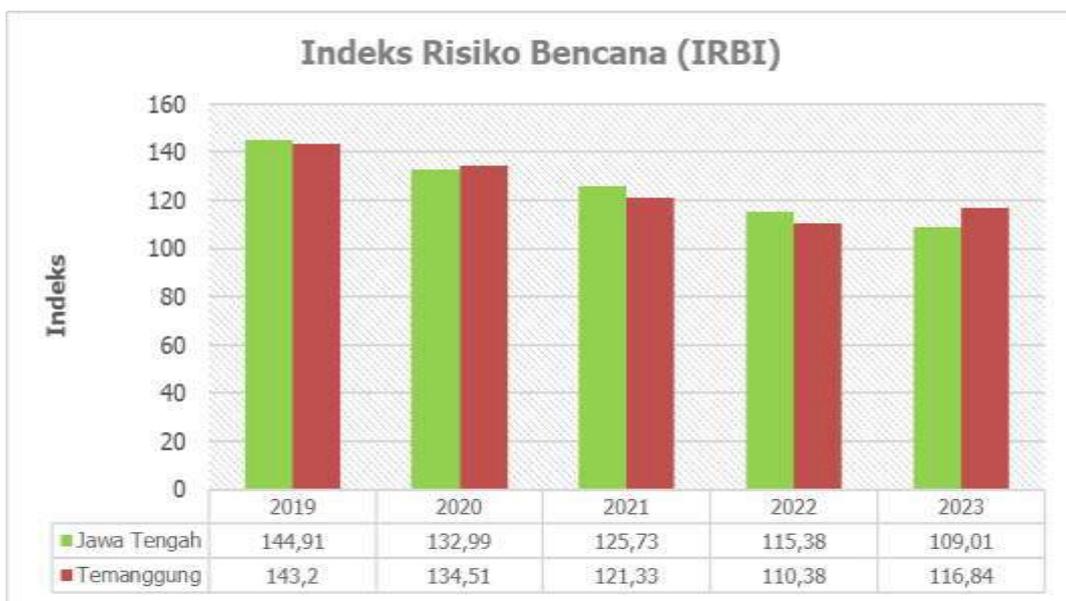
Data diolah dari Dokumen Fakta Analisa RTRW Kabupaten Temanggung

Gambar 2.27 Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Temanggung

Klasifikasi rawan bencana longsor di Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 2 klasifikasi yaitu sedang dan tinggi. Rata-rata wilayah Kabupaten

Temanggung memiliki tingkat kerawanan bencana longsor yang tinggi. Kondisi kontur dan curah hujan di Kabupaten Temanggung yang relatif tinggi merupakan penyebab tingginya tingkat kerawanan bencana longsor di Kabupaten Temanggung.

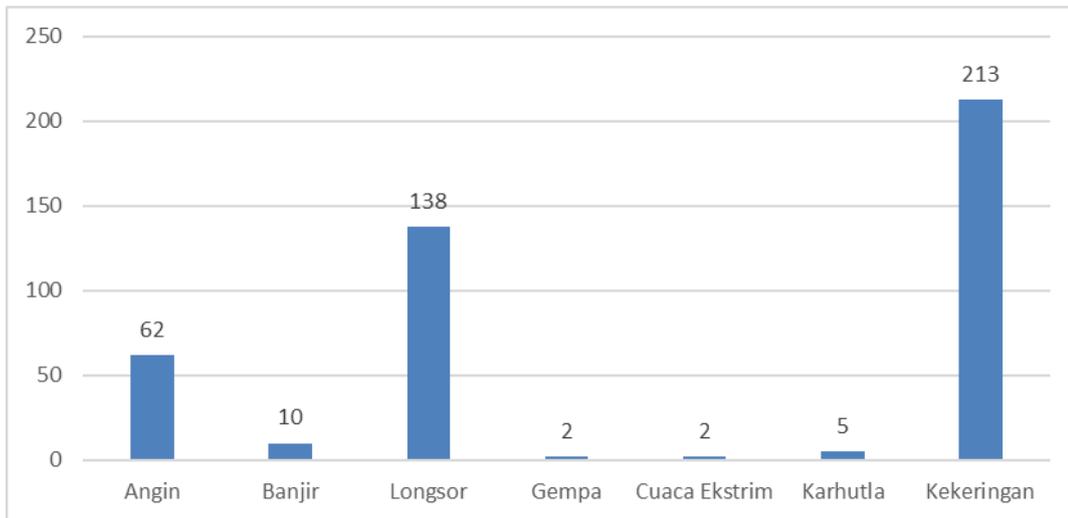
Kejadian bencana di Kabupaten Temanggung didominasi oleh 3 bencana yaitu banjir, tanah longsor dan angin puyuh. Kejadian angin puyuh di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 44 kejadian di Tahun 2019 menjadi 139 kejadian di Tahun 2022. Sementara untuk kejadian banjir dan tanah longsor sepanjang Tahun 2019-2022 jumlah kejadiannya mengalami penurunan. Adanya penurunan kejadian dan peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan bencana juga akan berpengaruh terhadap kondisi indeks risiko bencana. Dalam kurun waktu 2019-2023 IRBI di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan dari 143,2 menjadi 116,84. Akan tetapi indeks risiko bencana Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah masih berada di atasnya. Berikut ditampilkan grafik tren kejadian bencana dan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Temanggung yang bersumber dari Inarisk Tahun 2023.



Sumber : Inarisk.bnpb.go.id,2023

Gambar 2.28
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Temanggung berdasarkan Inarisk Tahun 2019-2023

Grafik jenis kejadian bencana di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.28.



Sumber : Data Pokok BPBD, 2023

Gambar 2.28
Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kebencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup utamanya adalah berupa jenis bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan kekeringan.

Pada Tahun 2023, tercatat 432 kejadian bencana di Kabupaten Temanggung. Rincian kejadian bencana di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.19:

Tabel 2.19
Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Jenis Bencana	Frekuensi Kejadian
Angin	62
Banjir	10
Longsor	138
Gempa	2
Cuaca Ekstrem	2
Karhutla	5
Kekeringan	213
Total	432

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2021-2023 Kabupaten Temanggung memiliki indeks resiko bencana tergolong Sedang. Selama rentang waktu tersebut indeks resiko bencana terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 nilai indeks adalah 143,20 dan menurun hingga 84,85 pada Tahun 2022.

2.1.1.16 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

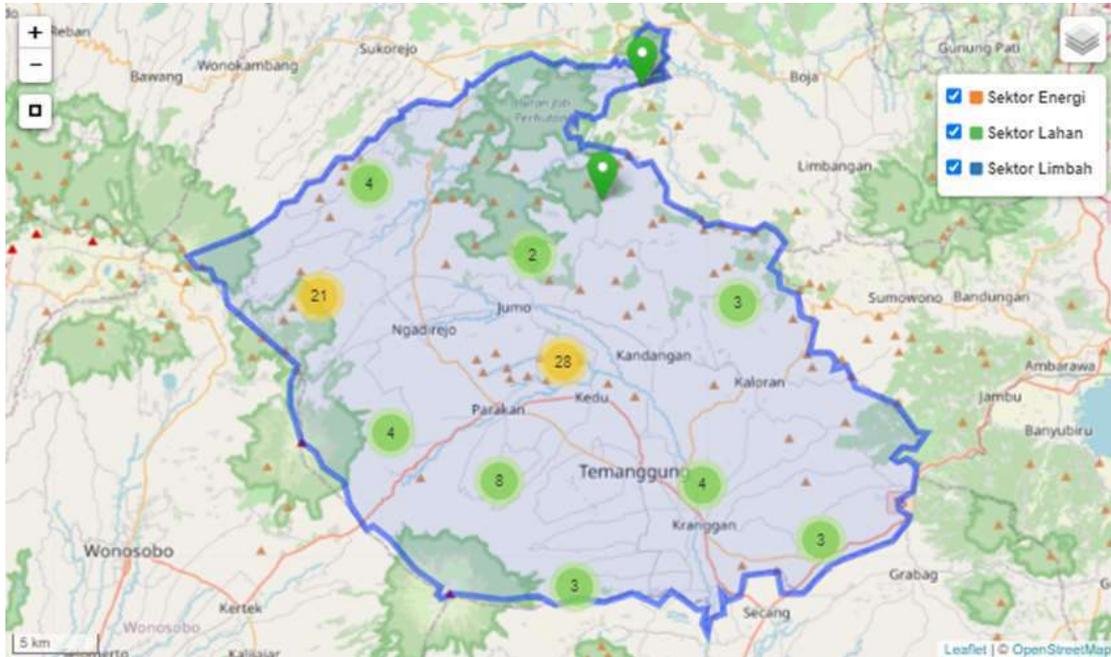
Adanya fenomena perubahan iklim secara global juga berpengaruh terhadap kondisi sumber daya alam bahkan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Fenomena pemanasan global di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Kenaikan suhu dalam kurun waktu panjang menjadi indikasi adanya perubahan iklim. Kabupaten Temanggung turut berkontribusi dalam upaya pencapaian Pembangunan Rendah Karbon. Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data yang dilaporkan pada platform AKSARA dari periode 2010-2023 menunjukkan terdapat 4 total kegiatan aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 103.314,79 Ton CO₂EQ. Total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi Kabupaten Temanggung 2010-2023 sebagai gambar berikut.



Sumber: pprk.bappenas.go.id (2023)

Gambar 2.29
Total Pencapaian Penurunan Emisi Dan Intensitas Emisi
Kabupaten Temanggung 2010-2023

Persebaran aksi Pembangunan Rendah Karbon dibagi berdasarkan sektor antara lain sektor energi, sektor lahan dan sektor limbah. Adapun sebaran aksi PRK di Kabupaten Temanggung dapat diketahui pada gambar berikut.



Sumber: pprk.bappenas.go.id (2023)

Gambar 2.31
Peta Sebaran Aksi Pembangunan Rendah Karbon
di Kabupaten Temanggung

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung mengalami kondisi fluktuatif selama dua puluh terakhir. Pada Tahun 2005 terdapat 717.486 jiwa penduduk di Kabupaten Temanggung, yang kemudian meningkat menjadi 808.446 jiwa pada Tahun 2023. Namun persentase pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung dari Tahun 2005-2023 mengalami fluktuasi. Peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 2,35% sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada Tahun 2006 sebesar 3.14%.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung
Tahun 2005-2023

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN
2005	717.486	
2006	694.949	-3,14
2007	700.845	0,85
2008	707.707	0,98
2009	714.411	0,95
2010	709.979	-0,62
2011	717.472	1,06
2012	724.810	1,02
2013	731.911	0,98
2014	738.915	0,96
2015	745.778	0,93
2016	752.486	0,90
2017	759.128	0,88
2018	765.594	0,85
2019	772.018	0,84
2020	790.174	2,35

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN
2021	794.403	0,54
2022	799.764	0,67
2023	808.446	1,09

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Temanggung Dalam Angka 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 808.446 jiwa yang terdiri dari 406.100 jiwa laki-laki dan 402.346 jiwa perempuan. Dari angka itu didapatkan *sex ratio* sebesar 100,9 persen.

Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Rasio ketergantungan pada Tahun 2023 sebesar 44,79 persen, yang artinya setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung 45 orang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	29406	28398	57.804
5-9	28740	27646	56.386
10-14	30220	28585	58.805
15-19	30536	28912	59.448
20-24	30093	28569	58.662
25-29	29708	28464	58.172
30-34	29688	29018	58.706
35-39	29047	27842	56.889
40-44	27864	27875	55.739
45-49	28929	29301	58.230
50-54	28347	28781	57.128
55-59	25808	26705	52.513
60-64	21090	21772	42.862
65-69	16673	17359	34.032
70-74	10978	11632	22.610
75+	8973	11487	20.460
Jumlah	406.100	402.346	808.446

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Temanggung Dalam Angka Tahun 2024

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Melalui RPJPD, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial harus saling terkait dan berkontribusi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki

akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, lapangan kerja yang layak, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

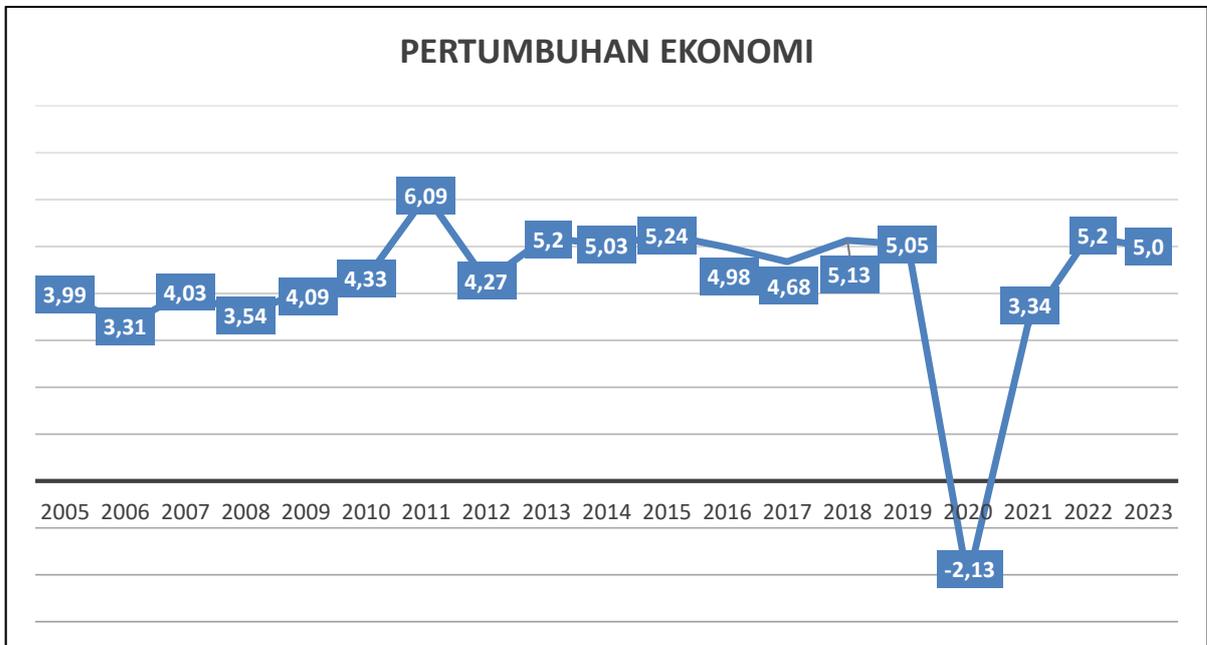
Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup bidang sosial dan ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi memuat indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia. Pada Aspek Kesejahteraan memuat indikator-indikator seperti Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTB) yang Dilestarikan, Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah, Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir, Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga), Persentase Desa Mandiri, Jumlah Kejadian Konflik SARA, Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita), Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, dan Indeks Toleransi.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Temanggung dari Tahun 2005-2023 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada Tahun 2013-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung cukup stabil meskipun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2016-2017 dan berhasil naik pada tahun berikutnya.

Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 5,05% menjadi -2,13% pada Tahun 2020. Kondisi ini berangsur membaik karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan di tahun berikutnya hingga dapat sampai ke angka 5,22% pada Tahun 2022. Namun kondisi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,0%. Secara tren, pertumbuhan ekonomi Temanggung cenderung fluktuatif dan sesuai dengan tren Jawa Tengah dan Nasional. Secara nilai tidak terdapat perbedaan signifikan antara pertumbuhan ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Nasional, Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, dan Kabupaten Temanggung dalam Angka, Tahun 2024

Gambar 2.31
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2005-2022 mengalami kondisi yang fluktuatif. Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 16,62% di Tahun 2006, yang kemudian mengalami tren penurunan sampai dengan Tahun 2012. Pada periode Tahun 2013-2022 mengalami fluktuasi dan terakhir pada Tahun 2023 menjadi 9,26%.

Adapun jika dibandingkan dengan level provinsi dan nasional, persentase kemiskinan Kabupaten Temanggung berada pada level menengah. Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, namun lebih rendah dibanding provinsi.



Sumber: BPS Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Gambar 2.33
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023

2.2.1.3 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Selain Rasio Gini, ukuran lain yang sering digunakan sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk adalah “distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia” yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

1. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%
2. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
3. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%

Berikut gambaran distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dari Tahun 2019-2023.

Tabel 2.22
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2019	-	18,39	0,05
2020	-	17,54	-0,85
2021	18,30	18,78	1,24
2022	18,50	18,46	-0,32
2023	18,70	19,52	1,06

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung termasuk kategori rendah (*low inequality*). Pada Tahun 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,52%, kondisi tersebut menurun jika dibandingkan kondisi Tahun 2022 sebesar 1846%. Perkembangan distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung menurut kriteria Bank Dunia dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 berfluktuasi dan menurun cukup tajam pada Tahun 2020, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan. Jika dibandingkan dengan target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, kondisi Tahun 2023 telah mencapai target.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2005-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Data tersebut menunjukkan pada Tahun 2007 TPT Kabupaten Temanggung sebesar 6,77% kemudian berhasil turun menjadi 3,39% Tahun 2012. Namun TPT Kabupaten Temanggung pada Tahun 2013 mengalami kenaikan hingga 4,87%, pada Tahun 2015 dan berhasil turun kembali menjadi 1,50% dan terakhir pada Tahun 2023 menjadi sebesar 2,32%.



Sumber: BPS Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Gambar 2.34
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTB) yang Dilestarikan

Pelestarian benda cagar budaya mengandung pengertian upaya-upaya dinamis yang bertujuan untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya yaitu tetap lestari, tetap utuh dari kerusakan, kehancuran, kehilangan, perubahan bentuk warna, situasi dan kondisi-kondisi lainnya yang diakibatkan ulah manusia dan juga akibat alam. Adapun batasan/kriteria pelestarian adalah dengan cara menginventarisir, mengkaji dan mendokumentasikan, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh Tim Ahli dan sudah ada penetapan. Persentase Cagar Budaya Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23
Persentase Cagar Budaya Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah CB dilestarikan	7	7	7	10	10

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.	Jumlah CB yang ada	193	193	193	193	193
	Persentase Cagar Budaya %	3.63	3.63	3.63	5.18	5,18

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan belum menunjukkan nilai maksimal indikator positif.

2.2.2.2 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya.

Jumlah pengunjung tempat bersejarah pada Situs Liyangan, Jumprit dan Candi Pringapus di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	39.753	6.214	2.400	14.160	19.477

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Pada Tahun 2019 merupakan jumlah terbanyak pengunjung, akan tetapi pada pandemi Covid jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis, baru di Tahun 2022 dan Tahun 2023 jumlah pengunjung mulai meningkat kembali.

2.2.2.3 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir

Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian.

Tercatat kelompok seni di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebanyak 2.507 kelompok seni yang teregister. Banyaknya kelompok kesenian yang mengadakan pertunjukan dalam 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25
Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kelompok Kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 thn terakhir	%	45,16	18,68	28,98	31,71	41,99

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Persentase Kelompok Kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir yaitu 2019-2023 dengan capaian yang fluktuatif, paling rendah pada Tahun 2020 dikarena adanya pandemi covid-19, pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 capaian kembali naik.

2.2.2.4 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah tamu wisatawan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagai tabel 2.26.

Tabel 2.26
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	104	40	0	56	50

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Melihat data Jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir mengalami penurunan, terlihat di Tahun 2020-2021 penurunan hampir tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung di wisata Kabupaten Temanggung dikarenakan adanya pandemi covid-19. Selanjutnya di Tahun 2022 dan Tahun 2023 kondisi mulai pulih tapi belum menunjukkan angka yang bagus, hal ini bisa terjadi karena faktor pengalaman, kepercayaan dan kepuasan wisatawan terhadap niat berkunjung kembali di tempat wisata Temanggung.

2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender

Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengadopsi penghitungan *Gender Inequality Index* (GII) dari United Nations Development Programme (UNDP) dengan beberapa penyesuaian. Indikator Maternal Mortality Rate (MMR) atau Angka Kematian Ibu (AKI) yang tidak tersedia secara kontinu setiap tahun didekati dengan indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF).

Penggunaan indikator MTF sebagai proksi didasari oleh pertimbangan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan indikator AKI dan tersedia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara rutin setiap tahun. Di samping itu, persalinan di fasilitas kesehatan dapat menekan risiko kematian ibu dalam melahirkan sehingga diharapkan dapat menggambarkan capaian AKI.

IKG disusun dari tiga dimensi, yaitu : dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Ketiga dimensi tersebut secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun. Sementara itu, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja semakin setara.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun) dapat dilihat pada tabel berikut.

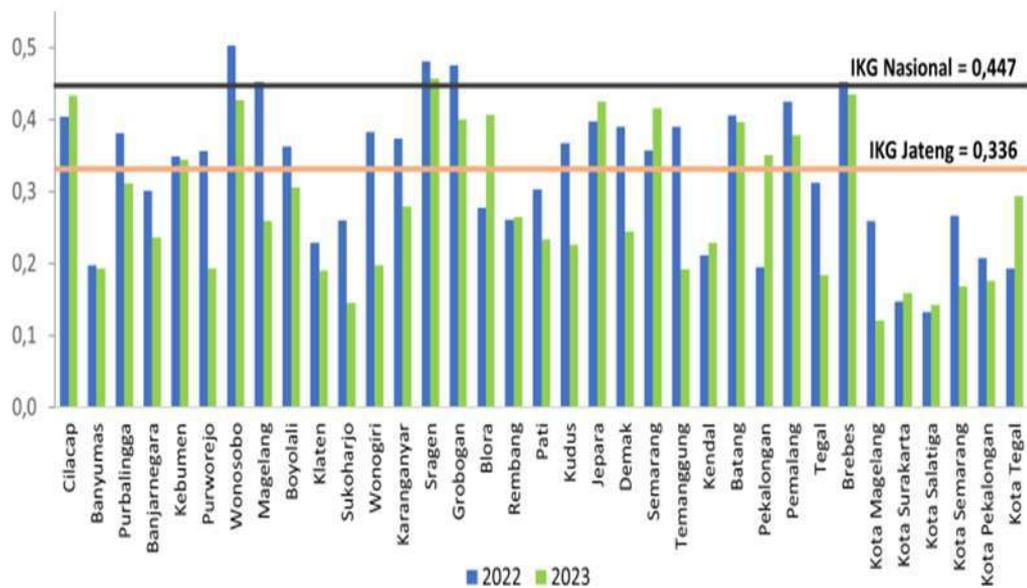
Tabel 2.27
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun) Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indek Ketimpangan Gender	0,372	0,367	0,460	0,260	0,192

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung Tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami penurunan yang artinya kabupaten Temanggung termasuk kabupaten yang mengalami perbaikan kondisi pada kesetaraan gendernya.

Pada Tahun 2023, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami perbaikan kondisi kesetaraan gender, hal ini ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka IKG di beberapa kabupaten/kota. Dari total 35 kabupaten/kota di Jawa tengah, terdapat 25 kabupaten/kota yang mengalami penurunan nilai IKG, dapat dilihat dengan gambar 2.34.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.34
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022-2023

Pada Tahun 2023, Ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Magelang (0,121), diikuti Kota Salatiga (0,143), Sukoharjo (0,145), Kota Surakarta (0,159), dan Kota Semarang (0,168). Sementara itu, dari 25 kabupaten/kota yang mengalami penurunan nilai IKG, Temanggung menjadi wilayah dengan penurunan nilai IKG tertinggi di Jawa Tengah pada Tahun 2023, yaitu sebesar 0,198 poin. Penurunan IKG di Temanggung terutama didorong oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Sedangkan, nilai IKG tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2023 dicapai oleh Sragen (0,457), Brebes (0,435), Cilacap (0,433), Wonosobo (0,427), dan Jepara (0,425). Dan peningkatan nilai IKG tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pekalongan, dengan kenaikan IKG sebesar 0,156 poin. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh penurunan dimensi pasar tenaga kerja. Pada Tahun 2022, TPAK perempuan di Kabupaten Pekalongan sebesar 58,01 persen, mengalami penurunan menjadi 56,27 persen di Tahun 2023.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangsa)

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga tersebut, yaitu dengan Indeks Pembangunan Keluarga atau I Bangsa. Penghitungan terhadap Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangsa) Kabupaten Temanggung dilakukan oleh

BKKBN mulai Tahun 2022 yaitu sebesar 55,97 dan naik menjadi 58,19 pada Tahun 2023.

Adapun Indeks Pembangunan Keluarga adalah: pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh IBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga.

Indeks Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 VarLabel, 3 dimensi yang ditentukan mencakup :

1. Dimensi Ketentraman
2. Dimensi Kemandirian
3. Dimensi Kebahagiaan

Indeks Pembangunan Keluarga / i Bangsa menggunakan hasil pemutahiran PK-23, dilakukan oleh BKKBN. Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 yaitu 62,06 lebih baik jika dibandingkan capaian pada Tahun 2022 sebesar 58,49.

Nilai 3 dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Ketentraman, dengan nilai : 60,18
2. Dimensi Kemandirian, dengan nilai : 55,56
3. Dimensi Kebahagiaan, dengan nilai : 70,50

2.2.2.7 Persentase Desa Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.28:

Tabel 2.28
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri Tahun 2023

No	Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Mandiri	0	10	15	26	55
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266
	Persentase	0	3,76	5,63	9,77	20,68

Sumber data: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa data IDM pada Tahun 2023 ini ada kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Data hasil capaian Status perkembangan desa ini diperoleh berdasarkan Berita Acara Penetapan Status Desa yang ditanda tangani oleh verifikator pada tanggal 24 Juni 2024.

2.2.2.8 Jumlah Kejadian Konflik SARA

Konflik adalah perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Bidang Kesatuan Bangsa, Bankesbangpol 2024). Dalam penanganan konflik di masyarakat perlu diwaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi, serta munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau benturan suku agama dan ras.

Tabel 2.29
Persentase Tertanganinya Konflik di Masyarakat
Tahun 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah konflik di masyarakat yang tertangani	5	2	1	0	8
2	Jumlah konflik di masyarakat keseluruhan	5	2	1	0	8
3	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber data: Bankesbangpol Kabupaten Temanggung, 2024

Pada Tahun 2023 ada jumlah konflik di masyarakat yang telah tertangani. Faktor pendorong tercapainya indikator persentase tertanganinya konflik di masyarakat adalah adanya sinergitas tim kewaspadaan dini daerah untuk pengawasan sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat.

2.2.2.9 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO Tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku

antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0.

Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik diantaranya praktek pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif di enam bulan pertama usia bayi, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat. Prevalensi Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Prevalensi Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	CAPAIAN STUNTING	Sumber
		Balita 0-59 bulan	
1	2019	25,79	SSGBI
2	2020	30,00	SDGs
3	2021	20,50	SSGBSI
4	2022	28,9	SSGI
5	2023	25,1	SKI

Sumber : SSGBI,SDGs,SSGBSI,SSGI dan SKI

Prevalensi stunting balita di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif, pada Tahun 2020 berdasarkan perhitungan SDGs jumlah balita stunting tercatat terbanyak, turun kembali di Tahun 2023 atas penilaian dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

2.2.2.10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.31:

Tabel 2.31
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019-2023

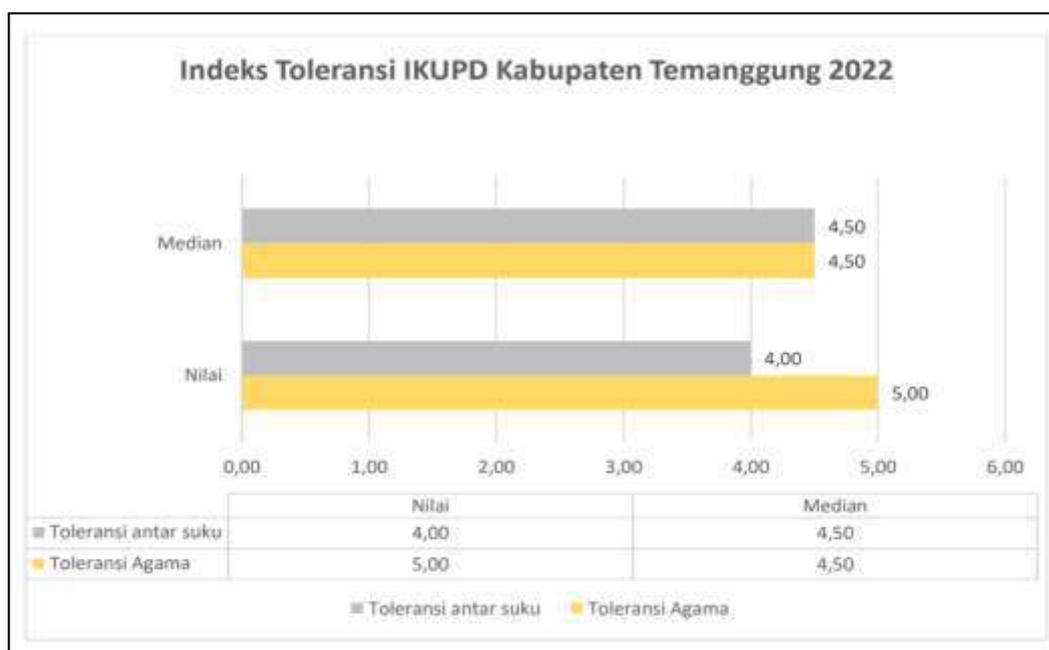
NO	TAHUN	Jumlah Penduduk	Peserta JKN	Cakupan Peserta JKN (%)
1	2019	789508	602003	76,25
2	2020	794055	618109	77,84
2	2021	800276	629031	78,60
3	2022	801267	649683	81,08
4	2023	807440	770629	95,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung , 2023

Pada Tahun 2023 capaian cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan nasional tertinggi jika dibandingkan 5 tahun terakhir yang artinya bahwa menunjukkan sebagian besar penduduk memiliki akses pelayanan kesehatan yang baik, dan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan.

2.2.2.11 Indeks Toleransi

Indeks Toleransi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 memiliki nilai 4,5 (Kategori Sangat Baik). Adapun Variabel Toleransi Antar Agama telah mencapai nilai maksimal (5), dan variabel Toleransi Antar Suku termasuk kategori Baik. Masing-masing variabel tersebut ditunjang oleh 2 sub variabel yaitu terkait toleransi dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari kesatuan masyarakat serta toleransi ketika agama/suku lain melaksanakan kegiatan keagamaannya. Latar belakang agama di Kabupaten Temanggung yang cukup heterogen dapat ditunjang dengan toleransi masyarakat yang cukup tinggi. Sementara homogenitas suku di Kabupaten Temanggung menyebabkan masyarakat belum memiliki banyak pengalaman dalam berinteraksi dengan suku lainnya walaupun tetap akan bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan yang akan dilakukan. Berikut adalah gambar capaian Indeks Toleransi Kabupaten Temanggung Tahun 2022.



Sumber: Dokumen IKUPD Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2022

Gambar 2.36

Indeks Toleransi Kabupaten Temanggung Tahun 2022

2.2.2.12 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional

bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja (Pekerja Penerima Upah/PPU, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah/BPU yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja (Penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun). Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.32.

Tabel 2.32
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Segmen Penerima Upah	22.738	27.626	28.869	33.343	40.226
Segmen Bukan Penerima Upah	2.620	3.585	2.929	7.729	7.103
Jumlah Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan	25.358	31.211	31.798	41.072	47.329
Jumlah yang bekerja (BPS)	441.632	343.400	443.009	460.765	471.459
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	5,74	9,09	7,18	8,91	10,04

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2023

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung meningkat dari Tahun 2022 sebesar 8,91% menjadi 10,04% pada Tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepedulian masyarakat terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

2.3 ASPEK DAYA SAING

Pada gambaran umum daya saing RPJPD, terdapat 4 bidang daya saing yaitu daya saing ekonomi, daya saing sumber daya manusia, daya saing infrastruktur dan daya saing investasi. Daya saing ekonomi daerah menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan yang dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, Rasio PDRB Industri Pengolahan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB), Disperitas Harga, Rasio Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB, Rasio Kewirausahaan Daerah, Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB, Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah, Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik

Kabupaten per PDRB, Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB, Return on Asset (RoA) BUMD, dan Kapabilitas Inovasi.

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang dilengkapi dengan indikator indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun, Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan, Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

Daya Saing Infrastruktur merupakan menunjang percepatan pembangunan dan kegiatan perekonomian yang didukung dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Huni, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantab, Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten, dan Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Adapun daya saing iklim investasi menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah yang dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah, Realisasi Investasi, Indeks Rasa Aman, dan Indeks Kemudahan Berusaha

2.3.1 Daya Saing Ekonomi

Daya saing ekonomi ini selain untuk mencapai target kabupaten juga seiring sejalan dengan pencapaian target-target pemerintah provinsi maupun pusat. Antara lain dalam mendukung ketercapaian target ekonomi hijau, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berinisiatif dalam berbagai kebijakan yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan poin-poin antara lain: Pembangunan infrastruktur hijau, seperti membangun dan memelihara taman kota, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau; Pengelolaan sampah, seperti edukasi pilah sampah masyarakat, mengurangi penggunaan plastic sekali pakai dalam mempromosikan alternatif yang ramah lingkungan

seperti gerakan pengurangan penggunaan plastik pada saat Hari Raya Idul Adha dengan menggunakan wadah besek dari bambu; dan pertanian berkelanjutan, dengan mendorong praktek pertanian yang ramah lingkungan seperti pertanian organik. Bahkan terbukti petani kopi organik Temanggung mampu menghasilkan produksi kopi organik yang dari segi kualitas dan kuantitas tidak kalah dari non organik.

Ekonomi biru adalah kerangka kerja yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pelestarian ekosistem laut.

Selain pilar ekonomi, pilar lain yang didukung dalam ekonomi biru adalah pilar sosial melalui sub sektor ketenagakerjaan, kesehatan dan pendidikan. Sub sektor ketenagakerjaan mendukung melalui jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan perikanan darat. Dalam rentan waktu 2019-2023 memang terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di bidang perikanan darat. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pelaku usaha minapadi, dimana pada rentang Tahun 2022-2023 ada serangan hama burung pada kegiatan minapadi di sawah. Akibatnya banyak petani yang mulai meninggalkan kegiatan minapadi. Selain itu faktor lain dari penurunan tenaga kerja pada usaha perikanan adalah karena penurunan siklus usaha budidaya dan atau berhentinya usaha budidaya perikanan dikarenakan tingginya harga pakan ikan pabrikan yang merupakan komponen utama dalam budidaya. Meskipun demikian, kegiatan budidaya ikan di kolam air tenang masih tetap dilaksanakan. Selain kegiatan budidaya, adapula kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Temanggung. Perikanan tangkap di Kabupaten Temanggung dilaksanakan di perairan umum. Kegiatan ini juga mampu menarik tenaga kerja, meskipun juga terjadi penurunan jumlah pelaku perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan hasil tangkapan ikan di perairan umum juga mengalami penurunan akibat penurunan hasil tangkap, dikarenakan adanya predator ikan palung yang memangsa ikan-ikan endemik yang biasanya ditangkap oleh nelayan perairan umum.

Sub Sektor Kesehatan dan Pendidikan juga merupakan pendukung pilar ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Pendukung dari Sub Sektor Kesehatan adalah adanya kenaikan Rata-Rata Konsumsi Ikan per Kapita di Kabupaten Temanggung. Dalam rentang 2019-2023, terlihat adanya kenaikan konsumsi ikan. Hal ini sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang mampu mendukung tumbuh kembang anak dalam menurunkan angka stunting. Selain itu protein pada ikan lebih

mudah dicerna oleh tubuh, sehingga sangat baik jika dikonsumsi pada saat pemulihan setelah sakit baik pada orang dewasa maupun lansia.

Sub Sektor Pendidikan di Kabupaten Temanggung juga merupakan pendukung pilar ekonomi. Hal ini terlihat dari adanya lulusan sekolah perikanan selama lima tahun terakhir. Lulusan sekolah perikanan ini nantinya akan mampu berkarir di bidang perikanan, baik sebagai pelaku usaha perikanan mandiri maupun mendukung ketenagakerjaan pada kegiatan usaha perikanan skala besar. Selain jumlah lulusan sekolah perikanan, indikator pendukung sub sektor pendidikan adalah jumlah peserta pelatihan perikanan. Adapun pelatihan perikanan yang dilaksanakan meliputi kegiatan budidaya maupun pengolahan perikanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan baik pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan.

Identifikasi Data Komposit Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.33
Identifikasi Data Komposit Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Pilar	Sub Sektor	Nama Indikator (Satuan)	Data Tahun					Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Ekonomi	Perikanan tangkap dan budidaya	Peran Sektor Perikanan dalam PDB (Persen)						Data BPS
2			Volume Produksi Akuakultur (ton)	12.532,54	13.419,78	13.873,97	13.873,06	13.852,32	
3	Sosial	Ketenagakerjaan	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan (orang)	14.994	14.736	14.736	13.333	10.190	
4			Jumlah Perempuan di Sektor Perikanan** (orang)	151	149	149	135	103	estimasi 0,01 dari total pelaku usaha
5			Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap (RTP)	989	991	991	991	912	
6		Kesehatan	Rata-Rata Konsumsi Ikan per Kapita (kg/kapita/th)	22,96	23,42	24,34	24,34	24,39	TKI - dasar rumus IKPD
				20,35	23,38	21,22	21,78	21,88	AKI -- dasar Susenas
7	Pendidikan	Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan (orang)	17	27	47	14	30	estimasi lulusan SMK HKTI	
8		Jumlah Peserta Pelatihan Perikanan (orang)	NA	NA	NA	NA	586	yang tercatat hanya tahun 2023	

Ekonomi biru mengacu pada pengelolaan berkelanjutan dari sumber daya laut dan perairan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

menjaga kesehatan ekosistem laut. Kabupaten Temanggung bukanlah daerah yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan laut, oleh karenanya sektor perairan sangat terbatas. Beberapa produktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor perikanan ditunjukkan oleh kontribusinya dalam PDRB. Meskipun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hingga saat ini memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan, dengan angka kontribusi sebesar 22,94% di Tahun 2023, namun ketika kita lihat kontribusi masing-masing sub sektor tersebut, kontribusi perikanan di Kabupaten Temanggung hanya berkisar tiga persen. Dalam sepuluh tahun terakhir, angka kontribusi perikanan menunjukkan tren yang meningkat, namun masih dalam kisaran yang sangat kecil, yaitu dari 2,97% di Tahun 2013 menjadi 3,53% di Tahun 2023. Sub sektor pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan selalu mendominasi di Kabupaten Temanggung dengan kisaran kontribusi diatas 93%. Kontribusi PDPB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha katagori sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada gambar 2.36.



Gambar 2.36

Kontribusi PDPB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Katagori Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013-2023

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

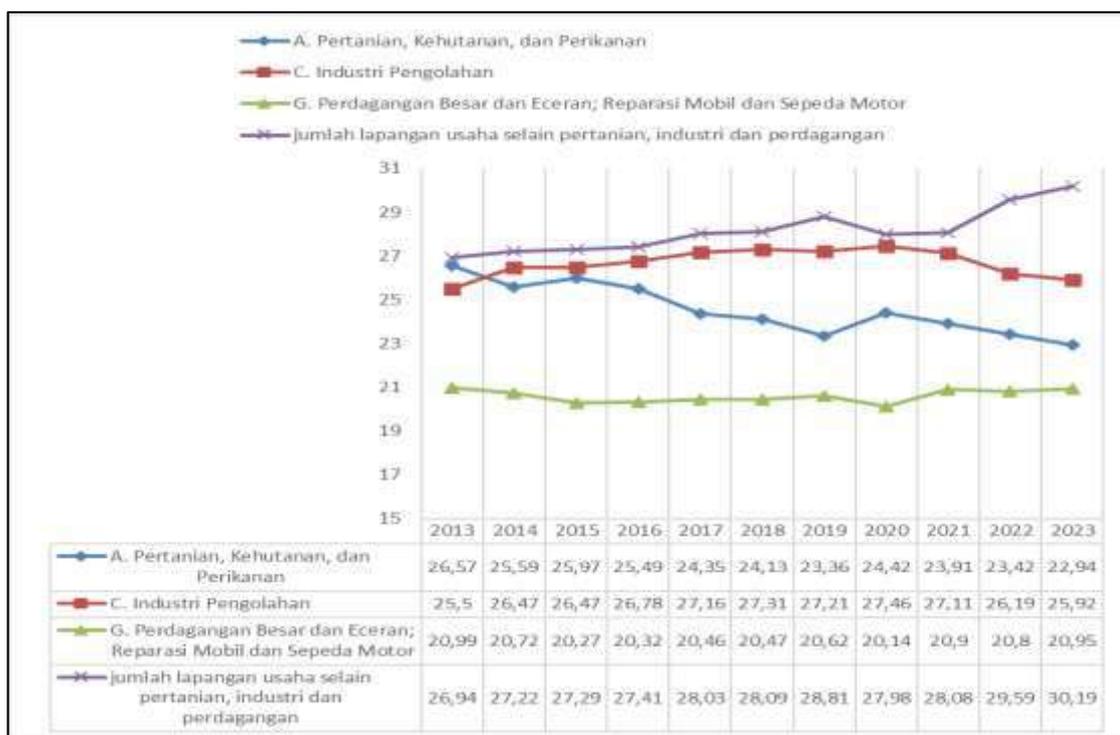
Pada Tahun 2013-2019, laju pertumbuhan sektor PDRB tertinggi yaitu sektor informasi dan komunikasi dari 7,62% pada Tahun 2013 menjadi 15,69% pada Tahun 2019, sedangkan laju pertumbuhan sektor PDRB lainnya fluktuatif. Namun pada Tahun 2020, laju pertumbuhan sektor

PDRB mengalami penurunan yang signifikan. Salah satu sektor yang mengalami penurunan paling signifikan yaitu sektor transportasi dan pergudangan hingga mencapai -30,59% yang semula laju pertumbuhannya 9,29% pada Tahun 2019. Laju pertumbuhan sektor PDRB Tahun 2021-2022 berangsur membaik dan mulai mengalami kenaikan. Namun pada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan.

Kontribusi sektor tertinggi di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2013-2023 mengalami perubahan yaitu dari sektor pertanian kehutanan, dan perikanan di Tahun 2013, namun di Tahun 2014 hingga 2023 tergeser oleh sektor industri pengolahan.

Pada Tahun 2013, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor terbesar di Kabupaten Temanggung yang berkontribusi sebesar 26,57% dari total keseluruhan PDRB. Namun kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 sektor tersebut berkontribusi sebesar 22,94%. Pada Tahun 2014-2023, sektor industri pengolahan berkontribusi paling tinggi dari total keseluruhan PDRB, di mana pada Tahun 2023 sektor ini berkontribusi sebesar 25,92%. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi dengan cenderung stabil pada kurun waktu 2013-2022, di mana Tahun 2023 sektor ini berkontribusi sebesar 20,95% dari total PDRB.

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

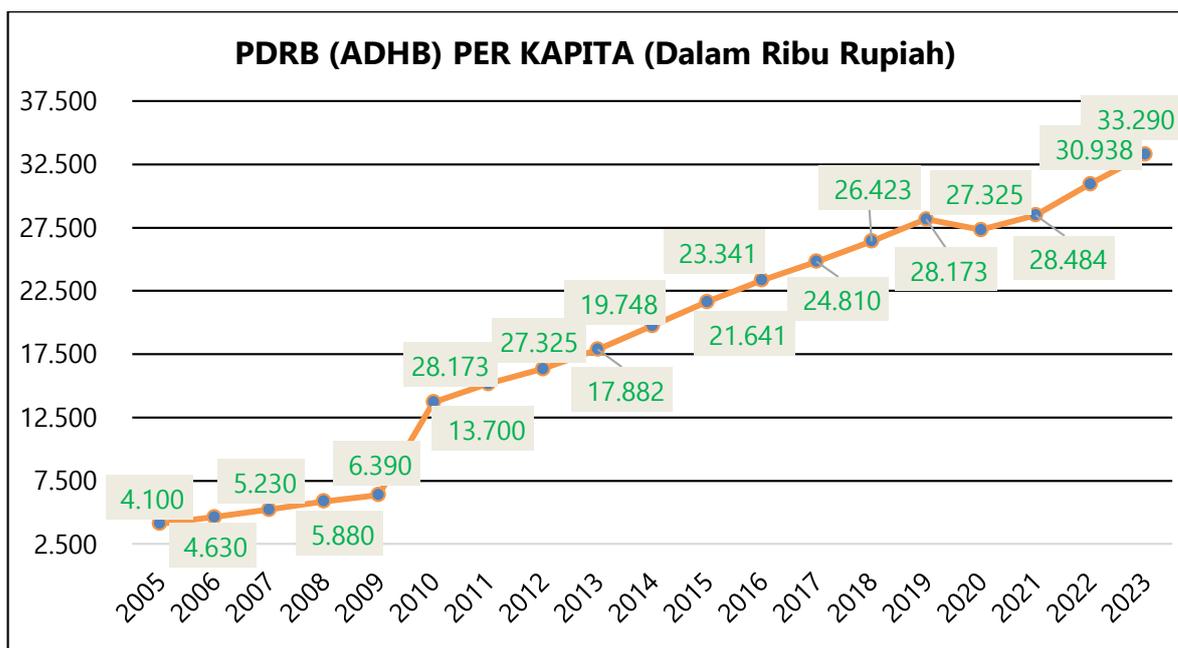


Sumber: Kabupaten Temanggung dalam Angka, 2022

Gambar 2.38 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2023

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, dalam hal ini yaitu Kabupaten Temanggung. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Temanggung mengalami kondisi yang fluktuatif dari Tahun 2005-2023, meski sempat mengalami penurunan sedikit pada Tahun 2013 namun kemudian mengalami tren kenaikan dan pada Tahun 2023 PDRB per kapita naik menjadi Rp 33.290.000.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023

Gambar 2.39
PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023

PDRB Per kapita di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat produktifitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

2.3.1.3 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.34.

Tabel 2.34
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,21	27,46	27,11	26,19	25,92

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2023.

Kontribusi Industri pengolahan kabupaten Temanggung dalam PDRB 5 tahun terakhir tren nya mengalami penurunan. Meskipun apabila dilihat nilai rielnya dalam PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih rendah dibanding laju pertumbuhan PDRB. Di Tahun 2023 ini laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan 3 tahun sebelumnya meskipun masih lebih rendah dibanding pertumbuhan sebelum covid. Artinya sektor industri pengolahan ini terus tumbuh mengejar pertumbuhan seperti sebelum terpuruk karena pandemi covid.

2.3.1.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB dimana Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan *share* PMTB terhadap PDRB.

Nilai ekonomi Kabupaten Temanggung ditinjau dari sisi konsumsi, sebagian besar digerakkan oleh semua komponen yang tumbuh positif, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumahtangga, konsumsi pemerintah, PMTB, dan net ekspor yang melampaui nilai ekonomi melebihi prapandemi atau kondisi ekonomi pada Tahun 2021 - 2023. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Temanggung Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan yang disebabkan karena semakin membaiknya kondisi ekonomi.

Terbentuknya PDRB menurut pengeluaran merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor, termasuk ekspor dan impor antar daerah.

Peran pengeluaran untuk kapital (Pembentukan Modal Tetap Bruto) pada PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Temanggung selama periode 2019-2023 menempati urutan kedua dengan kontribusinya sekitar 16,39 – 17,24 persen setelah konsumsi rumah tangga, dapat dilihat pada tabel 2.35.

Tabel 2.35
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	17,03	16,39	17,24	16,85	16,52

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2023.

Keterangan : * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

2.3.1.5 Disparitas Harga

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah, semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah. Indikator ini mulai dilakukan penghitungan di Tahun 2024, sedangkan selama kurun waktu Tahun 2019-2023 belum dilakukan penghitungan terkait disparitas harga di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Data mengenai disparitas harga diperoleh dari Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)

2.3.1.6 Rasio Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2023, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 475,63 miliar rupiah atau sebesar 1,77 persen. Sekitar 92,80 persen dari kategori tersebut merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Makan Minum dan sebesar 7,20 persen merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Akomodasi. Laju pertumbuhan kategori ini berfluktuasi dan cenderung menguat selama Tahun 2022-2023, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun di Tahun 2020 kategori ini mengalami kontraksi sebesar -6,81 persen akibat pandemi Covid-19 yang membuat mobilitas masyarakat sangat terbatas. Rasio Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2.36
Rasio Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten
Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Penyediaan akomodasi dan makan minum	PDRB ADHB	Rasio Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB
2019	350.650.000.000	2.164.899.000.000	16,20%
2020	329.870.000.000	2.155.708.000.000	15,30%
2021	356.760.000.000	2.262.779.000.000	15,77%
2022	417.890.000.000	2.472.644.000.000	16,90%
2023	475.630.000.000	2.691.232.000.000	17,67%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023

2.3.1.7 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2.37
Rasio Pajak Daerah Terhadap
PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Daerah	PDRB ADHB	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
2019	53.424.094.046	2.164.899.000.000	2,47%
2020	47.887.604.813	2.155.708.000.000	2,22%
2021	52.832.020.942	2.262.779.000.000	2,33%
2022	74.191.559.232	2.472.644.000.000	3,00%
2023	79.677.967.921	2.691.232.000.000	2,96%

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung , BPKPAD, 2023

Dalam lima tahun terakhir Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Temanggung fluktuatif, secara rata-rata sekitar 2,60%. Menurut Kementerian Keuangan, Kemenkeu dan pemerintah daerah ditargetkan bahwa rasio pajak daerah (local tax ratio) pada level 3 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto tercapai di Tahun 2022.

2.3.1.8 Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh

tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Capaian rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.38.

Tabel 2.38
Capaian Rasio Kewirausahaan Daerah Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
Berusaha dibantu buruh tetap daerah	11.835	16.579	9.208	15.100	8.482
Angkatan Kerja	423.133	455.242	357.156	454.927	472.789
Rasio Kewirausahaan Daerah	2,80	3,64	2,58	3,32	1,79

Sumber: BPS, Kabupaten Temanggung dalam Angka, 2023

Capaian Tahun 2023 merupakan capaian terendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan jumlah angkatan kerja semakin tinggi tidak diimbangi dengan orang yang berwirausaha.

2.3.1.9 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Koperasi telah memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan, pelatihan, pendidikan, dan akses pasar bagi para anggotanya.

Untuk mengetahui dinamika seberapa besar peran koperasi dan UMKM terhadap perekonomian diperlukan proksi sebuah angka yang mencerminkan perkembangannya. Karena PDRB merupakan indikator utama dalam perkembangan perekonomian suatu wilayah, maka nilai rasio kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB dapat dijadikan proksi seberapa besar peranan koperasi dan UMKM terhadap perekonomian.

Tabel 2.39
Capaian Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Volume Koperasi	PDRB ADHB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)
2019	131.590.515.332	2.164.899.000.000	6,08
2020	168.306.485.515	2.155.708.000.000	7,81
2021	212.987.946.147	2.262.779.000.000	9,41

Tahun	Volume Koperasi	PDRB ADHB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)
2022	197.272.549.686	2.472.644.000.000	7,98
2023	267.516.000.000	2.691.232.000.000	9,94

Sumber : Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2023

Capaian rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Temanggung meningkat, ada penurunan pada Tahun 2022 dikarenakan dampak Covid 19 dan perubahan ekonomi. Dalam lima tahun terakhir rasio volume Usaha koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Temanggung fluktuatif, secara rata-rata sekitar 8,24%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi kopersi terhadap perekonomian di Kabupaten Temanggung.

2.3.1.10 Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Rasio Kapasital Fiskal Daerah dihitung oleh Kementerian Keuangan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Rata-rata capaian Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah Kategori Sedang, secara rinci sebagaimana tabel 2.40:

Tabel 2.40
Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Kapasitas Fiskal	Kategori
2019	0,805	sedang
2020	0,800	sedang
2021	1,023	sedang
2022	1,597	sedang
2023	1,147	sedang

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel 2.41:

Tabel 2.41
Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019-2023

TA	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2019	278.313.775.793	1.133.246.263.266	24,56	Rendah Sekali	Instruktif
2020	307.488.084.365	1.046.567.778.773	29,38	Rendah	Konsultatif
2021	363.128.342.571	1.537.846.595.458	23,61	Rendah Sekali	Instruktif
2022	308.693.982.914	1.585.778.027.969	19,47	Rendah Sekali	Instruktif
2023	350.283.014.437	1.653.587.318.227	21,18	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-Rata	321.581.440.016	1.391.405.196.739	23,64	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung 2019-2023

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung rata-rata selama 5 (lima) tahun dari tabel tersebut hanya sebesar 23,64% atau Rendah Sekali. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer/dana perimbangan dari masih sangat besar. Hal tersebut karena masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung. Guna meningkatkan kemandirian daerah, Kabupaten Temanggung akan berupaya meningkatkan PAD melalui kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada Tahun 2025.

2.3.1.11 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kota. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Kota memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan (ADHB). Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank

Milik Kabupaten Kota/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat ada tabel 2.42.

Tabel 2.42
Total dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO.	NAMA INDIKATOR	2019 (Dalam rupiah)	2020 (Dalam rupiah)	2021 (Dalam rupiah)	2022 (Dalam rupiah)	2023 (Dalam rupiah)
1.	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten /Kota	555.853.593.199	591.402.684.705	656.752.435.036	678.104.908.875	725.873.000.549
2.	PDRB ADHB	21.648.988.070.000	21.557.077.140.000	22.627.791.480.000	24.726.442.720.000	26.912.324.210.000
3	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%)	2,57	2,74	2,90	2,74	2,69

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB dari tahun ke tahun fluktuatif, tetapi persentasenya masih kurang dari 3 % dikarena belum maksimalnya tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten Temanggung.

2.3.1.12 Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB

Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten kota memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun (ADHB). Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota / PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang

disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total kredit pada Bank milik Kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.43.

Tabel 2.43
Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO.	NAMA INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	REALISASI 2023 (Dalam rupiah)
1	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota	517.762.996.817	560.151.211.878	579.524.633.522	596.920.861.282	574.473.749.083
2	PDRB ADHB	21.648.988.070.000	21.557.077.140.000	22.627.791.480.000	24.726.442.720.000	26.912.324.210.000
3	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%)	2,39	2,60	2,56	2,41	2,13

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB dari tahun ke tahun tren menurun dikarenakan belum maksimalnya tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten Temanggung.

2.3.1.13 Return on Asset (RoA) BUMD

ROA adalah Ukuran kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. *Return On Asset (ROA)* yang baik adalah 5% atau lebih, dan bila di atas 20% maka sudah baik sekali (Zinn, 2021: Birkin, 2021). ROA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Return on Aset (ROA) BUMD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019-2023

NO.	BPR	REALISASI ROA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perumda BPR Bank Pasar Kab. Temanggung	3,32	2,60	2,49	2,45	2,52
2	PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)	3,26	2,94	2,88	3,10	3,32
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo Kab. Temanggung	9,30	9,50	12,20	11,00	10,00
4	Perumda Air Minum Tirta Agung Kab. Temanggung	8,87	11,36	10,65	11,5	10,02

NO.	BPR	REALISASI ROA				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Perumda Aneka Usaha Kab. Temanggung	2,30	1,91	-2,60	-1,58	-4,10
	Perumda Bhumi Phala Kab. Temanggung	8,60	-12,79	-0,53	-0,54	6,20
RATA-RATA TARGET ROA PER PERIODE (%)		5,94	2,59	4,18	4,32	4,66

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dapat dilihat bahwa pengelolaan investasi yang dilakukan oleh BUMD mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada Tahun 2023 sebesar 4,66%.

2.3.1.13 Kapabilitas Inovasi

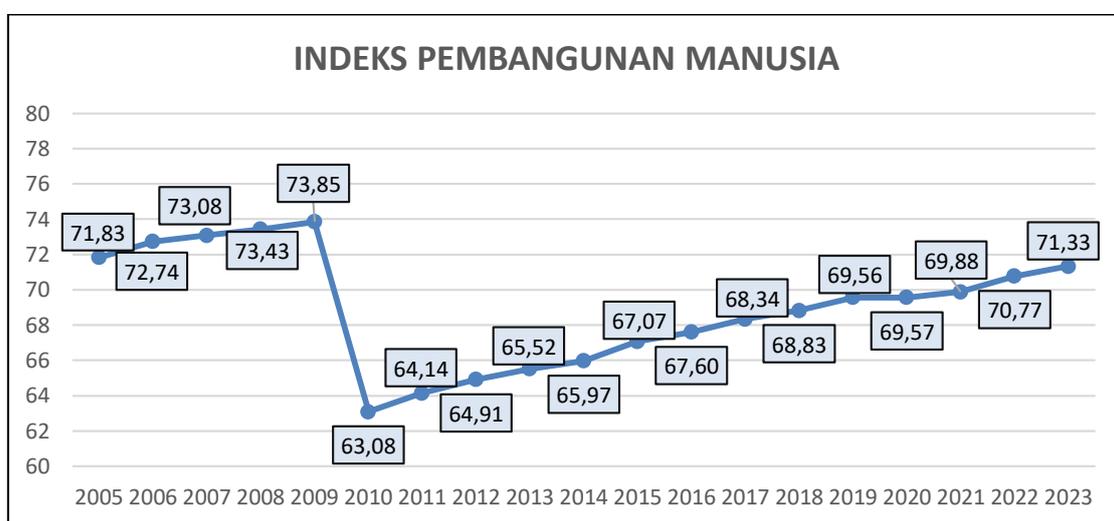
Kapabilitas Inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Nilai pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,89. Capaian tersebut berada di bawah capaian rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meski demikian, capaian tersebut meningkat dari Tahun 2022 yang memiliki nilai pilar kapabilitas inovasi sebesar 1,05. Berdasarkan capaian tersebut, pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung termasuk dalam pilar dengan capaian yang rendah dibanding capaian pilar-pilar lainnya dalam komponen daya saing daerah Kabupaten Temanggung.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 2005-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada Tahun 2009 IPM Kabupaten Temanggung pada posisi angka 73,85, tahun 2010 turun menjadi angka 63,08 dan pada Tahun 2023 berhasil naik menjadi 71,33.

Adapun jika dibandingkan dengan kondisi di level Provinsi dan Nasional maka Kabupaten Temanggung relatif tertinggal. Secara trend, IPM Kabupaten Temanggung terus meningkat, sesuai dengan trend di Jawa Tengah dan Nasional. Secara nilai, IPM Kabupaten Temanggung masih lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Gambar 2.39

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2023

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.45

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	68,83	69,57	69,88	70,77	71,33
A	Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir (Tahun)	75,48	75,58	75,64	75,7	75,77
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,13	12,14	12,08	12,55	12,61
	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,15	7,24	6,94	7,41	7,5
C	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.489	9.343	9.142	9.773	10.108

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥ 80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM < 60). Berdasarkan status tersebut, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 termasuk pada kategori

tinggi dengan nilai 71,33. Dilihat pada tabel di atas, capaian IPM Kabupaten Temanggung selama Tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan dari 68,83 pada Tahun 2019 menjadi 71,33 pada Tahun 2023, serta mengalami peningkatan status dari kategori Sedang (2019-2021) menjadi kategori Tinggi (2023). Peningkatan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 turut dipengaruhi peningkatan komponen-komponen pembentuk IPM yang terdiri dari :

A. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. UHH merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan.

UHH di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 telah mencapai 75,77 dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mencapai 12,61 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada Tahun 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,61 tahun (Diploma I) lebih baik dari capaian Tahun 2020 (12,14). Capaian HLS Temanggung pada Tahun 2023 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah (12,85) dan Nasional (13,15).

C. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023 mencapai 7,5 naik 1,21 poin dibandingkan capaian Tahun 2022. Ini artinya rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung di bawah capaian

Jawa Tengah (8,01) dan capaian Nasional (8,77). Dan ini diasumsikan menjadi salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2019-2023.

2.3.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun kabupaten Temanggung dihitung oleh BPS, dapat dilihat pada tabel 2.46.

Tabel 2.46
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Temanggung
1	2009	6,86
2	2010	5,99
3	2011	6,03
4	2012	6,08
5	2013	6,13

Sumber : BPS Temanggung, 2013

Keterangan : penghitungan IPM Tahun 2014 menggunakan metode baru yaitu penduduk usia diatas 25 tahun.

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi capaiannya masih jauh jika dibandingkan dengan capain Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa belum mencapai wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun karena baru tercapai 6,13 tahun.

2.3.2.3 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun

Merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman KanakKanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA).

Angka partisipasi Sekolah 5-6 Tahun di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru sehingga baru dihitung pada Tahun 2024. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun. Capaian Tahun 2024 dapat lihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.47
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Uraian	Tahun
		2024
1	Jumlah siswa usia 5-6 tahun	19.801
2	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun	22.819

No	Uraian	Tahun
		2024
3	APS Usia 5-6 tahun	86,77

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, data diolah, 2024

Pada tahun sebelumnya angka partisipasi sekolah belum dihitung, Tahun 2024 telah tercapai 86,77%, artinya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan usia dini sudah semakin tinggi karena merupakan pondasi untuk mempersiapkan generasi masa depan.

2.3.2.4 Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Merupakan indikator baru di Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Capaian per Kecamatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.48.

Tabel 2.48
Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah yang terdapat Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah		Jumlah Sekolah yang terdapat Guru Mengajar Ekstrakurikuler Kesenian	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bansari	16	16	100,00	14	87,50
2	Bejen	17	16	94,12	17	100,00
3	Bulu	32	31	96,88	3	9,38
4	Candiroto	23	22	95,65	21	91,30
5	Gemawang	20	20	100,00	3	15,00
6	Jumo	17	17	100,00	1	5,88
7	Kaloran	36	35	97,22	8	22,22
8	Kandangan	28	28	100,00	4	14,29
9	Kedu	33	33	100,00	18	54,55
10	Kledung	16	15	93,75	4	25,00
11	Kranggan	35	34	97,14	4	11,43
12	Ngadirejo	35	35	100,00	35	100,00
13	Parakan	31	31	100,00	6	19,35
14	Pringsurat	40	39	97,50	8	20,00
15	Selopampang	15	14	93,33	1	6,67
16	Temanggung	60	60	100,00	19	31,67
17	Tembarak	20	20	100,00	5	25,00
18	Tlogomulyo	16	15	93,75	2	12,50
19	Tretep	12	12	100,00	11	91,67
20	Wonoboyo	18	17	94,44	13	72,22
	TOTAL	520	510	98,08	197	37,88

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung data diolah, 2024

Dari total jumlah sekolah 520, jumlah sekolah yang terdapat guru mengajar mulok bahasa daerah ada 510 sekolah atau 98,08%, dan Jumlah Sekolah yang terdapat Guru Mengajar Ekstrakurikuler Kesenian ada 197 sekolah atau baru 37,88%.

2.3.2.5 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3.

Porposi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Porposi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Uraian	Tahun 2023
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (orang)	635.451
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas berpendidikan tinggi (Orang)	37.624
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	5,92 %

Sumber : Temanggung Dalam Angka, 2024

Porposi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi pada Tahun 2023 sebesar 5,92% artinya penduduk yang bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi masih sedikit dikarenakan faktor ekomoni.

2.3.2.6 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang)

Kemampuan literasi dan numerasi SD dan SMP di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru di Tahun 2023.

2.3.2.6.1 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Literasi Membaca

Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.

Capaian Kemampuan literasi SD yaitu 65,51% dan Kemampuan literasi SMP sebesar 76,52% artinya untuk literasi SD memiliki level belajar belum

cakap, sedangkang untuk SMP sudah melebihi 75% yang artinya telah memiliki level belajar cakap.

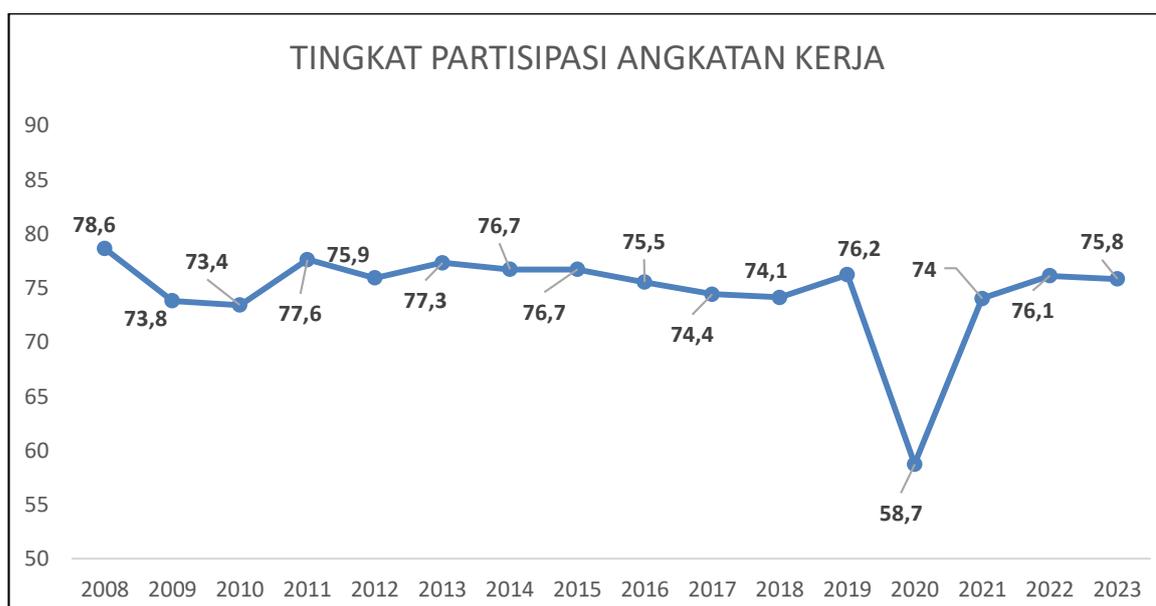
2.3.2.6.2 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Numerasi.

Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.

Capaian pada Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Numerasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 pada kemampuan numerasi SD 49,50% dan kemampuan numerasi SMP sebesar 66,49% artinya capaiannya kemampuan numerasi SD dan SMP memiliki level yang belum cakap.

2.3.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi nilai, namun meningkat dalam dalam 3 tahun terakhir. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Temanggung berkisar antara 58-76%, sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.40.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Gambar 2.40

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Temanggung 2007-2023

2.3.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Temanggung periode 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif, mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 57,82 %, dan pada Tahun 2021-2023 mengalami kenaikan, terakhir Tahun 2023 menjadi 65,91%.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Gambar 2.42

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung 2019-2023

2.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Infrastruktur merupakan komponen penting pembentuk daya saing daerah. Infrastruktur yang baik dapat menunjang percepatan pembangunan dan kegiatan perekonomian. Pada Kabupaten Temanggung, ukuran terhadap kemampuan infrastruktur ditunjukkan pada indikator diantaranya adalah:

2.3.3.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Dalam periode 5 tahun terakhir indeks tersebut terus meningkat. Pada Tahun 2019 nilai indeks tersebut adalah 81,17 dan meningkat menjadi 85,54 pada Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.50.

Tabel 2.50
Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Komponen	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase infrastruktur kondisi baik (%)	81,17	82,37	83,70	83,79	84,71
Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (%)	86,73	93,90	94,52	95,32	95,95
Persentase jaringan irigasi kondisi baik (%)	57,41	59,97	58,11	58,83	59,36
Persentase Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	89,14	83,33	89,29	88,15	89,16
Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	92,28	92,87	92,88	92,88	94,36

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2023

2.3.3.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Huni

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Huni ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan.

Data rumah tangga dengan akses hunian layak huni Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.51.

Tabel 2.51
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Huni
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	173.702	177.349	179.150	206.231	207.247
2	Jumlah rumah (unit)	196.536	196.536	196.536	217.652	217.652
3	Persentase (%)	88,38	90,24	91,15	94,75	95,22

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2023

Pada Tahun 2023 realisasi naik menjadi 95,22% jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 94,75%.

2.3.3.3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman merupakan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman sangat penting bagi

kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia.

Kondisi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.52.

Tabel 2.52
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi aman	177.265	181.568	186.290	198.531	198.531
2	Jumlah rumah tangga (unit)	196.536	196.536	225.325	225.325	225.325
3	Persentase (%)	90,19	92,38	82,68	88,11	88,11

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2023

2.3.3.4 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantab

Jalan merupakan salah satu unsur infrastruktur wilayah yang menunjang konektivitas antar wilayah. Jalan kondisi mantab adalah akumulasi jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang. Kondisi jalan permukaan mantab Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.53.

Tabel 2.53
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantab Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jalan kondisi mantap	579,866	542,047	580,79	573,366	576,265
2	Panjang Jalan Kabupaten	650,476	650,476	650,476	650,476	650,476
3	prosentase	89,14	83,33	89,29	88,15	88,59

Sumber : DPUPR Kabupaten Temanggung, 2023

Kondisi jalan permukaan mantab Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif, mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 83,33%, dan mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi sebesar 89,29%. Pada Tahun 2022 mengalami penurunan dan terakhir Tahun 2023 menjadi sebesar 88,59%.

2.3.3.5 Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air

irigasi. Kondisi irigasi kondisi baik Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.54.

Tabel 2.54
Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Irigasi Kondisi baik	331	346	335	339,5	340
2	Jumlah DI	577	577	577	577	577
3	prosentase	57,37	59,97	58,06	58,84	58,93

Sumber : DPUPR Kabupaten Temanggung, 2023

Kondisi jaringan irigasi pada periode 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif, terjadi kenaikan pada Tahun 2020 menjadi 59,97% kemudian turun menjadi 58,06 dan terakhir Tahun 2023 menjadi sebesar 58,93.

Prosentase jaringan irigasi kondisi baik merupakan gambaran kondisi kinerja irigasi di Kabupaten Temanggung, sebagai data gambaran awal untuk menyambungkan dengan Indikator Utama Pembangunan Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota karena indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota selama ini belum pernah dihitung di Kabupaten Temanggung.

2.3.3.6 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten

Dapat dihitung dari jumlah ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan yang memadai. Data pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.55.

Tabel 2.55
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	Buah	70,00	72,00	73,00	85,00	86,00
Jumlah ruas jalan kabupaten di Temanggung	Buah	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
Presentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	33,82	34,78	35,26	41,06	41,55

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2023

Pada Tahun 2019 kondisi prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jumlah ruas jalan

kabupaten berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 Tahun 2018 tanggal 22 November Tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Dari total 207 ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan memadai.

2.3.3.7 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 belum tersedia datanya. Data yang disajikan yaitu cakupan layanan air minum aman perpipaan perkotaan yang dihitung oleh PDAM Kabupaten Temanggung, dapat dilihat pada tabel 2.56.

Tabel 2.56
Cakupan Layanan Air Minum Aman Perpipaan Perkotaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELANGGAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SOSIAL UMUM	7	6	4	4	4
2	SOSIAL KHUSUS	221	231	241	248	259
3	NON NIAGA A	118	122	124	125	127
4	NON NIAGA B	11529	11788	12356	12663	13143
5	NON NIAGA C	299	322	345	357	376
6	NIAGA KECIL	761	771	812	824	860
7	NIAGA SEDANG	252	251	257	254	263
8	NIAGA BESAR	32	34	33	35	34
JUMLAH		13.219	13.525	14.172	14.510	15.066
Jumlah KK		257.391	262.643	270.220	269.219	274.845
%		0,051	0,051	0,052	0,054	0,055

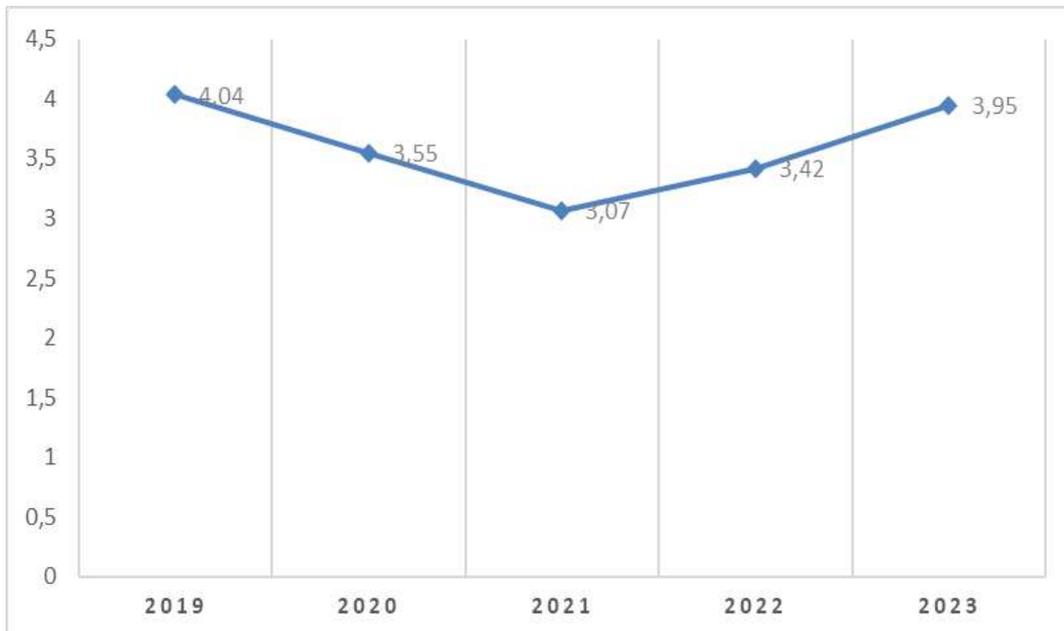
Sumber : PDAM Kabupaten Temanggung, 2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Nilai progresivitas IDSD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada gambar 2.42.



Sumber: Laporan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Temanggung, 2018-2023

Gambar 2.42

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif positif. Penurunan terjadi pada Tahun 2021 dengan nilai 3,07 dan Kembali naik pada Tahun 2022 dan 2023. Nilai IDSD Kabupaten Temanggung mulai mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dengan nilai 3,95 dengan kategori indeks daya saing daerah sangat tinggi.

2.3.4.2 Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada Kabupaten Temanggung nilai investasi tahun berjalan mengalami peningkatan selama Tahun 2019-2023, namun masih didominasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sedangkan nilai investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) masih rendah.

Pada Tahun 2022 nilai investasi sebesar Rp. 1.836 Milyar dengan rincian Rp. 306,9 Milyar PMA dan Rp. 1.529,1 Milyar PMDN. Pada Tahun 2023 Nilai investasi sebesar Rp. 2.046.25 Milyar dengan Rincian Rp. 719.70 Milyar PMA dan Rp. 1.326.55 Milyar PMDA.

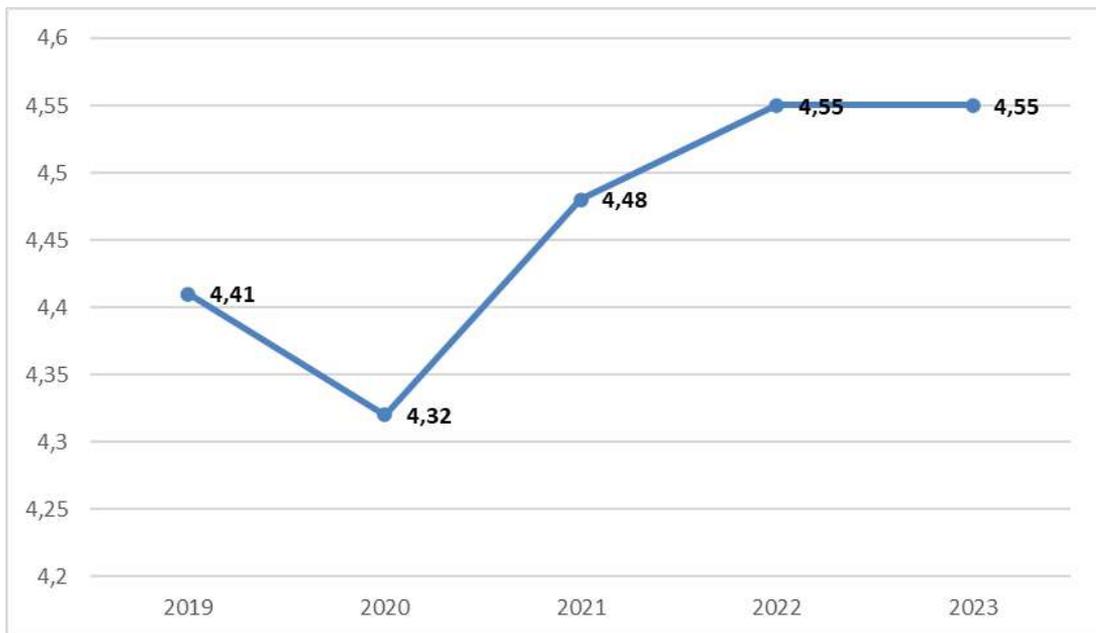


Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.43
Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

2.3.4.3 Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman secara khusus mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial. Pada Kabupaten Temanggung Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan selama 2019-2022. Pada Tahun 2019 nilai indeks adalah 4,41 dan naik menjadi 4,55 pada Tahun 2022. Capaian Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.44.



Sumber: Dokumen Laporan IKUPD Temanggung, 2019-2023

Gambar 2.44
Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

2.3.4.4 Indeks Kemudahan Berusaha

Indeks Kemudahan Berusaha (IKB) di Kabupaten Temanggung mencakup 5 variabel yaitu pembukaan usaha, akses lokasi usaha, akses finansial, operasional dan lingkungan bisnis yang aman. IKB dihitung di Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2021 dan 2022. Pada masa perhitungan tersebut IKB Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan. Nilai indeks pada Tahun 2021 adalah 78 dan meningkat menjadi 82 pada Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 2.57.

Tabel 2.57
Indeks Kemudahan Berusaha Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Indeks Kemudahan Berusaha
1	2019	n.a.
2	2020	n.a.
3	2021	78
4	2022	82
5	2023	82*

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2023
Keterangan: (*) merupakan data tahun sebelumnya

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum dalam RPJPD menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjelasan gambaran kondisi tata kelola pemerintahan ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Merit Sistem, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalitas ASN dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Tabel 2.58
Indikator Aspek Pelayanan Umum

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n.a.	n.a.	4,15	4,41	3,65
Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif*
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,82	3,61	2,78	3,12	3,2

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	n.a	68,16	69,52	62,74	68,08
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B	B	B
Indeks Sistem Merit	Indeks	n.a.	n.a.	0,259	0,482	0,62
Nilai SAKIP	Skor	B	B	B	B	B
Zona WBK/WBBM	Skor	n.a.	n.a.	40	100	100
Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3,92	3,92	3,61	4,06	n.a.
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51,7	50,03	51,24	53,13	64,54
Indesk Reformasi Hukum	Indeks	n.a.	n.a.	n.a.	43,65	67,01
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	n.a.	38,19	67,88	95,65	100
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis (treatment Success rate)	Persen	69	88	80,1	89,1	79,9
Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	n.a.	10	17	7	4
Survei Penilaian Integritas (SPI)	Angka	n.a.	n.a	78,71	77,37	76,09
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,0045
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	77,31	80,27	84,48	91,16	89,59

Sumber: Data diolah dari hasil desk RPJPD, 2023

Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan pelayanan umum di Kabupaten Temanggung sesuai tabel di atas. Pada sisi akuntabilitas, nilai IPKD mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir, dimana sempat meningkat pada Tahun 2020-2021, namun menurun pada 2021-2022. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan sejak mulai diukur pada Tahun 2018 dengan nilai 61,28 kemudian menjadi 64,61 pada Tahun 2023. Peningkatan juga terdapat pada indeks sistem merit, yang meningkat menjadi 0,62 pada Tahun 2023 dengan sebelumnya memiliki nilai 0,259 pada Tahun 2021.

Peningkatan lainnya adalah nilai SAKIP yang pada Tahun 2013 memiliki skor C, meningkat menjadi CC pada Tahun 2016, dan menjadi B pada 2019 hingga saat ini. Opini BPK dengan kategori WTP juga terus dipertahankan Temanggung sejak Tahun 2013.

Pada sisi pelayanan publik, Kabupaten Temanggung melakukan beberapa inovasi yang terekam dalam indeks inovasi daerah dan internalisasi sistem pelayanan elektronik dalam SPBE. Pada indeks inovasi daerah, Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi nilai predikat, yang berkisar antara kategori inovatif dan sangat inovatif. Fluktuasi juga terjadi pada indeks SPBE dengan nilai berkisar pada angka 2,82-3,61.

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian indeks reformasi hukum Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah 43,65 dengan katagori C (BURUK) meningkat di Tahun 2023 menjadi 76,01 dengan katagori BB (BAIK).

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) di Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang bagus dari Tahun 2020 sebesar 38,19% menjadi 100% pada Tahun 2023.

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis (treatment Success rate) di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2023 fluktuatif pada Tahun 2023 merupakan kasus yang diobati dengan jumlah terbanyak yaitu 716 kasus.

Jumlah kasus kematian ibu Kabupaten Temanggung turun dari tahun ke tahun, pada Tahun 2020 ada 10 kasus dan turun sampai dengan Tahun 2023 sebesar 4 kasus, Kasus kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Temanggung disebabkan tingginya faktor risiko pada ibu hamil yaitu 4T (Terlalu Muda; Terlalu Tua, Terlalu Sering dan Terlalu Banyak) dan serta adanya penyakit penyerta pada mayoritas ibu hamil.

Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2021 dengan nilai 78,71, Tahun 2022 dengan nilai 77,37, dan Tahun 2023 dengan nilai 76,09. Melihat tren nilai SPI yang semakin turun dari tahun ke tahun.

Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan merupakan indikator baru pada Tahun 2023 dengan capaian baru 0,0045%.

Salah satu pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah penanganan stunting, cakupan pelayanan bayi dan balita (pemenuhan gizi, layanan imunisasi, layanan kunjungan sesuai standar) serta pemenuhan akses pelayanan kesehatan (faskes pertama dan Rumah Sakit). Angka stunting pada Tahun 2023 sebesar 25,1% menurut SKI atau 13,47% menurut e-PPGBM, angka ini termasuk cukup tinggi karena target nasional 14%. Masih ada kasus kematian bayi sebesar 2,70% dan kematian balita sebesar

2,81% Tahun 2023 di Kabupaten Temanggung sehingga ada upaya pemerataan akses layanan kesehatan.

Penggunaan internet saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya semenjak pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, penggunaan internet di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 tercapai 89,59%. Banyaknya pengguna internet di Kabupaten Temanggung menunjukkan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi menuntut keberadaan teknologi dan menjadi salah satu indikasi kesiapan masyarakat menghadapi ekonomi digital.

Selain indikator aspek pelayan umum di atas, terdapat juga Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah salah satu bentuk tanggungjawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gambaran capaian kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel 2.59.

Tabel 2.59
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1.	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	98,36	92,88	95,55	100
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	91,17	81,35	94,74	100
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	35,42	25,52	27,48	100
2.	KESEHATAN	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,09	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	99,67	80,4	81,64	92,95	100
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	6,19	84,92	82,05	100

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
		Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	86,6	51,81	69,25	89,07	100
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	94,25	62,64	89,52	83,22	100
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	22,63	19,99	30,97	84,78	100
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	75,91	77,37	92,5	100	100
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	88,86	83,06	100	104	100
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	72,11	38,19	67,88	95,65	100
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	68,41	74,42	73,49	87,03	100
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	94,25	62,64	89,52	83,22	100
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	22,63	19,99	30,97	84,78	100

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	75,91	77,37	92,5	123,45	100
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	94,25	62,64	89,52	83,22	100
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	22,63	19,99	30,97	84,78	100
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	75,91	77,37	92,5	123,45	100
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	88,86	83,06	102,63	104	100
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	72,11	38,19	67,88	95,65	100
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	68,41	74,42	73,49	87,03	100
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	86	87	88	89	90	86,7	93,9	94,52	95,32	100
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	92,38	100	100

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	-	-	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	-	-	100	100	100	n.a	100	100	100	100	100
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	99,19
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	100
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	47,73	43,75	98,25	98,25
6	SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	n.a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber:

Data

diolah

dari

hasil

desk

RPJPD,

2023.

2.5 HASIL EVALUASI RPJPD 2005-2025

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 mencakup pelaksanaan 4 periode RPJMD. Evaluasi RPJPD Kabupaten Temanggung dilakukan terhadap pencapaian indikator makro pembangunan kabupaten, serta evaluasi pencapaian target sasaran pokok pada tiap periode dan/atau arah kebijakan. Berhubung RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 bersifat kualitatif, sebagaimana Surat Edaran Mendagri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2024, maka perlu mengubah pencapaian hasil pelaksanaan RPJPD yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif dengan mengubah target sasaran pokok pada setiap periode dan/atau arah kebijakan yang masih bersifat kualitatif menjadi data kuantitatif ke dalam indikator yang relevan serta menggunakan hasil evaluasi hasil RPJMD dalam periode 2005-2025.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap target kinerja sasaran pokok pada setiap misi RPJPD 2005-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut: Rata-rata capaian kinerja RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 sebesar 96,34% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Adapun rata-rata capaian kinerja per misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama “Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM”, memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 99,11% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.
2. Misi Kedua “Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin”, memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 99,94% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.
3. Misi Ketiga “Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah”, memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 93,95% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.
4. Misi Keempat “Mewujudkan ketersediaan dan Pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan

mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah”, memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 95,66% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

5. Misi Kelima “Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang”, memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 90,33% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 untuk pelaksanaan RPJPD periode berikutnya antara lain:

1) Rekomendasi Umum Penyusunan

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 dan sasaran tersebut menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang, sehingga perlu diperhatikan penyusunan dokumen RPJPD periode berikutnya tetap mengacu pada Permendagri tersebut serta perlu adanya kuantifikasi berupa indikator yang terukur yang nantinya akan terbagi ke perodesasi RPJMD.

2) Rekomendasi Teknis

Rekomendasi teknis yang dimaksud disini merupakan rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil identifikasi faktor penghambat pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Temanggung 2005-2025 yang perlu diperhatikan guna perbaikan penyusunan perencanaan di periode berikutnya, yaitu:

- a. Optimalisasi penerapan WBK dan WBBM yang merupakan bagian dari pembangunan Zona Integritas di seluruh instansi/perangkat daerah dengan komitmen seluruh pegawai;
- b. Optimalisasi pemanfaatan forum Musrenbang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten untuk sinkronisasi perencanaan penganggaran pembangunan daerah;
- c. Implementasi Perda Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah yang wajib dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai wujud peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Integrasi sistem monitoring keuangan daerah;
- e. Penerapan dan optimalisasi SPIP guna manajemen risiko di seluruh instansi;

- f. Penambahan akses internet publik dan peningkatan koordinasi antar PPID di internal Perangkat Daerah/Kabupaten serta penyelenggaraan forum evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik;
- g. Optimalisasi sinergitas stakeholder terutama dengan pihak swasta/TJSLP untuk pemanfaatan penyediaan sarpras pelayanan di luar APBD dan pembiayaan infrastruktur.
- h. Optimalisasi gerakan kembali ke sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah berkolaborasi dengan pihak non pemerintah;
- i. Optimalisasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, gerakan bersama untuk kampanye kesehatan reproduksi remaja dan bimbingan remaja usia sekolah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala dalam hal permasalahan kesehatan seperti adanya AKB, gizi kurang dan stunting.
- j. Internalisasi dan adaptasi budaya baru setelah Pandemi Covid-19 dalam masyarakat;
- k. Diversifikasi tanaman unggulan daerah sebagai peningkatan perekonomian masyarakat dari sektor unggulan daerah;
- l. Peningkatan kreativitas pembenahan produk maupun pemasaran, pembangunan relasi bisnis, pemanfaatan media sosial, peningkatan kualitas layanan guna meningkatkan investasi maupun perekonomian daerah;
- m. Sinergitas stakeholder dalam peningkatan ekonomi daerah dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui industri kecil maupun UMKM;
- n. Perlunya konsep perencanaan dan penanganan secara makro terhadap infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi;
- o. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang menjangkau seluruh wilayah;
- p. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R.
- q. Peningkatan kompetensi aparatur terkait AMDAL; dan
- r. Pembentukan instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang serta lembaga pengawasan dan pengendalian tata ruang.
- s. Penerbitan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Proyeksi Penduduk

Perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Temanggung merupakan gambaran perkiraan jumlah penduduk yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Temanggung. Data proyeksi ini merupakan informasi yang sangat dibutuhkan untuk memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana dasar dan sarana pelayanan masyarakat. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Temanggung, diketahui bahwa pada Tahun 2023 terdapat 808.446 jiwa penduduk yang tinggal di Kabupaten Temanggung, meningkat sebanyak 86.579 pada Tahun 2045 menjadi 895.025 jiwa. Sedangkan pada proporsi rasio jenis kelamin terjadi penurunan dari 100,93 persen pada Tahun 2023 menjadi 98,17 persen pada Tahun 2045. Hal ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki pada Tahun 2045. Gambaran komposisi jumlah penduduk Tahun 2023-2045 sebagaimana tabel 2.60.

Tabel 2.60
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 (jiwa)

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki Laki	406.100	412.021	424.600	433.925	440.065	443.372
Perempuan	402.346	409.097	424.310	436.713	445.866	451.653
Jumlah	808.446	821.118	848.910	870.638	885.931	895.025
Rasio	100,93	100,71	100,07	99,36	98,70	98,17

Sumber: Hasil Proyeksi BPS, 2023

Proporsi penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) di proyeksi akan mengalami penurunan, pada Tahun 2023 sebesar 21,63% menjadi 18,18% pada Tahun 2045. Hal yang sama akan terjadi pada penduduk usia produktif (15-64 tahun), pada Tahun 2023 sebesar 69,81% menjadi 63,76% pada Tahun 2045. Sementara proporsi penduduk yang sudah tidak produktif (65 tahun keatas) meningkat, pada Tahun 2023 sebesar 9,64% menjadi 18,06% pada Tahun 2045. Gambaran komposisi jumlah penduduk Tahun 2023-2045 berdasarkan kelompok umur sebagaimana tabel 2.61.

Tabel 2.61
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 (jiwa)

Jenis Kelamin	Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-4	57.804	58.095	56.767	55.446	54.071	52.718
5-9	56.386	56.324	58.198	56.873	55.560	54.186

Jenis Kelamin	Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
10-14	58.805	58.045	56.531	58.412	57.086	55.771
15-19	59.448	59.503	58.075	56.563	58.447	57.122
20-24	58.662	59.063	59.622	58.201	56.689	58.579
25-29	58.172	58.298	59.275	59.844	58.424	56.908
30-34	58.706	58.275	58.157	59.137	59.708	58.296
35-39	56.889	58.463	58.126	58.014	58.997	59.572
40-44	55.739	54.770	58.463	58.137	58.035	59.029
45-49	58.230	57.922	54.446	58.139	57.834	57.747
50-54	57.128	56.922	57.046	53.664	57.344	57.070
55-59	52.513	54.896	55.454	55.663	52.423	56.069
60-64	42.862	45.406	52.350	53.006	53.326	50.294
65-69	34.032	36.133	41.727	48.327	49.098	49.542
70-74	22.610	25.863	31.233	36.372	42.410	43.281
75+	20.460	23.140	33.440	44.840	56.479	68.841
Jumlah	808.446	821.118	848.910	870.638	885.931	895.025

Sumber: Hasil Proyeksi BPS, 2024

Pada Tahun 2025 kelompok umur terbanyak adalah 15-19 tahun yaitu 59.503 jiwa penduduk. Pada Tahun 2025 kepadatan penduduk akan meningkat menjadi 1.051 jiwa per km^2 . Adapun jumlah penduduk usia produktif tahun mencapai 570.686 jiwa. Jumlah tersebut merupakan 68% dari total perkiraan jumlah penduduk.

Angka ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Angka Ketergantungan pada Tahun 2023 sebesar 44,79, di proyeksi akan semakin meningkat menjadi 56,83 pada Tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2045, 100 penduduk usia produktif menanggung 56 penduduk usia non produktif.

Tabel 2.62
Proyeksi Proporsi Rasio Ketergantungan Kabupaten Temanggung
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	558.349	563.518	571.014	570.368	571.227	570.686
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (jiwa)	250.097	257.600	277.896	300.270	314.704	324.339
Angka Ketergantungan	44,79	45,71	48,67	52,64	55,09	56,83

Sumber: Hasil Proyeksi BPS diolah, 2023.

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia > 65 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% sejak Tahun 2023.

Tabel 2.63
Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Temanggung

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	558.349	563.518	571.014	570.368	571.227	570.686
Jumlah Penduduk (jiwa)	808.446	821.118	848.910	870.638	885.931	895.025
Proporsi Penduduk Usia Produktif	69,06	68,63	67,26	65,51	64,48	63,76

Sumber: Hasil Proyeksi BPS diolah, 2023.

Bonus demografi yang terjadi pada periode Tahun 2020–2045 memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang. Adapun tantangan yang berkaitan dengan bonus demografi adalah sebagai berikut:

- a. Masalah pengangguran dimana bonus demografi meningkatkan jumlah penduduk kelompok usia muda, Jika kelompok usia muda berpendidikan rendah, kurang keterampilan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran kelompok usia muda yang dapat menimbulkan penyakit sosial dan kriminalitas.
- b. Meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik : pertumbuhan jumlah penduduk usia muda akan menjadikan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, kesehatan, transportasi dan perumahan dan pemukiman serta sarana rekreasi/ olahraga.
- c. Tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, Jika kurang mencukupi maka akan menyebabkan kapasitas tenaga kerja usia muda kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- d. Kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja, hal ini terjadi apabila lulusan sekolah dan mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lowongan diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
- e. Tantangan kesehatan : pertumbuhan penduduk kelompok usia muda menempatkan pada kebutuhan tentang sarana dan prasarana serta

tenaga kesehatan dan mewujudkan generasi muda yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

Sedangkan keuntungan dan kemanfaatan dengan meningkatnya penduduk usia muda, antara lain sebagai berikut :

- a. Dividen demografi : jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja yang baik.
- b. Inovasi dan kreativitas : penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil.
- c. Peningkatan konsumsi : penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
- d. Kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi sosial lainnya.
- e. Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
- f. Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usia muda yang besar, hal ini jika memiliki daya beli yang tinggi.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana meliputi proyeksi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Proyeksi tersebut berguna sebagai gambaran tantangan penyediaan sarana prasarana pada masa depan, yang juga akan menjadi masukan untuk perumusan isu strategis.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Hunian

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, untuk menentukan luas minimum rata-rata perpetakan tanah didasarkan pada faktor-faktor kehidupan manusia (kegiatan), faktor alam dan peraturan bangunan. Berdasarkan kegiatan yang terjadi didalam rumah hunian, yaitu; tidur (ruang tidur), masak, makan (dapur), mandi (kamar mandi), duduk (ruang duduk/ruang tamu), kebutuhan udara segar per orang dewasa per jam 16 - 24 m³ dan per anak-anak per jam 8 - 12 m³, dengan pergantian udara dalam ruang

sebanyak-banyaknya 2 kali per jam dan tinggi plafon rata-rata 2,5 m, maka luas lantai per orang bagi dewasa sebesar 9,6 m² dan anak sebesar 4,8 m².

Saat ini di Kabupaten Temanggung rata-rata 1 rumah tangga dihuni oleh 4 orang (2 orang tua + 2 orang anak). Dengan asumsi tersebut diketahui bahwa:

$$\text{Luas lantai utama} = (2 \times 9,6) + (1 \times 4,8) \text{ m}^2 = 28,8 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas lantai pelayanan} = 50\% \times 24 \text{ m}^2 = 14,4 \text{ m}^2$$

$$\text{Total Luas Lantai} = 43,2 \text{ m}^2$$

Jika koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kaveling minimum untuk keluarga dengan anggota 4 orang adalah 86,4 m². Berdasarkan asumsi tersebut maka diketahui kebutuhan kavling hunian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64
Proyeksi Kebutuhan Hunian Kabupaten Temanggung 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	821.118	848.910	870.638	885.931	895.025
Proyeksi Jumlah RT	273.706	282.970	290.213	295.310	298.341
Kebutuhan Luas Kavling Minimum Per Keluarga (m ²)	86,4 m ²				
Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga (m ²)	23.648.198,4	24.448.608	25.074.403,2	25.514.784	25.776.662,4

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan diketahui bahwa pada Tahun 2025 kebutuhan luas kavling minimum untuk Kabupaten Temanggung adalah 23.648.198,4 m². Jumlah tersebut meningkat menjadi 24.448.608 m² pada 2030, 25.074.403,2 m² pada Tahun 2035, dan 25.514.784 m² pada 2040. Adapun pada akhir tahun perencanaan akan meningkat menjadi 25.776.662,4 m².

2.6.2.2 Proyeksi Air Bersih

Terdapat beberapa skenario proyeksi air bersih yang dapat dilakukan. Proyeksi pertama adalah perbandingan dengan standar jumlah pemakaian air yang digunakan oleh UNESCO dimana 1 orang minimal dilayani 60 liter air bersih/hari. Adapun skenario proyeksi lainnya adalah standar Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang menyesuaikan pada jenis status perkotaan. Dengan skenario yang dibangun tersebut diketahui bahwa kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Temanggung adalah sebagai 2.65.

Tabel 2.65
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Temanggung 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	821.118	848.910	870.638	885.931	895.025
Standar Kebutuhan Air UNESCO (Liter/Hari)	60	60	60	60	60
Jumlah Kebutuhan Air (Liter/Hari)	49.267.080	50.934.600	52.238.280	53.155.860	53.701.500
Standar Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Untuk Kota Sedang (Liter/Hari)	110	110	110	110	110
Jumlah Kebutuhan Air (Liter/Hari)	90.332.980	93.380.100	95.770.180	97.452.410	98.452.750

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan berdasarkan standar UNESCO, kebutuhan air akan meningkat menjadi 53.701.500/L/Hari pada Tahun 2045 di Kabupaten Temanggung. Adapun jika menggunakan dasar standar Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Untuk Kota Sedang, kebutuhan air akan meningkat menjadi 98.452.750 /L/Hari pada Tahun 2045.

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Terdapat beberapa skenario proyeksi kebutuhan listrik yang dapat dilakukan. Salah satu pendekatan adalah menghitung proyeksi jumlah pelanggan listrik. Pada Kabupaten Temanggung saat ini terdapat 240.996 jumlah pelanggan listrik. Jumlah tersebut rata-rata bertambah sebanyak 4,40% per tahunnya. Dengan menggunakan pendekatan tersebut diketahui bahwa proyeksi jumlah pelanggan listrik sebagaimana tabel 2.66.

Tabel 2.66
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Temanggung 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Pelanggan Listrik	274.227	340.105	421.809	523.141	648.815
Rata-rata daya per pelanggan	2.060,92 VA				

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Melalui proyeksi tersebut diketahui bahwa pada Tahun 2025 terdapat potensi peningkatan jumlah pelanggan menjadi 274.227. Pada Tahun 2030 menjadi 340.105. Pelanggan Tahun 2035 menjadi 421.809, dan meningkat menjadi 523.141 pada Tahun 2040 dan 648.815 pada 2045.

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, volume produksi sampah per orang per hari di Indonesia sebesar 0,68 kg/orang/hari. Berdasarkan volume produksi sampah per orang per hari tersebut dapat dihitung volume sampah seluruh penduduk setiap harinya, seperti terlihat pada tabel 2.67.

Tabel 2.67
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Temanggung 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	821.118	848.910	870.638	885.931	895.025
Volume produksi sampah per orang per hari	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Produksi sampah seluruh penduduk per hari (kg/hari)	558.360	577.258	592.033	602.433	608.617
Kebutuhan TPA	2	2	2	2	2

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Volume sampah tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan sampah, terutama dalam proses pengangkutan sampah yang membutuhkan sarana dan prasarana seperti tong sampah di setiap rumah tangga; Gerobak sampah dimensi 2 m³ dan Bak sampah kecil dimensi 6 m³ di tingkat RW (2.500 jiwa); Gerobak sampah dimensi 2 m³ dan Bak sampah besar dimensi 6 m³ sebagai Tempat Penampungan Sementara di tingkat desa/kelurahan (30.000 jiwa); Mobil sampah dan Bak sampah besar dimensi 25 m³ sebagai Tempat Penampungan Sementara di tingkat kecamatan (120.000 jiwa); Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sarana berupa Tempat daur ulang sampah, dan Bak sampah akhir di tingkat kabupaten (> 480.000 jiwa). Penyediaan sarana dan prasarana tentunya disesuaikan dengan kapasitas pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS hingga ke TPA.

Pemanfaatan sampah di Kabupaten Temanggung dilaksanakan mulai dari rumah tangga hingga pemrosesan akhir. Pada tingkatan rumah tangga sampah anorganik seperti kemasan botol kaca, botol PET, botol aluminium, kemasan cat dan ban bekas dimanfaatkan sebagai wadah alternatif seperti ember, pot bunga, wadah alat bahan dapur dan juga sebagai bahan kerajinan. Sedangkan untuk sampah organik yaitu berupa sampah sisa makanan dan sisa dapur dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan kompos.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung dibagi menjadi dua yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah merupakan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Masyarakat

sedangkan penanganan sampah merupakan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Capaian pemanfaatan sampah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 sebagaimana tabel 2.68.

Tabel 2.68
Capaian Pemanfaatan Sampah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Capaian s.d Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengurangan sampah					
	Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun)	7,22	164	18.306,20	40.682,72	44.305,86
	a. Pengelolaan sampah di Rumah Tangga				29.210,07	32.418,70
	b. Pembatasan sampah di Sekolah				57,59	49,23
	c. Pembatasan sampah di Perkantoran				125,86	125,87
	d. Bank Sampah (Ton/tahun)	7,22	164	49,9	45,19	39,19
	e. TPSD (Ton/ tahun)	-	-	18.256,30	6.534,27	6.893,36
	f. TPS3R				4.709,73	4.778,82
2.	Persentase Pengurangan Sampah (%)		0,09	10,03	27,86	30,07
2	Penanganan sampah					
1.	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	154,74	43.839,97	40.112,11	45.764,61	45.970,76
	a. Jumlah sampah terkelola di TPS 3R/Depo Transfer (Ton/tahun)	71,49	8.689,15	1.887,63	2.062,85	1.995,35
	b. Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	83,25	35.150,82	38.224,48	43.701,76	43.975,41
2.	Presentase Penanganan Sampah (%)	32,99	24,23	21,97	31,33	31,24
3.	a. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	490,92	497,64	500,17	400,17	403,72
	b. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	176.731	181.640,08	182.562,96	146.050,37	147.358,00
3	Pengelolaan Sampah					
1.	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	32,99	24,32	32	59,19	61,26

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Pada tabel 2.68 timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebesar 31,24% . jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan timbulan sampah karena adanya pengolahan sampah.

2.6.2.5 Kebutuhan Pelayanan Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal maupun yang formal, dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Perencanaan sarana pendidikan harus

didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai dimana sarana pendidikan dan pembelajaran tersebut akan menyediakan ruang belajar yang memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikapnya secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan: 1) Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan; 2) Optimasi daya tampung dengan satu *shift*; 3) Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu; 4) Pemakaian sarana dan prasarana pendukung; dan 5) Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya. Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, yaitu meliputi tingkat Pendidikan anak usia dini (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); dan tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMA/SMK). Berikut ini disampaikan data jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung berdasarkan sifatnya.

Tabel 2.69
Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	USIA 5-6 TAHUN		USIA 7-12 TAHUN		USIA 13-15 TAHUN		USIA 16-18 TAHUN	
		21.042		86.799		35.610		31.906	
		TK/RA		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
		Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel
1	Kec. Bansari	13	32	16	112	2	21	1	27
2	Kec. Bejen	12	24	20	104	3	24	0	0
3	Kec. Bulu	20	70	35	219	7	52	2	12
4	Kec. Candiroto	17	36	29	152	4	38	3	40
5	Kec. Gemawang	14	34	25	157	2	28	1	3
6	Kec. Jumo	13	32	22	136	2	42	1	27
7	Kec. Kaloran	23	63	40	219	11	60	3	13
8	Kec. Kandangan	19	45	43	243	8	80	2	10
9	Kec. Kedu	21	46	38	240	9	131	3	34
10	Kec. Kledung	13	33	16	124	2	25	1	3
11	Kec. Kranggan	22	68	35	217	10	79	4	22
12	Kec. Ngadirejo	26	102	37	249	6	105	1	13
13	Kec. Parakan	20	78	35	236	8	112	4	91
14	Kec. Pringsurat	29	57	49	281	9	101	6	64
15	Kec. Selopampang	9	21	15	89	4	62	1	13
16	Kec. Temanggung	40	223	50	392	17	166	17	385
17	Kec. Tembarak	9	31	23	170	8	88	6	64
18	Kec. Tlogomulyo	10	23	15	92	3	36	0	0
19	Kec. Tretop	7	16	16	98	3	20	0	0
20	Kec. Wonobojo	20	42	22	124	3	22	0	0
JUMLAH		357	1076	581	3654	121	1292	56	821

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan BPS, data diolah 2023.

Tabel 2.70
Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Kecamatan	USIA 5-6 TAHUN		USIA 7-12 TAHUN		USIA 13-15 TAHUN		USIA 16-18 TAHUN	
		21.873		90.597		37.879		34.544	
		TK/RA		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
		Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel
1	Kec. Bansari	13	32	16	112	2	21	1	27
2	Kec. Bejen	12	24	20	104	3	24	0	0
3	Kec. Bulu	20	70	35	219	7	52	2	12
4	Kec. Candiroto	17	36	29	152	4	38	3	40
5	Kec. Gemawang	14	34	25	157	2	28	1	3
6	Kec. Jumo	13	32	22	136	2	42	1	27
7	Kec. Kaloran	23	63	40	219	11	60	3	13
8	Kec. Kandangan	19	45	43	243	8	80	2	10
9	Kec. Kedu	21	46	38	240	9	131	3	34
10	Kec. Kledung	13	33	16	124	2	25	1	3
11	Kec. Kranggan	22	68	35	217	10	79	4	22
12	Kec. Ngadirejo	26	102	37	249	6	105	1	13
13	Kec. Parakan	20	78	35	236	8	112	4	91
14	Kec. Pringsurat	29	57	49	281	9	101	6	64
15	Kec. Selopampang	9	21	15	89	4	62	1	13
16	Kec. Temanggung	40	223	50	392	17	166	17	385
17	Kec. Tembarak	9	31	23	170	8	88	6	64
18	Kec. Tlogomulyo	10	23	15	92	3	36	0	0
19	Kec. Tretop	7	16	16	98	3	20	0	0
20	Kec. Wonoboyo	20	42	22	124	3	22	0	0
JUMLAH		357	1076	581	3654	121	1292	56	821

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan BPS, data diolah 2023.

Tabel 2.71
Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2030

No	Kecamatan	USIA 5-6 TAHUN		USIA 7-12 TAHUN		USIA 13-15 TAHUN		USIA 16-18 TAHUN	
		22.600		91.577		36.920		33.715	
		TK/RA		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
		Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel
1	Kec. Bansari	13	32	16	112	2	21	1	27
2	Kec. Bejen	12	24	20	104	3	24	0	0
3	Kec. Bulu	20	70	35	219	7	52	2	12
4	Kec. Candiroto	17	36	29	152	4	38	3	40
5	Kec. Gemawang	14	34	25	157	2	28	1	3
6	Kec. Jumo	13	32	22	136	2	42	1	27
7	Kec. Kaloran	23	63	40	219	11	60	3	13
8	Kec. Kandangan	19	45	43	243	8	80	2	10
9	Kec. Kedu	21	46	38	240	9	131	3	34
10	Kec. Kledung	13	33	16	124	2	25	1	3
11	Kec. Kranggan	22	68	35	217	10	79	4	22
12	Kec. Ngadirejo	26	102	37	249	6	105	1	13
13	Kec. Parakan	20	78	35	236	8	112	4	91
14	Kec. Pringsurat	29	57	49	281	9	101	6	64

No	Kecamatan	USIA 5-6 TAHUN		USIA 7-12 TAHUN		USIA 13-15 TAHUN		USIA 16-18 TAHUN	
		22.600		91.577		36.920		33.715	
		TK/RA		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
		Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel
15	Kec. Selopampang	9	21	15	89	4	62	1	13
16	Kec. Temanggung	40	223	50	392	17	166	17	385
17	Kec. Tembarak	9	31	23	170	8	88	6	64
18	Kec. Tlogomulyo	10	23	15	92	3	36	0	0
19	Kec. Tretep	7	16	16	98	3	20	0	0
20	Kec. Wonoboyo	20	42	22	124	3	22	0	0
JUMLAH		357	1076	581	3654	121	1292	56	821

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan BPS, data diolah 2023.

Tabel 2.72
Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2035

No	Kecamatan	USIA 5-6 TAHUN		USIA 7-12 TAHUN		USIA 13-15 TAHUN		USIA 16-18 TAHUN	
		22086		91363		37332		32837	
		TK/RA		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
		Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel
1	Kec. Bansari	13	32	16	112	2	21	1	27
2	Kec. Bejen	12	24	20	104	3	24	0	0
3	Kec. Bulu	20	70	35	219	7	52	2	12
4	Kec. Candiroto	17	36	29	152	4	38	3	40
5	Kec. Gemawang	14	34	25	157	2	28	1	3
6	Kec. Jumo	13	32	22	136	2	42	1	27
7	Kec. Kaloran	23	63	40	219	11	60	3	13
8	Kec. Kandangan	19	45	43	243	8	80	2	10
9	Kec. Kedu	21	46	38	240	9	131	3	34
10	Kec. Kledung	13	33	16	124	2	25	1	3
11	Kec. Kranggan	22	68	35	217	10	79	4	22
12	Kec. Ngadirejo	26	102	37	249	6	105	1	13
13	Kec. Parakan	20	78	35	236	8	112	4	91
14	Kec. Pringsurat	29	57	49	281	9	101	6	64
15	Kec. Selopampang	9	21	15	89	4	62	1	13
16	Kec. Temanggung	40	223	50	392	17	166	17	385
17	Kec. Tembarak	9	31	23	170	8	88	6	64
18	Kec. Tlogomulyo	10	23	15	92	3	36	0	0
19	Kec. Tretep	7	16	16	98	3	20	0	0
20	Kec. Wonoboyo	20	42	22	124	3	22	0	0
JUMLAH		357	1076	581	3654	121	1292	56	821

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan BPS, data diolah 2023.

Tabel 2.73
Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung
Tahun 2040

No	Kecamatan	USIA 5-6 TAHUN		USIA 7-12 TAHUN		USIA 13-15 TAHUN		USIA 16-18 TAHUN	
		21.576		89.267		37.236		33.931	
		TK/RA		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
		Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel
1	Kec. Bansari	13	32	16	112	2	21	1	27
2	Kec. Bejen	12	24	20	104	3	24	0	0
3	Kec. Bulu	20	70	35	219	7	52	2	12
4	Kec. Candiroto	17	36	29	152	4	38	3	40
5	Kec. Gemawang	14	34	25	157	2	28	1	3
6	Kec. Jumo	13	32	22	136	2	42	1	27
7	Kec. Kaloran	23	63	40	219	11	60	3	13
8	Kec. Kandangan	19	45	43	243	8	80	2	10
9	Kec. Kedu	21	46	38	240	9	131	3	34
10	Kec. Kledung	13	33	16	124	2	25	1	3
11	Kec. Kranggan	22	68	35	217	10	79	4	22
12	Kec. Ngadirejo	26	102	37	249	6	105	1	13
13	Kec. Parakan	20	78	35	236	8	112	4	91
14	Kec. Pringsurat	29	57	49	281	9	101	6	64
15	Kec. Selopampang	9	21	15	89	4	62	1	13
16	Kec. Temanggung	40	223	50	392	17	166	17	385
17	Kec. Tembarak	9	31	23	170	8	88	6	64
18	Kec. Tlogomulyo	10	23	15	92	3	36	0	0
19	Kec. Tretep	7	16	16	98	3	20	0	0
20	Kec. Wonoboyo	20	42	22	124	3	22	0	0
JUMLAH		357	1076	581	3654	121	1292	56	821

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan BPS, data diolah 2023.

Tabel 2.74
Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah Kabupaten Temanggung
Tahun 2045

No	Kecamatan	USIA 5-6 TAHUN		USIA 7-12 TAHUN		USIA 13-15 TAHUN		USIA 16-18 TAHUN	
		21.042		87.116		36.383		33.161	
		TK/RA		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
		Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel
1	Kec. Bansari	13	32	16	112	2	21	1	27
2	Kec. Bejen	12	24	20	104	3	24	0	0
3	Kec. Bulu	20	70	35	219	7	52	2	12
4	Kec. Candiroto	17	36	29	152	4	38	3	40
5	Kec. Gemawang	14	34	25	157	2	28	1	3
6	Kec. Jumo	13	32	22	136	2	42	1	27
7	Kec. Kaloran	23	63	40	219	11	60	3	13
8	Kec. Kandangan	19	45	43	243	8	80	2	10
9	Kec. Kedu	21	46	38	240	9	131	3	34
10	Kec. Kledung	13	33	16	124	2	25	1	3
11	Kec. Kranggan	22	68	35	217	10	79	4	22
12	Kec. Ngadirejo	26	102	37	249	6	105	1	13
13	Kec. Parakan	20	78	35	236	8	112	4	91

No	Kecamatan	USIA 5-6 TAHUN		USIA 7-12 TAHUN		USIA 13-15 TAHUN		USIA 16-18 TAHUN	
		21.042		87.116		36.383		33.161	
		TK/RA		SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
		Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel	Jumlah Sekolah	Rombel
14	Kec. Pringsurat	29	57	49	281	9	101	6	64
15	Kec. Selopampang	9	21	15	89	4	62	1	13
16	Kec. Temanggung	40	223	50	392	17	166	17	385
17	Kec. Tembarak	9	31	23	170	8	88	6	64
18	Kec. Tlogomulyo	10	23	15	92	3	36	0	0
19	Kec. Tretop	7	16	16	98	3	20	0	0
20	Kec. Wonoboyo	20	42	22	124	3	22	0	0
JUMLAH		357	1076	581	3654	121	1292	56	821

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan BPS, data diolah 2023.

Metode perhitungan proyeksi kebutuhan rombel dan prasarana sekolah sejalan dengan tren pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga diperoleh perkiraan jumlah rombel di Kabupaten Temanggung kurun waktu 2025-2045 cenderung fluktuatif. Perhitungan proyeksi kebutuhan prasarana sarana pendidikan tersebut belum mempertimbangkan berbagai aspek seperti distribusi Pemerataan , kepadatan penduduk, radius akses ke layanan pendidikan, potensi siswa pada jenjang sebelumnya, penduduk usia sekolah dan kebijakan zonasi.

2.6.2.6 Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

Kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu keharusan yang perlu dicukupi oleh pemerintah daerah mengingat kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat selain kebutuhan utama lain seperti pangan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini disampaikan kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan berdasarkan jenisnya.

Tabel 2.75
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Kategori Rumah Sakit Tahun 2023

No	Nama Rumah Sakit	Kecamatan	Status Kepemilikan
1	RSUD Temanggung	Temanggung	Negeri
2	RS PKU Muhammadiyah	Bulu	Swasta
3	RSU Gunung Sawo	Temanggung	Swasta
4	RSK Ngesti Waluyo	Parakan	Swasta
JUMLAH			4

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Tabel 2.76
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Kategori Puskesmas Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Data Puskesmas	
		Jumlah	Nama
1	Bansari	1	Puskesmas Bansari
2	Bejen	1	Puskesmas Bejen
3	Bulu	1	Puskesmas Bulu
4	Candiroto	1	Puskesmas Candiroto
5	Gemawang	1	Puskesmas Gemawang
6	Jumo	1	Puskesmas Jumo
7	Kaloran	2	Puskesmas Kaloran
			Puskesmas Tepusen
8	Kandangan	1	Puskesmas Kandangan
9	Kedu	1	Puskesmas Kedu
10	Kledung	1	Puskesmas Kledung
11	Kranggan	2	Puskesmas Kranggan
			Puskesmas Pare
12	Ngadirejo	2	Puskesmas Ngadirejo
			Puskesmas Banjarsari
13	Parakan	2	Puskesmas Parakan
			Puskesmas Traji
14	Pringsurat	2	Puskesmas Pringsurat
			Puskesmas Rejosari
15	Selopampang	1	Puskesmas Selopampang
16	Tembarak	1	Puskesmas Tembarak
17	Temanggung	2	Puskesmas Temanggung
			Puskesmas Dharmarini
18	Tlogomulyo	1	Puskesmas Tlogomulyo
19	Tretep	1	Puskesmas Tretep
20	Wonoboyo	1	Puskesmas Wonoboyo
JUMLAH			26

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Tabel 2.77
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Kategori Puskesmas Pembantu dan Klinik Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah Klinik
1	Puskesmas Bansari	-	-
2	Puskesmas Bejen	2	-
3	Puskesmas Bulu	2	-
4	Puskesmas Candiroto	2	2
5	Puskesmas Gemawang	2	-
6	Puskesmas Jumo	2	-
7	Puskesmas Kaloran	2	-
8	Puskesmas Tepusen	2	-

No	Nama Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah Klinik
9	Puskesmas Kandangan	2	-
10	Puskesmas Kedu	2	-
11	Puskesmas Kledung	3	-
12	Puskesmas Kranggan	1	2
13	Puskesmas Pare	1	-
14	Puskesmas Ngadirejo	1	-
15	Puskesmas Banjarsari	-	-
16	Puskesmas Parakan	1	3
17	Puskesmas Traji	1	-
18	Puskesmas Pringsurat	2	1
19	Puskesmas Rejosari	2	-
20	Puskesmas Selopampang	1	-
21	Puskesmas Tembarak	-	1
22	Puskesmas Temanggung	-	13
23	Puskesmas Dharmarini	2	-
24	Puskesmas Tlogomulyo	2	-
25	Puskesmas Tretep	2	-
26	Puskesmas Wonobojo	2	-
JUMLAH		39	22

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Selain ketersediaan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh suatu wilayah, ketersediaan tempat tidur pada fasilitas kesehatan juga merupakan aspek yang penting karena pelayanan kesehatan yang optimal salah satunya dapat ditunjukkan dengan penyediaan fasilitas kesehatan bagi pasien. Berikut ini disampaikan ketersediaan tempat tidur pada fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.78
Ketersediaan Tempat Tidur pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Nama Fasilitas Kesehatan	Jenis	Jumlah Tempat Tidur
1	RSUD Temanggung	Rumah Sakit	317
2	RS PKU Muhammadiyah	Rumah Sakit	154
3	RSU Gunung Sawo	Rumah Sakit	63
4	RSK Ngesti Waluyo	Rumah Sakit	162
5	Puskesmas Bejen	Puskesmas	24
6	Puskesmas Gemawang	Puskesmas	20
7	Puskesmas Ngadirejo	Puskesmas	24
8	Puskesmas Selopampang	Puskesmas	14
9	Puskesmas Pringsurat	Puskesmas	12
10	Puskesmas Wonobojo	Puskesmas	12
JUMLAH			802

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Dari tabel 2.78 dapat diketahui bahwa ketersediaan tempat tidur pada semua fasilitas kesehatan di Kabupaten Temanggung baik rumah sakit dan puskesmas berjumlah 802 tempat tidur. Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) suatu wilayah idealnya memiliki satu tempat tidur pada fasilitas kesehatan untuk setiap 1.000 penduduk. Berdasarkan pada standard tersebut dapat dihitung kebutuhan tempat tidur fasilitas kesehatan di Temanggung sebagaimana tabel 2.79.

Tabel 2.79
Proyeksi Kebutuhan Unit Tempat Tidur Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Temanggung 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk	821.118	848.910	870.638	885.931	895.025
Standar Jumlah 1 Tempat Tidur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kebutuhan Tempat Tidur Fasilitas Kesehatan	821	849	871	886	895

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan diketahui bahwa pada Tahun 2025 Kabupaten Temanggung membutuhkan 821 unit tempat tidur. Jumlah tersebut terus meningkat menjadi 849 unit pada Tahun 2030, 871 unit pada Tahun 2035, dan 886 unit pada Tahun 2040. Sementara pada tahun akhir perencanaan diproyeksikan akan meningkat kebutuhannya menjadi 895 unit.

Standar *World Health Organization* (WHO) rasio Puskesmas/Pustu diatur dengan standar 1:30.000 jumlah penduduk, di mana setiap kecamatan harus memiliki minimal satu Puskesmas. Pada standar SNI 03-1733-2004 menetapkan rasio BKIS/Klinik Bersalin, rasio Apotik/Rumah Obat, dan rasio Tempat Praktek Dokter memiliki standar masing-masing 1:30.000, 1:30.000, dan 1:5.000 penduduk. Berdasarkan Permenkes 3 Tahun 2015 tentang Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No 24 Tahun 2014 Tentang Standar Rasio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, 2019, 2025, menyebutkan bahwa proyeksi rasio kebutuhan SDM Kesehatan untuk setiap 100.000 penduduk adalah 12 Dokter spesialis, 50 dokter umum, 14 dokter gigi, 200 perawat, 130 bidan.

Dengan mengacu pada standar tersebut, kondisi eksisting Kabupaten Temanggung untuk jumlah Puskesmas dan jumlah apotek sudah memenuhi standar, namun untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pelayanan kesehatan layanan primer sesuai kebijakan pemerintah pusat, maka perlu memaksimalkan layanan ditingkat Puskesmas Pembantu baik dengan pemenuhan pembangunan puskesmas

pembantu baru maupun pemenuhan ketersediaan sarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya.

Jumlah Dokter Praktek baru tersedia 37 dokter dari kebutuhan ideal 160 dokter pada Tahun 2023, sehingga diproyeksikan perlu penambahan jumlah dokter pada Tahun 2005-2045.

Secara detail gambaran proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan sebagaimana tabel 2.80.

Tabel 2.80
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	799.764	821.118	848.910	870.638	885.931	895.025
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	4	4	4	5	5	5
Puskesmas	26	26	26	26	26	26
Puskesmas Pembantu	37	40	70	70	70	70
Klinik Bersalin	0	0	0	0	0	0
Bidan Praktek Mandiri	286	288	290	292	294	296
Dokter Umum	182	411	424	435	443	448
Dokter Spesialis	97	99	102	104	106	107
Dokter Gigi	75	115	119	122	124	125
•Praktek Dokter	37	63	68	74	80	87
•Apotek/Rumah Obat	57	57	58	59	60	61

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Temanggung, Hasil Analisis, 2023

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Kebijakan Kewilayahan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Temanggung bertujuan memajukan daya saing daerah. Pada konteks wilayah Kabupaten Temanggung menjadi satu sistem perwilayahan Gelangmanggung berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2023-2043 dengan peruntukan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Pengembangan wilayah akan sangat didorong oleh komponen daya saing yang terdiri dari faktor penguatan, faktor pasar, ekosistem inovasi, dan SDM. Aspek pasar di Kabupaten Temanggung menunjukkan kemajuan, didukung oleh pertumbuhan nilai ekspor dan kemitraan antarperusahaan serta akses keuangan yang semakin terbuka. Stabilitas pasar didukung oleh regulasi Pemda. Keunggulan komparatif dan kompetitif, terutama dalam sektor

industri pengolahan kayu lapis, menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing.

Di bidang ekosistem inovasi, Kabupaten Temanggung memiliki jaringan yang semakin kuat, didukung oleh kebijakan inovasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Kondisi ini memberikan penguat dalam meningkatkan daya saing daerah. Namun, aspek SDM masih mengalami kendala, terutama dalam kesehatan dan pendidikan. Peran Kabupaten Temanggung sebagai Sub Pusat Koleksi Distribusi Perdagangan dan Jasa, Wilayah Penghasil Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja, serta Pusat Pengolahan. Interaksi kewilayahan terjadi dalam sektor industri kayu lapis, pertanian tembakau dan kopi, pariwisata, serta pelayanan publik.

Rantai pasok komoditas industri kayu lapis menunjukkan peran Kabupaten Temanggung pada tahap produksi, tetapi menghadapi beberapa kendala seperti fluktuasi bahan baku dan permintaan pasar luar negeri. Pada sektor pertanian, Temanggung menjadi pusat penanaman dan pengolahan tembakau, sementara kopi menghadapi kendala diversifikasi produk. Sektor pariwisata menjadi potensial dengan lokasi di wilayah pegunungan, dan RSUD Temanggung berperan sebagai rujukan kesehatan. Pada interaksi wilayah Kabupaten Temanggung memiliki keiatan erat dalam rantai pasok ekonomi wilayah dan pelayanan umum dengan Kota Semarang sebagai pengumpul bahan baku ekspor produk industri, dan Kota Magelang. Kabupaten Temanggung dapat dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan umum menciptakan peluang melalui keunggulan sektor dan kerjasama lintas sektor. Namun, kendala seperti fluktuasi bahan baku, kurangnya sarpras wisata, dan permasalahan kesehatan perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing daerah.

Konteks profil daya saing tersebut akan memberikan dasar dalam perumusan arah kebijakan dalam Pembangunan wilayah. Peran tersebut sejalan dengan Visi Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yaitu: **“Mewujudkan Ruang Kabupaten Berbasis Pertanian yang Didukung Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Sosial Budaya Masyarakat dalam Kesatuan Sistem Wilayah yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan”**. Pada RPJPD 2025-2045 Kabupaten Temanggung, terdapat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang terarah. Kebijakan penataan ruang tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu 1) kebijakan pengembangan struktur ruang, 2) kebijakan pengembangan pola ruang, dan 3) kebijakan pengembangan kawasan strategis.

Meskipun Kabupaten Temanggung memiliki keunggulan komparatif, beberapa kendala perlu diatasi, seperti fluktuasi ketersediaan bahan baku kayu, kurangnya diversifikasi produk olahan kopi, dan keterbatasan tenaga kerja terdidik. Peningkatan daya saing daerah dapat diwujudkan dengan memanfaatkan kebijakan/regulasi inovasi, mengoptimalkan potensi sektor unggulan, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Fokus utama pada kebijakan pengembangan struktur ruang adalah pengembangan sistem pusat pelayanan yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu, mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pengembangan pola ruang menekankan pada 1) pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan, 2) kawasan pertanian pangan berkelanjutan, 3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian, 4) pengembangan industri dengan bahan baku lokal, 5) pengembangan wilayah pariwisata, dan 6) peningkatan pengelolaan kawasan lindung.

Konteks pengembangan kawasan strategis, Kabupaten Temanggung berfokus pada pengelolaan fungsi kawasan yang sesuai dengan daya dukung lahan dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, strategi juga mencakup pengembangan kawasan strategis yang mendukung koridor pengembangan Borobudur-Dieng dan Gelangmanggung. Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan menitikberatkan pada peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan, perdesaan, serta pelayanan jaringan. Begitu juga dengan strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah, yang mencakup peningkatan kualitas jalan, pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, pelayanan energi, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Konteks pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pemasaran hasil komoditas, strategi melibatkan penetapan fungsi pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki, pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergi secara ekonomi, serta peningkatan fungsi pengumpulan dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan. Pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan, strategi menekankan pada peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran, pembangunan sentra pemasaran baru, peran pedagang kaki lima sebagai pengumpul dan distributor hasil komoditas, serta peningkatan kawasan sentra produksi dan pemasaran.

Guna mendukung ketahanan pangan, strategi mencakup penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, optimalisasi kawasan pertanian, dan pengembangan infrastruktur pendukung pertanian. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif juga menjadi fokus dengan langkah-langkah seperti mempertahankan kawasan penyangga bencana, mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan yang bukan sawah irigasi, dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Pengembangan industri berbahan baku lokal diarahkan dengan strategi mengembangkan kegiatan industri, agroindustri untuk peningkatan nilai tambah produk pertanian, pengembangan industri kreatif, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri. Pada paya pengembangan wilayah dengan optimalisasi sektor pariwisata, strategi melibatkan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan, pengelolaan Kawasan Lindung, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan. Seluruh strategi ini diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

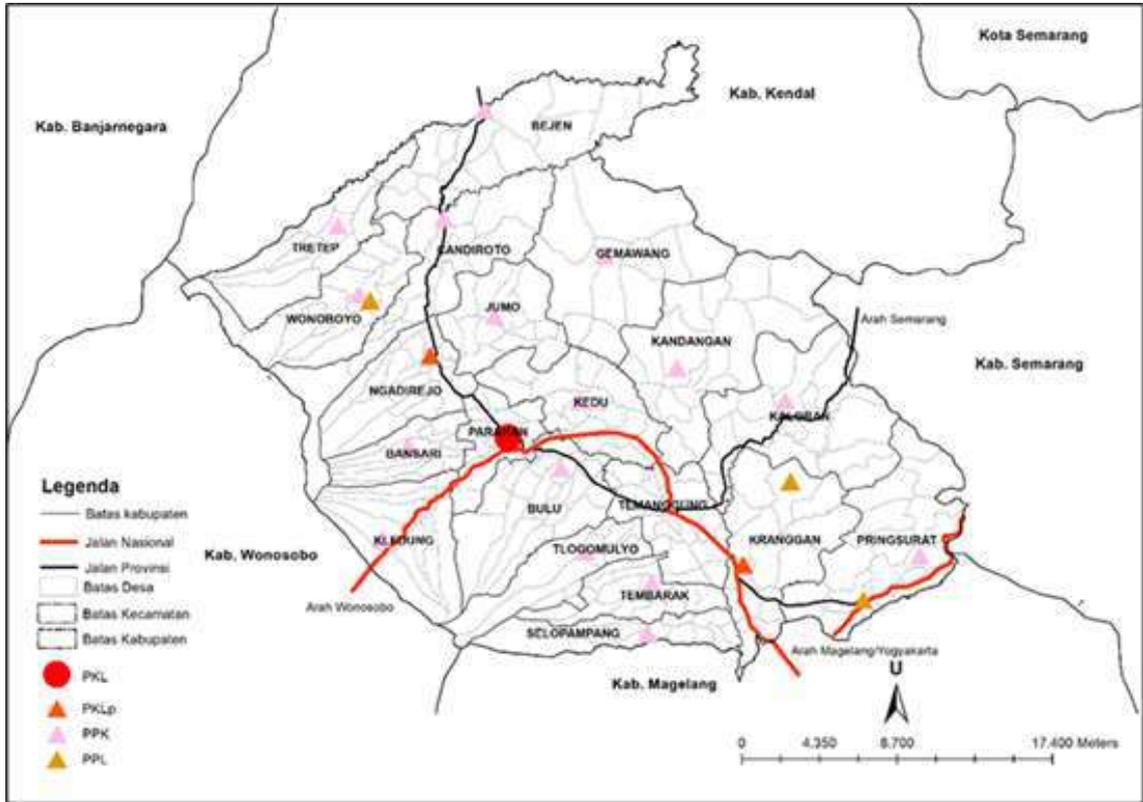
Kabupaten Temanggung menetapkan strategi dan arah kebijakan perencanaan ruang wilayah untuk mewujudkan tujuan penataan ruangnya. Fokus utama adalah pengembangan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan arahan struktur ruang, pengembangan sistem pusat pelayanan, perwujudan sistem transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan air limbah, dan manajemen sampah. Pusat pertumbuhan dibagi menjadi perkotaan dan perdesaan, dengan program pengembangan yang mencakup PKL, PPK, dan PPL. Pembagian lokasi rencana sistem perkotaan di Kabupaten Temanggung meliputi:

1. **Pengembangan PKL (Pusat Kegiatan Lokal)**, meliputi:
 - a) Kawasan perkotaan Temanggung
 - b) Kawasan perkotaan Parakan.
2. **Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)**, meliputi:
 - a) Pusat Pelayanan Kawasan Kranggan
 - b) Pusat Pelayanan Kawasan Pringsurat
 - c) Pusat Pelayanan Kawasan Ngadirejo
 - d) Pusat Pelayanan Kawasan Candiroto
3. **Pengembangan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)**, meliputi:
 - a) Pusat Pelayanan Lingkungan Kebonsari Kecamatan Wonoboyo
 - b) Pusat Pelayanan Lingkungan Tepusen Kecamatan Kaloran
 - c) Pusat Pelayanan Lingkungan Gentan Kecamatan Kranggan
 - d) Pusat Pelayanan Lingkungan Malebo Kecamatan Kandangan

- e) Pusat Pelayanan Lingkungan Muntung Kecamatan Candirot
- f) Pusat Pelayanan Lingkungan Menggoro Kecamatan Tembarak
- g) Pusat Pelayanan Lingkungan Ngemplak Kecamatan Kandangan
- h) Pusat Pelayanan Lingkungan Margolelo Kecamatan Kandangan
- i) Pusat Pelayanan Lingkungan Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung
- j) Pusat Pelayanan Lingkungan Mento Kecamatan Candirot
- k) Pusat Pelayanan Lingkungan Wadas Kecamatan Kandangan
- l) Pusat Pelayanan Lingkungan Jetis Kecamatan Selopampang

Dalam pengembangan sistem transportasi, terdapat rencana jaringan jalan nasional, provinsi, lokal, dan khusus, serta pengembangan angkutan umum. Sistem energi melibatkan pengembangan jaringan pipa minyak, gas bumi, dan listrik. Pengembangan telekomunikasi mencakup jaringan tetap, bergerak, dan peningkatan kualitas pelayanan. Pengembangan sumber daya air dikelola sesuai dengan pola sumber daya air regional. Pembangunan infrastruktur irigasi dan penanganan banjir melibatkan pembangunan waduk, embung, serta pengendalian arus sungai. Program pengelolaan air minum, air limbah, dan limbah B3 juga diimplementasikan. Manajemen sampah difokuskan pada pengelolaan TPA, TPS-3R, dan TPSD serta pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah. Jaringan prasarana lainnya mencakup transportasi, energi, telekomunikasi, persampahan, drainase, dan evakuasi bencana.. Di bidang transportasi, terdapat pengembangan jaringan jalan dan kereta api. Pengembangan sistem energi melibatkan gardu listrik, jaringan transmisi, pembangkit listrik, dan pengembangan energi baru.

Rencana pola ruang melibatkan kawasan lindung dan budi daya. Kawasan lindung mencakup badan air, perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan cagar budaya. Kawasan budi daya mencakup hutan produksi, pertanian, peruntukan industri, pariwisata, dan permukiman. Perwujudan kawasan pertanian melibatkan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, intensifikasi pertanian, pengembangan irigasi, dan pusat pemasaran. Kawasan industri memperhatikan dampak lingkungan, pengembangan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan pemantauan. Pembangunan kawasan pariwisata fokus pada pengembangan objek wisata, sarana prasarana, promosi, dan pengoptimalan potensi lokal. Kawasan permukiman mencakup wilayah perkotaan dan perdesaan. pada pengembangan objek wisata, sarana prasarana, promosi, dan pengoptimalan potensi lokal.



Sumber: Diolah berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Temanggung, 2023.

Gambar 2.45

Peta Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Temanggung



BAB III

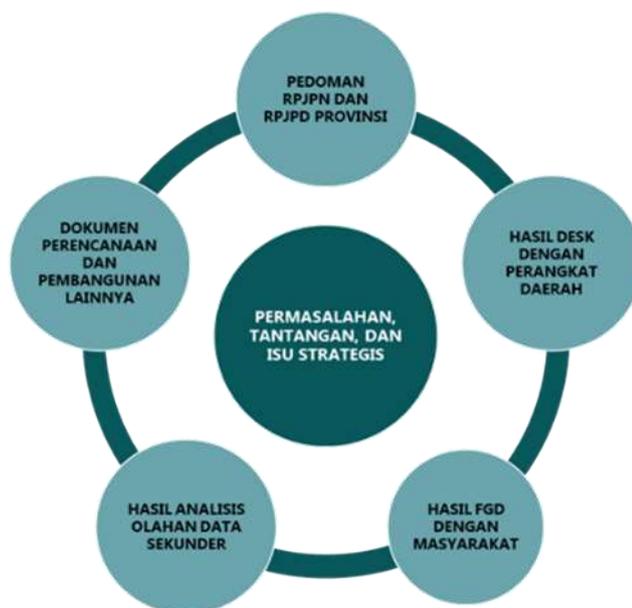
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan, tantangan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Temanggung



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Temanggung terdapat beberapa dokumen rujukan dan upaya identifikasi yang dilakukan. RPJPD sebagai bagian dari kerangka perencanaan pembangunan nasional tidak bisa dipisahkan dari hierarki pemerintahan yang ada sehingga dalam perumusan permasalahan dan isu strategis daerah perlu mempedomani kondisi yang ada di level Nasional dan Provinsi (Jawa Tengah). Guna memberikan pemahaman terhadap kondisi internal daerah dan sifat dokumen RPJPD yang partisipatif, keterlibatan perangkat daerah sebagai pelaku pembangunan dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan juga perlu diikutsertakan.



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Data Diolah, 2023.

Gambar 3. 1
Proses Perumusan Permasalahan, Tantangan dan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Temanggung

Proses tersebut dilakukan dengan desk dan FGD. Selain itu sebagai dokumen perencanaan yang komprehensif, identifikasi permasalahan dan isu strategis pada RPJPD juga dapat melihat hasil-hasil temuan dari dokumen perencanaan dan pembangunan lainnya seperti RTRW dan KLHS. Pada akhirnya, sebagai dokumen yang bersifat teknokratik, RPJPD juga perlu didukung dengan pendekatan akademik dalam perumusan permasalahan dan isu strategisnya sehingga analisis terhadap data sekunder dan primer juga dilakukan.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan hasil pengumpulan data, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten

Temanggung. Masalah dan tantangan tersebut tidak hanya yang ditemukan atau dihadapi saat ini, tetapi juga yang berpotensi akan terjadi pada masa yang akan datang. Masalah dan tantangan tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, tata kelola dan pemerintahan, pelayanan publik, infrastruktur, lingkungan, dan aspek-aspek lainnya. Pada bagian ini disampaikan penarikan kesimpulan permasalahan pembangunan yang telah teridentifikasi dengan menerapkan *cross cutting issues*.

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1) Aspek Geografi

Permasalahan aspek geografi dapat diklasifikasikan sesuai dengan keterkaitan/kemiripan permasalahannya sebagai berikut:

a) Guna Lahan dan Daya Dukung Lingkungan

(1) Perubahan Guna Lahan Pertanian yang Massif

Guna mengakomodir jumlah penduduk yang meningkat serta aktivitasnya yang semakin beragam, guna lahan di Kabupaten Temanggung berubah seiring waktu. Adapun jenis guna lahan yang paling terdampak (banyak mengalami perubahan) adalah guna lahan pertanian. Dengan kondisi produktivitas lahan yang cenderung menurun kondisi ini diprediksi akan terus terjadi jika tidak ada intervensi yang dilakukan.

(2) Perubahan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Perubahan daya dukung dan daya tampung menjadi tantangan Kabupaten Temanggung pada masa depan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan konservasi lahan yang belum optimal, keseimbangan penyediaan dan kebutuhan lahan akan menjadi tantangan kedepannya. Salah satu indikasi perubahan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada saat ini adalah semakin meningkatnya jumlah lahan kritis di Kabupaten Temanggung.

b) Perubahan Iklim dan Kebencanaan

(1) Peningkatan Jumlah Bencana Khususnya Bencana Akibat Iklim (Puting Beliung, Banjir dan Kekeringan)

Pada rentang 10 tahun terakhir Kabupaten Temanggung mengalami lebih dari 100 kejadian bencana akibat iklim yang mencakup puting beliung, banjir dan kekeringan. Secara tren jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Perubahan iklim yang diprediksi akan terus terjadi dan semakin tidak tentu pada masa depan dan dampak perlu diantisipasi oleh Pemerintah

Kabupaten Temanggung. Pencegahan hingga rehabilitasi dampak bencana perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan tersebut

(2) Dampak Perubahan Iklim terhadap Produktivitas Pertanian dan Ketersediaan Pangan

Perubahan iklim memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung. Indikasi hal tersebut adalah peningkatan hama, penurunan kuantitas dan kualitas air yang dipengaruhi oleh kondisi iklim yang berdampak terhadap penurunan produktivitas pertanian. Dengan kebutuhan pangan yang meningkat, jaminan terhadap ketersediaan pangan yang terjangkau merupakan tantangan ke depan.

(3) Penerapan Proklamasi yang Belum Optimal

Penerapan Proklamasi di Kabupaten Temanggung belum optimal mengingat kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah serta koordinasi antar stakeholder yang belum optimal. Dengan perubahan iklim yang berpotensi semakin masif pada masa depan, penerapan proklamasi di Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan.

c) Sumber Daya Alam

(1) Keterbatasan dan Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Air

Terdapat beberapa indikasi masalah terkait keterbatasan dan peningkatan kebutuhan sumber daya air. Saat ini debit sebagian sumber mata air semakin berkurang khususnya pada musim kemarau. Hal ini semakin mendesak melihat juga semakin berkurangnya jumlah sumber mata air. Meningkatnya jumlah kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk, pembiayaan konservasi sumber daya air membutuhkan anggaran besar, minimnya jumlah mata air di lereng Gunung Sumbing, Gunung Sindoro dan Gunung Prau yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung serta belum semua wilayah memiliki sarana dan prasarana yang memadai terkait pengadaan jaringan air bersih juga merupakan masalah dari sisi penyediaan

(2) Konservasi SDA yang Belum Optimal

Konservasi SDA di Kabupaten Temanggung cenderung masih belum optimal utamanya melihat kondisi kesadaran bersama dalam mengelola SDA dan ketersediaan regulasi pendukung. Sampai saat ini masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam konservasi SDA

yang perlu ditangani. Selain itu dokumen kajian dan regulasi pendukung konservasi juga masih tergolong kurang lengkap untuk mendukung konservasi yang optimal.

2) Aspek Demografi

a) Perubahan Struktur Demografi

Saat ini kelompok usia produktif merupakan kelompok masyarakat dengan jumlah tertinggi dibanding non produktif. Namun jika melihat tren perkembangan penduduk kedepannya, terdapat potensi peralihan jumlah penduduk menuju usia non produktif yang cukup besar. Kondisi ini akan meningkatkan angka ketergantungan di Kabupaten Temanggung. Struktur demografis yang pasti juga akan berubah adalah jumlah dan kepadatan penduduk, dengan tren yang ada saat ini. Daerah perkotaan diprediksi akan semakin banyak menjadi tujuan tempat tinggal, pun dengan desa yang perlahan dengan pertumbuhan penduduk akan berubah menjadi semakin padat.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan Ekonomi

Permasalahan aspek kesejahteraan sosial dan budaya dapat diklasifikasikan sesuai dengan keterkaitan/kemiripan permasalahannya sebagai berikut:

a) Pembangunan Manusia

(1) IPM Masih Rendah

Kabupaten Temanggung merupakan daerah dengan nilai IPM yang relatif rendah jika dibandingkan dalam konteks konstelasi wilayah. Nilai IPM Temanggung pada tahun 2022 yaitu 71,33. Nilai IPM Temanggung juga lebih rendah dibanding nilai IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang mencapai 72,79 dan 72,91. Hal ini menjadi tantangan kedepan bagi Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan sumber daya manusia.

(2) Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Masih Rendah

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu tantangan yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung melihat perbandingan nilainya dalam skala yang lebih besar. Pada tahun 2022 RLS Temanggung hanya mencapai 7,41 dan HLS 12,55. Rata-Rata Lama Sekolah tersebut masih lebih rendah lebih rendah dibanding kondisi di Jawa Tengah dan Nasional yaitu 7,93

dan 8,69. Kondisi serupa juga ditemukan pada harapan lama sekolah yang masih dibawah Rata-Rata kawasan sekitar (13,02), Jawa Tengah (12,81) dan Nasional (13,10).

b) Kemiskinan

Walaupun Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Temanggung relatif lebih rendah dibanding level provinsi dan nasional. Namun masih adanya kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan pembangunan ke depan. Disamping itu, target Kemiskinan Nasional menuju nol persen di tahun 2045 juga merupakan tantangan yang tidak mudah.

c) Ketenagakerjaan

Kualitas, serapan dan pemikiran tenaga kerja di Kabupaten Temanggung masih menjadi tantangan karena masih belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh industri yang menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja belum memiliki kompetensi yang berdaya saing, kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja, tenaga kerja masih membatasi diri pada lowongan pekerjaan yang dekat, perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan belum optimal merupakan indikasi tantangan terkait tenaga kerja di Kabupaten Temanggung.

2) Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan aspek kesejahteraan sosial budaya dapat diklasifikasikan sesuai dengan keterkaitan/kemiripan permasalahannya sebagai berikut:

a) Sosial

(1) Perubahan Kondisi, Perilaku, dan Interaksi Sosial

Adanya perkembangan sosial media dan pandemi memberikan dampak terhadap perubahan kondisi, perilaku dan interaksi sosial masyarakat Temanggung. Penggunaan dan adiksi terhadap gawai semakin massif merupakan salah satu indikasi penyebab perubahan tersebut.

(2) Kapasitas Perlindungan dan Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak yang Masih Rendah

Kapasitas perlindungan wanita dan perlindungan anak di Kabupaten Temanggung masih belum optimal. Hal tersebut diindikasikan dari belum terbentuknya UPTD PPPA, belum optimalnya kelembagaan perlindungan anak dan perempuan, belum optimalnya fasilitas publik untuk menunjang ramah

anak serta koordinasi lintas sektoral membuat kapasitas perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan dan anak) masih lemah, diindikasikan dari masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan wanita juga masih perlu ditingkatkan melihat kondisi saat ini dimana pelibatan wanita dalam sektor ekonomi utama, pemerintahan, dan sektor vital lainnya belum optimal.

(3) Kapasitas Perlindungan dan Pemberdayaan Difabel yang Masih Rendah

Saat ini kapasitas perlindungan dan pemberdayaan difabel masih tergolong rendah di Kabupaten Temanggung. Penyediaan fasilitas pelayanan publik ramah difabel, pelibatan kelompok difabel dalam kegiatan pembangunan, serta pemberdayaan kelompok difabel pada sektor-sektor ekonomi juga belum optimal.

(4) Kebutuhan Peningkatan Layanan Kesehatan Level Mikro dan Peningkatan Cakupan UHC

Saat ini cakupan pelayanan *universal health care*/jaminan kesehatan di Kabupaten Temanggung masih berkisar 85% (2022), dilihat dari jumlah masyarakat yang sudah memiliki jaminan kesehatan. Kondisi ini belum optimal melihat target capaian 95%. Selain itu pelayanan kesehatan pada level mikro seperti puskesmas pembantu juga masih belum optimal, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menuju rumah sakit besar yang berakibat pada meningkatnya statistik *Bed Occupation Ratio* (BOR). Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Temanggung pada masa depan.

(5) Kebutuhan Peningkatan Layanan Pencegahan Hingga Rehabilitasi Masalah Kesehatan Mental, Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular

Perubahan gaya hidup masyarakat pada masa depan diprediksi akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan layanan pencegahan hingga rehabilitasi masalah kesehatan mental, penyakit tidak menular dan penyakit menular. Perlu peningkatan kuantitas dan pengembangan kualitas pelayanan untuk menghadapi kondisi tersebut pada masa depan

(6) Kebutuhan Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak Serta Penanganan Stunting

Angka kematian ibu dan anak serta prevalensi stunting masih menjadi tantangan di Kabupaten Temanggung. Kualitas layanan dan ketersediaan sarana prasarana penunjang merupakan indikasi utama masalah tersebut.

(7) Pembangunan Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreasi yang Belum Optimal dan Bernilai Tambah

Pembangunan olahraga merupakan salah satu indikator pembangunan yang masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Temanggung. Salah satu indikasi hal tersebut adalah belum tercapainya target pembangunan olahraga sesuai rencana pembangunan sebelumnya. Selain itu olahraga masyarakat juga belum berjalan dengan optimal salah satunya akibat perubahan gaya hidup yang membuat masyarakat semakin jarang berolahraga. Olahraga rekreasi seperti event dan industri olahraga penunjang juga belum dioptimalkan dengan baik sehingga belum memberikan nilai tambah yang optimal bagi ekonomi daerah.

(8) Cakupan Pelayanan PMKS yang Belum Optimal

Saat ini pelayanan PMKS di Kabupaten Temanggung masih berorientasi pada penyediaan bantuan dasar dan bantuan sosial. Pemberdayaan PMKS salah satunya melalui kelompok usaha bersama belum banyak dilakukan. Selain itu potensi PPKS juga belum dioptimal dengan baik sehingga masih banyak sumber daya dan stakeholder penunjang lain yang terlibat dalam pelayanan PMKS di Kabupaten Temanggung.

(9) Kebutuhan Peningkatan Pengetahuan dan Kecakapan Masyarakat dalam Sosial Media

Dengan perkembangan teknologi khususnya sosial media perlu peningkatan pengetahuan dan kecakapan masyarakat. Tantang tersebut terutama diindikasikan oleh belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat. Selain itu minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi juga masih menjadi tantangan.

(10) Kebutuhan Integrasi Teknologi dan Digital dengan Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Lokal

Perkembangan teknologi dan digital yang ada perlu diintegrasikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya lokal. Hal ini diperlukan untuk memberikan nilai tambah. Selain itu integrasi dengan nilai lokal juga berfungsi sebagai pengontrol perkembangan teknologi dan digital sehingga dapat terus sesuai.

b) Budaya

(1) Masih Rendahnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Budaya

Pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan budaya di Kabupaten Temanggung. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya SDM, regulasi dan sinergi antar stakeholder. Kondisi tersebut yang menyebabkan rendahnya pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan Cagar Budaya serta 10 Obyek Pemajuan Kebudayaan lainnya.

(2) Kebutuhan Penerapan dan Pelestarian Nilai Lokal dalam Pembangunan

Penerapan dan pelestarian nilai lokal terutama dalam pembangunan merupakan hal penting pada masa depan. Nilai lokal merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga perlu dioptimalkan.

(3) Kebutuhan Peningkatan Peran Keluarga dalam Pelestarian dan Pendidikan Budaya

Peningkatan peran keluarga merupakan salah satu kunci pelestarian dan pendidikan budaya. Sebagai pondasi awal tumbuh kembang individu, peran keluarga penting ditingkatkan untuk internalisasi nilai-nilai lokal dalam menjawab tantangan masa depan.

3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Ekonomi

Permasalahan aspek daya saing ekonomi dapat diklasifikasikan sesuai dengan keterkaitan/kemiripan permasalahannya sebagai berikut:

1) Sektor Ekonomi

(1) Perubahan Sektor Ekonomi Utama dari Pertanian ke Industri Pengolahan

Sebelum tahun 2014 sektor pertanian merupakan kontributor utama PDRB Kabupaten Temanggung. Kondisi tersebut

kemudian berubah pada tahun 2014 dimana sektor industri pengolahan menjadi kontributor tertinggi. Kontribusi sektor pertanian juga semakin menurun dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Potensi perubahan kontributor ekonomi pada masa mendatang menjadi tantangan dalam pembangunan Kabupaten Temanggung.

(2) Tantangan Pertumbuhan Industri Besar Baru yang Tidak Berbasis Sumber Daya Lokal

Industri Kayu merupakan satu-satunya jenis industri besar yang beroperasi di Kabupaten Temanggung sebelum 2011. Kondisi ini berubah setelah tahun 2011 dimana terdapat pembangunan industri besar non kayu seperti industri garmen, sepatu dan kimia dengan jumlah 4 industri dan bertahan hingga saat ini. Industri-industri baru ini berbeda dengan industri kayu yang memanfaatkan sumber daya lokal (kayu sengon) sebagai bahan baku olahan, melainkan hanya menyerap sumber daya manusia lokal.

(3) Kebutuhan Peningkatan Produktivitas dan Skala Ekonomi

Industri di Kabupaten Temanggung sedang mengalami stagnansi produktivitas. Hal ini diindikasikan melalui stagnansi hasil produk yang dihasilkan industri serta nilai produk yang dihasilkan, terutama pada rentang tahun 2018 hingga 2022. Selain itu skala ekonomi dari industri yang ada juga tidak meningkat secara signifikan dalam rentang waktu tersebut.

(4) Belum Optimalnya Pemanfaatan Sektor Ekonomi Potensial (Ekonomi Kreatif, Pariwisata, UMKM, IKM)

Sektor ekonomi kreatif, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah serta industri kecil dan menengah merupakan sektor potensial di Kabupaten Temanggung. Secara jumlah, unit usaha pada sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir. Namun pertumbuhan tersebut belum disertai dengan dukungan peningkatan kualitas kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, pemasaran dan penerapan teknologi yang memadai. Akibatnya sektor ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB.

2) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Permasalahan untuk aspek daya saing SDM adalah **Masih Rendahnya Kemampuan Literasi dan Numerasi Masyarakat**. Kemampuan literasi dan numerasi merupakan faktor penting dalam kualitas sumber daya manusia. Saat ini kemampuan literasi dan numerasi pelajar di Kabupaten Temanggung masih tergolong rendah. Pada level pendidikan SD, pelajar di Temanggung memiliki kemampuan literasi 58,24 poin dan kemampuan numerasi 42,86. Kondisi yang sama juga terdapat pada level SMP, dimana pelajar Temanggung memiliki kemampuan literasi dan numerasi 70,08. Peningkatan literasi masyarakat, salah satunya melalui indeks pembangunan literasi masyarakat perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

3) Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan aspek daya saing infratraktur dapat diklasifikasikan sesuai dengan keterkaitan/kemiripan permasalahannya sebagai berikut:

a) Kebutuhan Dukungan Peningkatan Produktivitas pada Sistem Keterkaitan Wilayah

Tantangan masa depan menuntut daerah untuk lebih meningkatkan perannya dalam sistem keterkaitan wilayah. Produktivitas merupakan faktor utama pembentuk peranan tersebut. Temanggung dengan segala potensi yang dimiliki perlu meningkatkan produktivitasnya, melalui penguatan peran dalam kewilayahan.

b) Kebutuhan Peningkatan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Keterkaitan pada Sistem Keterkaitan Wilayah

Peningkatan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Temanggung diperlukan melihat banyak angkutan umum yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Selain itu angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan minimal. Pelayanan di terminal tipe C juga tidak maksimal disisi fisik bangunan maupun ketersediaan SDM yang memadai. Fasilitas naik turun penumpang angkutan umum di sepanjang jaringan trayek (halte) juga masih minim.

c) Peningkatan Permukiman Padat Penduduk Khususnya Pusat Kota

Peningkatan permukiman padat penduduk merupakan konsekuensi dari pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan ketersediaan lahan yang tidak bisa bertambah, bertambahnya permukiman padat penduduk dapat

menjadi akibatnya, terutama di pusat kota yang memiliki akses lebih baik.

d) Pengelolaan dan Ketersediaan RTH yang Masih Terbatas

Terdapat beberapa indikasi yang menjadi bukti adanya permasalahan terkait pengelolaan dan ketersediaan RTH di Kabupaten Temanggung yang masih terbatas. Saat ini pengelolaan RTH yang ada baru sebatas pemeliharaan taman-taman kota belum dapat dilakukan pengembangan. Selain itu di data RTH Privat juga belum dimiliki, selain ketersediaannya yang juga terbatas. Secara spesifik Hutan Kota di Kabupaten Temanggung sebagai salah satu RTH publik utama saat ini juga terdapat beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya. Indikasi lainnya adalah ketersediaan sdm terbatas.

e) Pelayanan dan Manajemen Persampahan yang Belum Optimal

Saat ini Kabupaten Temanggung masih mengalami kendala dalam pelayanan dan manajemen persampahan. Meningkatnya jumlah timbunan sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya jumlah desa yang terlayani, serta kondisi geografi desa di Kabupaten Temanggung yang beragam merupakan kondisi lapangan yang menyebabkan kendala pelayanan dan manajemen persampahan. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM persampahan dan kondisi sarana prasarana persampahan yang perlu peremajaan merupakan kendala dalam melakukan pelayanan.

f) Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang

Saat ini tingkat kesesuaian rencana tata ruang dengan penerapannya masih berada di sekitar 85-90% di Kabupaten Temanggung. Masih terdapat margin 10-15% dari kondisi ideal kesesuaian rencana tata ruang.

g) Kebutuhan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Penunjang Permukiman

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas penunjang permukiman juga semakin meningkat. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk menjadi tantangan dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas. Perlu upaya pengembangan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan keterbatasan yang ada.

4) Daya Saing Iklim Investasi

Pengelompokan permasalahan untuk aspek daya saing iklim investasi adalah sebagai berikut:

a) Inkonsistensi Sistem Perizinan Investasi

Sistem perizinan investasi di Kabupaten Temanggung belum berjalan dengan optimal. Integrasi kebijakan dan prasyarat perizinan, konsistensi peraturan dan kebijakan yang masih sering berubah serta sistem perizinan *online* yang belum mapan merupakan beberapa kondisi yang menyebabkan belum optimalnya sistem perizinan investasi di Kabupaten Temanggung. Padahal konsistensi sistem perizinan merupakan acuan bagi investor untuk mendapat kepastian dalam berinvestasi.

b) Kebutuhan Peningkatan dan Penetrasi Investasi

Investasi di Kabupaten Temanggung secara umum masih didominasi oleh investasi pada industri besar kayu. Ketergantungan yang tinggi terhadap investasi dari satu jenis industri merupakan kondisi yang tidak ideal dalam pembangunan masa depan. Adanya ketidakpastian dan ketergantungan tinggi terhadap ekonomi global yang berdampak terhadap performa industri kayu di Kabupaten Temanggung memberikan pengaruh besar terhadap penurunan performa investasi pada rentang 2019-2022. Hal ini menjadi tantangan bagi pembangunan Kabupaten Temanggung ke depan.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan aspek pelayanan umum dapat diklasifikasikan sesuai dengan keterkaitan/kemiripan permasalahannya sebagai berikut:

1) Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Umum Barang Publik

a) Kebutuhan Penerapan Teknologi dan Digitalisasi untuk Pelayanan Umum

Penerapan teknologi dan digitalisasi diperlukan untuk mempermudah pelayanan umum di masa depan. Namun faktor geografis membuat kebutuhan peralatan infrastruktur memakan biaya besar sehingga beberapa desa berinisiatif menggunakan layanan yang sudah ada di luar jaringan pemkab. Selain itu masih kurangnya persebaran titik lokasi repeater jaringan membuat beberapa lokasi desa tidak bisa terhubung dengan jaringan pemkab. Selain itu infrastruktur berbasis radio (wireless) banyak terpengaruh

dengan cuaca, iklim, interferensi dan pembatasan penggunaan frekuensi menyebabkan performansi tidak optimal

b) Kebutuhan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Teknologi Informasi

Dengan perkembangan teknologi yang ada, kebutuhan sarana dan prasarana penunjang teknologi juga akan semakin meningkat. Saat ini di Kabupaten Temanggung ketersediaan sarana prasarana penunjang teknologi informasi masih belum merata dan memadai. Integrasi infrastruktur TIK juga belum terjadi utamanya di tingkat desa.

c) Keterpaduan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Antar Perangkat Daerah yang Belum Optimal dan Sinkron

Keterpaduan dan pemanfaatan data di Kabupaten Temanggung belum optimal utamanya terkait ketersediaan data statistik sektoral. Hal ini diindikasikan dari belum optimalnya sistem pengelolaan data statistik sektoral di tingkat produsen data. Selain itu masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama. OPD juga pengguna juga masih belum optimal dalam pemanfaatan data kependudukan dikarenakan data kependudukan yang diakses belum sesuai / sinkron dengan jenis pelayanan yang dilaksanakan di masing-masing OPD pengguna, yang hanya dapat Call NIK saja.

d) Kebutuhan Pemerataan Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Manusia Penunjang Pelayanan Publik dan Pemerintahan

Sarana dan prasana penunjang pelayanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Temanggung belum tersedia secara merata. Secara khusus kesenjangan terjadi terutama di daerah utara, dimana sarana dan prasaraa yang tersedia masih belum memadai. Adapun sarana prasarana yang masih belum merata tersebut diantaranya adalah sekolah dan fasilitas kesehatan. Selain itu terdapat tren perkembangan kesenjangan antara desa dan kelurahan melihat ketersediaan pembiayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Sumber daya manusia penunjang pelayanan publik dan pemerintahan juga belum tersedia secara merata baik kuantitas maupun kualitasnya di Kabupaten Temanggung.

e) Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar

Memperhatikan perkembangan kondisi sarana dan prasarana pelayanan dasar yang ada saat ini perlu upaya pemeliharaan dan perbaikan pada mayoritas sarana prasarana yang ada saat ini.

Mayoritas bangunan sarana prasarana dasar yang ada sudah berusia tua (di atas 20 tahun) dan banyak mengalami kerusakan. Kualitas sarana dan prasarana yang belum optimal dapat mengganggu pelayanan publik Kabupaten Temanggung jika tidak dibenahi.

f) Pengelolaan Aset Daerah yang Belum Optimal dan Bernilai Tambah Tinggi

Terdapat beberapa masalah yang ditemui terkait dengan pengelolaan aset di Kabupaten Temanggung. Masalah utama diantaranya adalah pendataan, regulasi, dan tata kelola yang mencakup pemeliharaan, peruntukan dan pendayagunaan yang belum optimal. Hingga saat ini pendataan terhadap aset-aset daerah masih belum optimal, utamanya disebabkan oleh ketersediaan dokumen pendukung legalitas yang belum tersedia dengan baik. Pengelolaan aset daerah Kabupaten Temanggung juga belum ditunjang dengan peraturan-peraturan atau regulasi penunjang, salah satunya terkait retribusi. Tata kelola yang ada juga masih menjadi tantangan melihat pemeliharaan aset yang belum optimal yang berdampak pada penurunan nilai aset, peruntukannya yang sering berubah fungsi seiring waktu, dan pendayagunaannya yang belum optimal sehingga belum mampu memiliki nilai tambah tinggi dan memberikan dampak yang signifikan bagi pendapatan daerah.

g) Peningkatan Pembangunan Perdesaan

Terdapat Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, menggambarkan kemandirian desa berdasarkan konsepsi bahwa desa maju mandiri mengedepankan pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan saling mengisi dalam menjaga potensi desa untuk menyejahterakan kehidupan desa.

Sampai dengan tahun 2023 tercatat baru 55 Desa dari total 266 Desa atau 20,68% yang masuk dalam kategori Desa Mandiri. Untuk itu ke depan perlu terus ditingkatkan kemajuan dan kemandirian desa dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dinyatakan mandiri diantaranya jika memiliki ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur yang memadai dan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Sementara itu pengembangan infrastruktur daerah perlu dioptimalkan dalam

memenuhi infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antarwilayah menghubungkan desa dengan kota sebagai kluster pertumbuhan ekonomi.

2) Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Umum Jasa Publik

a) Kebutuhan Pengembangan Pasar Daerah

Pasar daerah merupakan sarana prasarana perdagangan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Saat ini pasar daerah menghadapi tantangan terkait perubahan gaya hidup masyarakat, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi perdagangan (e-commerce). Tantangan ini perlu disikapi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung mengingat posisi pasar sebagai sentra perdagangan, terutama bagi produk-produk lokal.

b) Kesadaran Masyarakat dan Penegakan Perda dan Perkada yang Masih Rendah

Pada Kabupaten Temanggung masih ditemukan tindak pelanggaran perda dan perkada yang dilakukan oleh masyarakat. Selain informasi yang belum secara menyeluruh diterima oleh masyarakat, kesadaran yang dimiliki juga masih menjadi tantangan.

c) Kebutuhan Peningkatan Keamanan Siber

Secara khusus terdapat kebutuhan peningkatan keamanan siber di Kabupaten Temanggung terutama terkait belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah dan belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian risiko. Hal tersebut diindikasikan melalui kompetensi SDM dalam bidang keamanan informasi yang masih minim. Selain itu peralatan dan aplikasi yang digunakan untuk bidang keamanan informasi masih minim. Pengujian kerentanan risiko yang dilaksanakan selama ini juga harus bekerjasama dengan Tim dari BSSN dan setahun hanya 4-5 aplikasi yang dapat diajukan. Sementara itu juga belum adanya standar pengelolaan keamanan dalam pembuatan aplikasi.

d) Kebutuhan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Saat ini seluruh perangkat daerah telah dilengkapi dengan website pelayanan informasi publik. Namun yang masih menjadi tantangan adalah mayoritas website tersebut hanya menyediakan layanan yang pasif dan cenderung kurang responsif. Website hanya menyajikan informasi, interaksi untuk menjawab keluhan dan kebutuhan masyarakat dirasakan belum optimal.

e) Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan yang Belum Terpadu

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, keterpaduan antara perencanaan dan pembiayaan masih menjadi tantangan. Perubahan regulasi menjadi salah satu tantangan dalam upaya menciptakan keterpaduan antara perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.

f) Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan yang Belum Sinkron

Saat ini di Kabupaten Temanggung masih terdapat masalah terkait sinkronisasi perencanaan sektoral dan kewilayahan. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan sektoral dengan kewilayahan, perencanaan *top down* dengan *bottom up* merupakan indikasi dari masalah tersebut. Proses musrenbang yang ada juga dipandang masih butuh pengembangan agar dapat membantu kegiatan perencanaan pembangunan secara efektif.

g) Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa untuk Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Pihak Eksternal

Kapasitas pembiayaan yang besar di desa perlu diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang mumpuni. Pada saat ini kapasitas kelembagaan di desa belum optimal dalam menunjang pembangunan desa, salah satunya adalah mengelola kapasitas pembiayaan besar untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah keengganan pemerintah desa dalam berkerja sama dengan pihak eksternal dalam pembangunan. Keterlibatan pihak eksternal yang kolaboratif dan *supportif* dibutuhkan oleh desa dalam membangun, agar manfaat yang didapat oleh masyarakat lebih tinggi.

h) Pemanfaatan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah Non Pajak yang Belum Optimal

Pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah non pajak masih belum optimal di Kabupaten Temanggung. Salah satu yang masih menjadi tantangan adalah tata kelola potensi aset yang masih belum berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Temanggung masih belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan yang potensial, salah satunya terhambat oleh dukungan regulasi yang belum memadai. Hal ini diakui menjadi pembatas gerak perangkat daerah terkait dalam mengidentifikasi sumber pendapatan yang potensial.

i) Kerentanan dan Ketergantungan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) merupakan kontributor terbesar pendapatan daerah Kabupaten Temanggung. Jumlah tersebut terus meningkat dalam dekade terakhir. Pada tahun 2016 TKDD berkontribusi sebanyak 66% terhadap pendapatan daerah Kabupaten Temanggung, lalu kemudian meningkat menjadi 77% pada tahun 2022. Meningkatnya kontribusi ini salah satunya mengindikasikan bahwa juga terjadi peningkatan ketergantungan pendapatan daerah kepada dana dari pemerintah pusat. Hal ini perlu diantisipasi Kabupaten Temanggung ke depan.

3.2 ISU STRATEGIS

3.2.1 Tren Pembangunan Global

Merujuk pada dokumen RPJPN 2025-2045 terdapat 10 megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren ini memiliki 2 sisi yang harus dikelola, yang pertama adalah potensi keamjuan bagi kondisi sosial dan ekonomi global, namun pada sisi lainnya merupakan disrupsi. Berikut adalah 10 megatren tersebut:

1) Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Terdapat beberapa isu penting terkait demografi global yaitu laju pertumbuhan penduduk dunia yang cenderung semakin melambat, perubahan kualitas keluarga akibat pergeseran demografi skala mikro, serta kecenderungan peningkatan konsentrasi penduduk dunia pada kawasan Asia dan Afrika.

2) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Peningkatan kewaspadaan global akibat konflik, persaingan geopolitik, kontestasi geopolitik, serta krisis di berbagai sektor merupakan beberapa tantangan terkait dinamika geopolitik global. Adapun peningkatan dominasi nilai *output* negara berkembang, sektor komoditas yang tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang, perkembangan institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang, potensi perkembangan teknologi dan ekonomi dari negara berkembang, serta potensi secara umum perekonomian global pada tahun 2050 yang meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2015 merupakan beberapa isu terkait geoekonomi.

3) Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai kehidupan masyarakat. Keperluan peningkatan kesiapan yang adaptif dari masyarakat terkait teknologi, akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor akibat pandemi, pengaruh teknologi terhadap sektor manufaktur, pengaruh perkembangan teknologi terhadap sektor pendidikan, potensi perubahan jenis pekerjaan akibat tergantikan oleh teknologi, percepatan adaptasi sektor ekonomi terhadap teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi untuk perumusan kebijakan merupakan beberapa isu terkait perkembangan teknologi.

4) Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang tidak memadai dan kurang terencana dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dapat memacu inovasi kawasan perkotaan dalam menyelesaikan masalah

5) Konstelasi Perdagangan Global

Terdapat beberapa isu terkait perdagangan global diantaranya adalah pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global yang mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika, kolaborasi produksi bersama internasional dan rantai pasok global semakin kuat dan terdiversifikasi, dampak kecepatan perubahan teknologi dan digital terhadap perdagangan internasional, serta perkembangan *hub* perdagangan strategis sebagai produk kerja sama kawasan.

6) Tata Kelola Keuangan Global

Potensi pergeseran dan perubahan struktur ekonomi dan demografi pada masa depan akan sangat mempengaruhi desain kebijakan fiskal global dan nasional. Terdapat beberapa isu terkait tata kelola keuangan global yaitu tren penggunaan *central bank digital curremcy* yang semakin meningkat serta disrupsi akibat perkembangan teknologi dan digital terhadap industri jasa keuangan.

7) Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada tahun 2045 diprediksi akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% populasi dunia. Proporsi kelas

menengah yang semakin meningkat akan mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru serta kebutuhan konsumsi dan gaya hidup yang lebih beragam

8) **Persaingan Sumber Daya Alam**

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat pada masa mendatang akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk, semakin beragam kegiatan yang dilakukan, serta peningkatan kebutuhan sumber daya alam.

9) **Perubahan Iklim**

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Hal ini menyebabkan pada masa depan tantangan utamanya adalah bagaimana mempercepat implementasi pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon dalam kerangka kebijakan yang efektif. Selain itu pemanfaatan energi baru dan terbarukan juga perlu didorong

10) **Pemanfaatan Luar Angkasa**

Pada masa depan tren eksplorasi luar angkasa akan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya perekonomian antariksa secara global.

3.2.2 **Isu Pembangunan Nasional**

Merujuk pada dokumen RPJPN 2025-2045 terdapat beberapa isu pembangunan nasional yang saat ini dihadapi oleh Indonesia dan berpotensi mempengaruhi pembangunan hingga tahun 2045. Berikut adalah isu pembangunan tersebut:

Tabel 3.1
Isu Strategis Nasional

No	Isu Pembangunan Nasional	Tantangan Pembangunan
1.	Produktivitas Rendah	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2.	IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3.	Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4.	Pariwisata dibawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5.	Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut

No	Isu Pembangunan Nasional	Tantangan Pembangunan
6.	Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7.	Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8.	Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. <ul style="list-style-type: none"> • Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
9.	Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
10.	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketimpangan antar jawa dan luar jawa masih cukup tinggi b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat diberbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
11.	Pembangunan belum berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
12.	Tata Kelola pemerintahan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum

No	Isu Pembangunan Nasional	Tantangan Pembangunan
		<p>sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.</p> <p>i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan kedepan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.</p> <p>j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.</p> <p>k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.</p>
13.	Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	<p>a. Ditengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah</p> <p>b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar</p>
14.	Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	<p>a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan</p> <p>b. Permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik</p> <p>c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.</p> <p>d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis ke-pemiluan-an dan hubungan formal kelembagaan</p> <p>e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.</p> <p>f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.</p>

3.2.3 Isu Pembangunan Provinsi

Isu pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Transisi Demografi menuju penduduk usia tua;
- 2) SDM yang berdaya saing dan berkarakter (Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender);
- 3) Penerapan ekonomi Hijau yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkular, dan pengembangan pembiayaan hijau;
- 4) Hilirisasi, komoditas unggulan dan industri pada karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;

- 5) Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan;
- 6) Kemiskinan;
- 7) Ketimpangan antar wilayah (pembangunan pusat pertumbuhan yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas);
- 8) Dampak perubahan iklim;
- 9) Tata Kelola pemerintahan yang dinamis; dan
- 10) Kondusivitas wilayah.

3.2.4 Isu Pembangunan Perwilayahan (Gelang manggung)

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perwilayahan Gelang manggung (Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung) dalam periode pembangunan ke depan. Adapun isu strategis tersebut antara lain adalah

- 1) Kebutuhan pengembangan PSN Borobudur;
- 2) Kebutuhan konservasi Gunung Sindoro Sumbing; dan
- 3) Kebutuhan integrasi dan penguatan interaksi pengembangan sektor ekonomi unggulan (pertanian dan industri pertanian).

3.2.5 Isu Strategis Daerah

1) Transformasi Ekonomi yang Didukung Penguatan Konektivitas Antar Wilayah

Selama dekade terakhir ekonomi Kabupaten Temanggung telah mengalami perubahan dan perkembangan. Kondisi tersebut diprediksi akan tetap terjadi pada masa depan, dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasinya. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan tidak lagi menjadi kontributor utama terhadap PDRB, digantikan oleh Industri Pengolahan. Namun dilain sisi industri pengolahan juga mengalami tantangan terkait produktivitas dan nilai produk yang menghadapi stagnansi dan kerentanan akibat ketidakpastian pasar global. Sektor yang potensial untuk berkembang di masa depan seperti Ekonomi Kreatif, Pariwisata, UMKM, IKM juga belum tergarap dengan baik potensinya di Kabupaten Temanggung, diindikasikan dari kontribusinya terhadap perekonomian yang belum optimal walaupun jumlah unitnya semakin meningkat.

Transformasi yang ekonomi juga berkaitan dengan sistem konektivitas wilayah. Dalam konteks eksternal Kabupaten Temanggung perlu meningkatkan konektivitasnya untuk optimalisasi produktivitas yang dimiliki dalam upaya penguatan kapasitas berperan dalam sistem

kewilayahan. Peningkatan konektivitas dalam konteks internal diupayakan untuk mendorong peningkatan akses dan pengurangan kesenjangannya.

Tantangan pergeseran ekonomi juga dialami pada level nasional dan provinsi. Pada level nasional produktivitas rendah, IPTEKIN lemah, deindustrialisasi dini, performa pariwisata dan ekonomi laut yang belum optimal, serta kontribusi UMKM dan Koperasi yang belum optimal menjadi tantangan ke depan. Secara umum perekonomian di Indonesia dikhawatirkan mengalami penurunan performa akibat penurunan produktivitas, di sisi lain sektor-sektor potensial belum dioptimalkan dengan baik.

Adapun pada level provinsi perkembangan ekonomi akan diarahkan pada pengembangan ekonomi hijau dan hilirisasi komoditas unggulan dan industri. Hal ini merupakan respon dari sektor ekonomi saat ini yang masih belum berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi pelestarian lingkungan. Sementara itu hilirisasi komoditas unggulan dan industri merupakan upaya peningkatan nilai tambah dan penyerapan sumber daya lokal.

2) Perubahan Sosial Budaya Masyarakat

Perubahan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Temanggung ditandai dengan perubahan sosial demografis masyarakat, kualitas hidup masyarakat, dan penguatan lokalitas. Pada masa depan diprediksi akan terjadi pergeseran komposisi penduduk dimana penduduk usia non produktif akan lebih banyak. Perubahan interaksi sosial juga diprediksi akan terjadi pada masa depan salah satunya akibat dampak penggunaan sosial media. Kualitas hidup masyarakat Temanggung juga masih menjadi tantangan, terutama diindikasikan dari nilai Indeks Pembangunan Manusia yang masih lebih rendah. Pada masa depan perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia agar berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Seluruh perubahan tersebut perlu didukung dengan lokalitas yang kuat, sehingga nilai-nilai lokal Temanggung perlu dikuatkan dan diinternalisasikan dalam kegiatan pembangunan ke depan.

Pada level Nasional penurunan kualitas SDM, kemiskinan dan kapasitas penegakan hukum yang rendah merupakan isu yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Penurunan kualitas SDM diindikasikan dari kualitas pendidikan dan pelayanan sosial yang belum optimal sehingga belum mampu mendukung penciptaan SDM yang berdaya

saing. Kapasitas penegakan hukum tersebut terkait ketahanan sosial budaya juga belum diselenggarakan dengan optimal.

Adapun pada level Provinsi pergeseran demografis, SDM yang berdaya saing dan berkarakter, kemiskinan dan kondusivitas wilayah merupakan isu yang terkait perubahan sosial budaya masyarakat. Pergeseran demografis dimana penduduk usia non produktif semakin banyak, kualitas SDM yang belum mampu bersaing dan memiliki wawasan baik menjadi tantangan. Selain itu pengetasan kemiskinan melalui berbagai pelayanan sosial juga belum optimal.

3) Perubahan Lingkungan dan Iklim

Perubahan lingkungan dan iklim merupakan isu strategis bagi Kabupaten Temanggung ke depan dengan indikasi perubahan kualitas lingkungan, perubahan iklim dan keterbatasan SDA. Perubahan kondisi lingkungan seperti perubahan guna lahan, penurunan produktivitas lahan, serta kebutuhan pelayanan lingkungan merupakan tantangan yang perlu diantisipasi kedepannya. Perubahan iklim yang semakin masif kemudian diantaranya berdampak bagi penurunan produktivitas pertanian pangan dan peningkatan bencana akibat iklim seperti puting beliung, banjir dan kekeringan. Kemungkinan perubahan tersebut belum didukung dengan kapasitas kelembagaan dan penanganan yang baik, salah satunya adalah penerapan proklamasi yang belum optimal.

Pada level Nasional, pembangunan kedepan diarahkan untuk menjadi pembangunan yang lebih berkelanjutan, kaitannya dengan lingkungan dan iklim. Saat ini pembangunan yang ada belum mencapai berkelanjutan yang baik sehingga diprediksi tidak dapat terus memberikan nilai tambah yang sama pada masa depan. Dengan jumlah penduduk yang semakin banyak dan ketersediaan sumber daya yang terbatas, pembangunan berbasis keberlanjutan perlu dilakukan.

Isu terkait perubahan iklim juga menjadi isu pada level Provinsi. Provinsi Jawa Tengah saat ini mengalami berbagai masalah terkait perubahan iklim seperti banjir rob di pantai utara dan kekeringan di beberapa lokasi. Pembangunan berketahanan iklim menjadi orientasi pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

4) Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Saat ini masih terdapat kendala terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dan berpotensi akan tetap menjadi tantangan bagi Kabupaten Temanggung ke depan. Sarana prasarana dan SDM penunjang pelayanan publik, perencanaan pembangunan yang belum terpadu dan sinkron, dan perubahan kapasitas pembiayaan daerah. Tantang ke depan seperti kebutuhan pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman serta tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis kemudian menjadi tantangan bagi Kabupaten Temanggung. Selain itu ketergantungan yang tinggi terhadap aliran dana dari pemerintah pusat juga menjadi tantangan bagi Kabupaten Temanggung kedepannya, agar kemampuan pembiayaan daerah lebih mandiri.

Isu tata kelola pemerintahan juga menjadi tantangan pada level Nasional. Regulasi, pelayanan publik, kapasitas pembiayaan dan tata kelola organisasi pemerintah yang belum optimal menjadi masalah yang saat ini dihadapi oleh pembangunan nasional. Kondisi ini membutuhkan reorientasi kedepan untuk menghadapi tantang pembangunan pada masa depan.

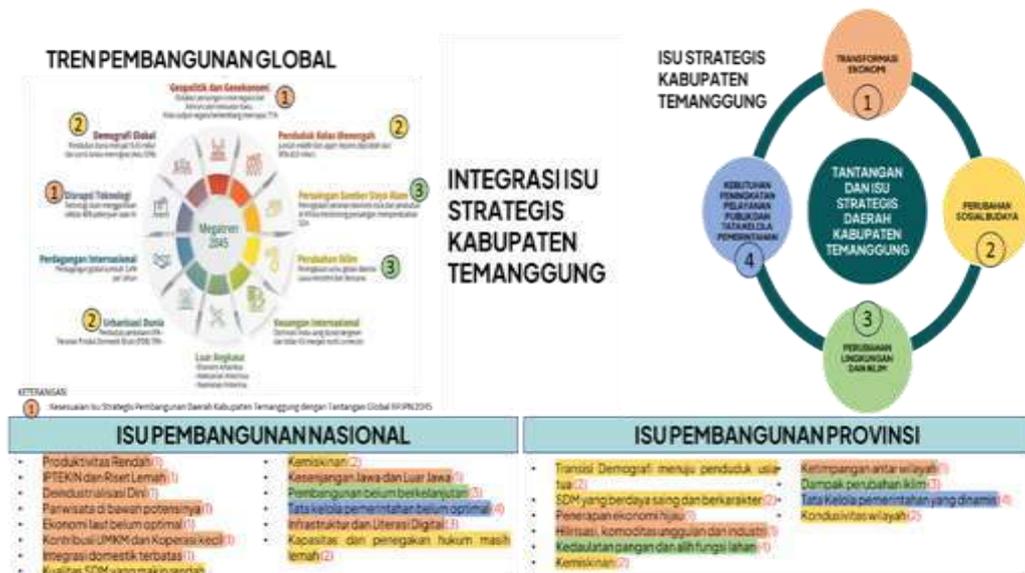
Pada level Provinsi Jawa Tengah isu terkait tata kelola pemerintah sudah diorientasikan kepada tata kelola yang dinamis. Saat ini tata kelola pemerintahan cenderung statis dan justru menghambat performa pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang ada saat ini juga masih belum adaptif sehingga belum banyak memberikan nilai tambah bagi pembangunan. Berikut ini disajikan tabel rumusan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Temanggung:

Tabel 3.2
Tren Pembangunan Global, Isu Pembangunan Nasional, Isu Pembangunan Provinsi, Isu Pembangunan Perwilayahan dan Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2045

Tren Pembangunan Global	Isu Pembangunan Nasional	Isu Pembangunan Provinsi	Isu Pembangunan Perwilayahan	Isu Strategis Daerah
Geopolitik dan Geoekonomi	Produktivitas Rendah	Penerapan ekonomi Hijau yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkulan, dan pengembangan pembiayaan hijau	Kebutuhan pengembangan PSN Borobudur	Transformasi Ekonomi yang Didukung Penguatan Konektivitas Antar Wilayah
Keuangan Internasional	IPTEKIN dan Riset Lemah		Kebutuhan integrasi dan penguatan interaksi pengembangan sektor ekonomi unggulan (pertanian dan industri pertanian)	
Perdagangan Internasional	Deindustrialisasi Dini			
Luar Angkasa	Pariwisata dibawah Potensinya			
Disrupsi Teknologi	Ekonomi laut belum optimal Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Hilirisasi, komoditas unggulan dan industri pada karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi		

Tren Pembangunan Global	Isu Pembangunan Nasional	Isu Pembangunan Provinsi	Isu Pembangunan Perwilayahan	Isu Strategis Daerah
	<p>Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah</p> <p>Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa</p> <p>Integrasi domestik terbatas</p>	<p>ekspor</p> <p>Ketimpangan antar wilayah (pembangunan pusat pertumbuhan yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas)</p>		
<p>Penduduk Kelas Menengah</p> <p>Demografi Global</p>	<p>Kualitas SDM yang makin rendah</p> <p>Kemiskinan</p> <p>Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah</p>	<p>Transisi Demografi menuju penduduk usia tua</p> <p>SDM yang berdaya saing dan berkarakter (Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender).</p> <p>Kemiskinan</p> <p>Kondusivitas wilayah</p>		Perubahan sosial budaya masyarakat
<p>Persaingan Sumber Daya Alam</p> <p>Perubahan Iklim</p> <p>Urbanisasi Dunia</p>	<p>Pembangunan belum berkelanjutan</p>	<p>Penerapan ekonomi Hijau Yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkulan, dan pengembangan pembiayaan hijau</p> <p>Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan</p> <p>Dampak perubahan iklim</p>	<p>Kebutuhan konservasi Gunung Sindoro Sumbing</p>	Perubahan Lingkungan dan Iklim
<p>Geopolitik dan Geoekonomi</p>	<p>Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa</p> <p>Tata Kelola pemerintahan belum optimal</p>	<p>Ketimpangan antar wilayah (pembangunan pusat pertumbuhan yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas)</p> <p>Tata Kelola pemerintahan yang dinamis</p>	<p>Kebutuhan pengembangan PSN Borobudur</p> <p>Kebutuhan konservasi Gunung Sindoro Sumbing</p> <p>Kebutuhan integrasi dan penguatan interaksi pengembangan sektor ekonomi unggulan (pertanian dan industri pertanian)</p>	<p>Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan</p>

Keterkaitan isu strategis daerah Kabupaten Temanggung dengan trend global, isu pembangunan nasional dan provinsi diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Hasil analisis, Tahun 2023

Gambar 3.2
Padanan Isu Strategis Kabupaten Temanggung dengan Isu Pembangunan Nasional dan Provinsi

3.2.6 Integrasi Isu Strategis Daerah RPJPD Kabupaten Temanggung dengan Isu Strategis KLHS dan RTRW

1) Transformasi Ekonomi yang Didukung Penguatan Konektivitas Antar Wilayah

Terdapat beberapa isu strategis KLHS yang sesuai dengan isu transformasi ekonomi pada RPJPD. Isu tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing tenaga kerja, kesempatan kerja dan usaha, serta diversifikasi ekonomi masih rendah. Isu peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing tenaga kerja, kesempatan kerja dan usaha berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya kesenjangan. Adapun isu diversifikasi ekonomi masih rendah berkaitan dengan tujuan energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

Isu transformasi ekonomi pada RPJPD juga berkaitan dengan isu strategis pada RTRW. Pada isu strategis RTRW terdapat 3 isu yang berkaitan dengan isu strategis RPJPD yaitu Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pengembangan Industri Berbahan Baku Lokal, dan Pelestarian Kebudayaan Dan Optimalisasi Pariwisata.

2) Perubahan Sosial Budaya

Terdapat beberapa isu strategis KLHS yang sesuai dengan perubahan sosial budaya masyarakat pada RPJPD. Isu tersebut adalah (1) Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Mutu Layanan

Kesehatan Daerah, (2) Upaya Pemberantasan Kemiskinan dan Kesenjangan yang Belum Optimal, (3) Peningkatan Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan, serta (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing tenaga kerja, kesempatan kerja dan usaha. Isu tersebut berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya kesenjangan. Isu perubahan sosial budaya masyarakat pada RPJPD juga berkaitan dengan isu strategis pada RTRW. Pada isu strategis RTRW terdapat 1 isu yang berkaitan dengan isu strategis RPJPD yaitu Pelestarian Kebudayaan dan Optimalisasi Pariwisata.

3) Perubahan Lingkungan dan Iklim

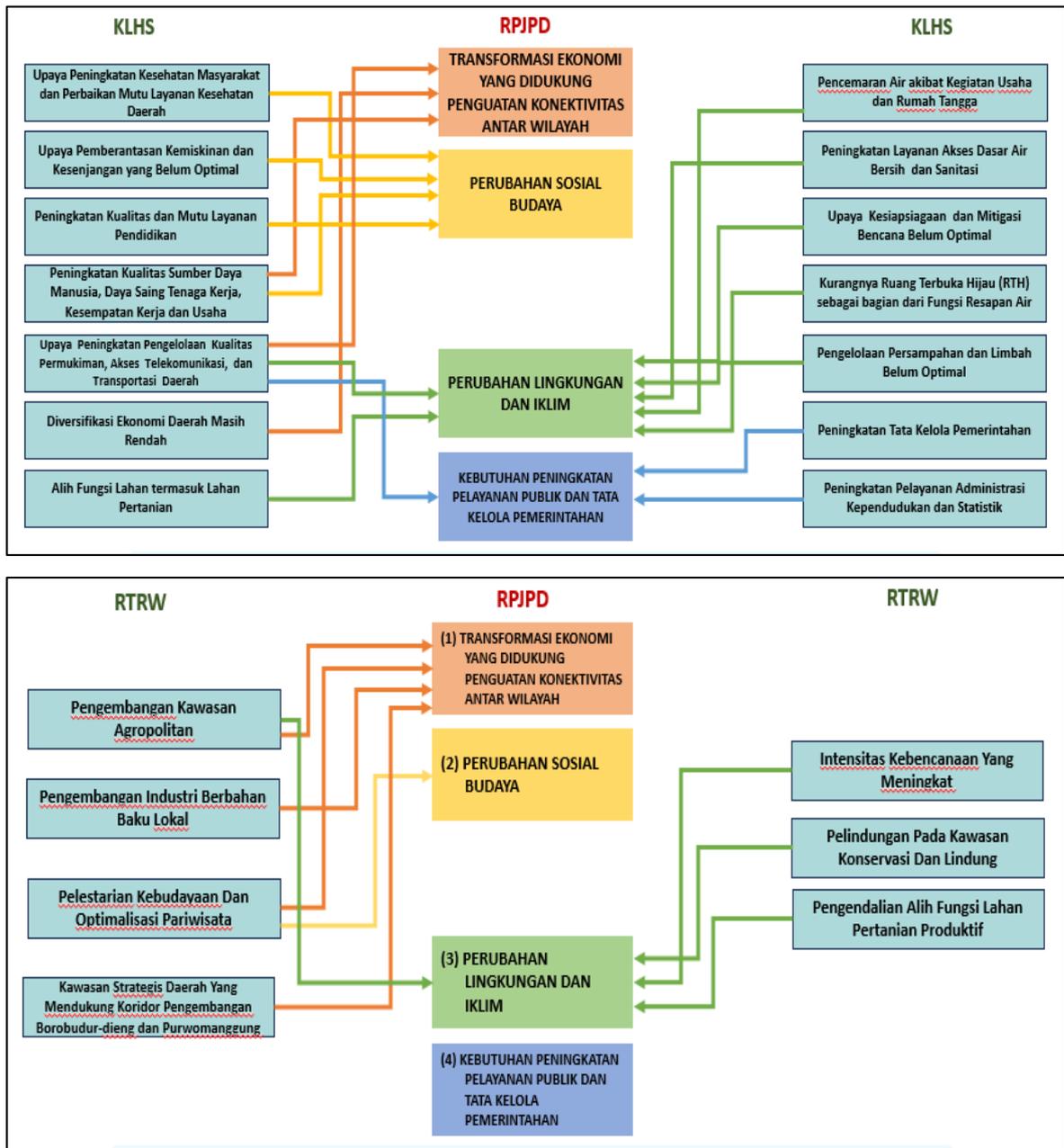
Terdapat banyak isu strategis KLHS yang sesuai dengan isu perubahan lingkungan dan iklim pada RPJPD. Isu tersebut antara lain (1) Upaya Peningkatan Pengelolaan Kualitas Permukiman, Akses Telekomunikasi, dan Transportasi Daerah, (2) Alih Fungsi Lahan termasuk Lahan Pertanian, (3) Pencemaran Air akibat Kegiatan Usaha dan Rumah Tangga, (4) Peningkatan Layanan Akses Dasar Air Bersih dan Sanitasi, (5) Upaya Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Belum Optimal, (6) Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari Fungsi Resapan Air, dan (7) Pengelolaan Persampahan dan Limbah Belum Optimal. Isu tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu air bersih dan sanitasi layak, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan dan perubahan iklim, ekosistem daratan, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Isu perubahan lingkungan dan iklim juga banyak berkaitan dengan isu strategis RTRW. Isu tersebut antara lain adalah Pengembangan Kawasan Agropolitan, Intensitas Kebencanaan Yang Meningkat, Pelindungan Pada Kawasan Konservasi Dan Lindung, serta Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif.

4) Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Terdapat 2 isu strategis KLHS yang sesuai dengan isu kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yaitu (1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, dan (2) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Statistik. Isu tersebut berkaitan dengan

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.



Sumber: Hasil analisis, Tahun 2023

Gambar 3.3 Padanan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Temanggung dengan Isu KLHS dan RTRW



BAB IV

VISI DAN MISI

DAERAH

Memuat visi dan misi daerah
Kabupaten Temanggung



BAB IV

VISI DAN MISI

4.1 VISI DAERAH

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi RPJPD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi RPJPD memiliki beberapa kriteria, yaitu: (1) menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*); (2) menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang; (3) menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan “kompetitif” yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan (4) menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

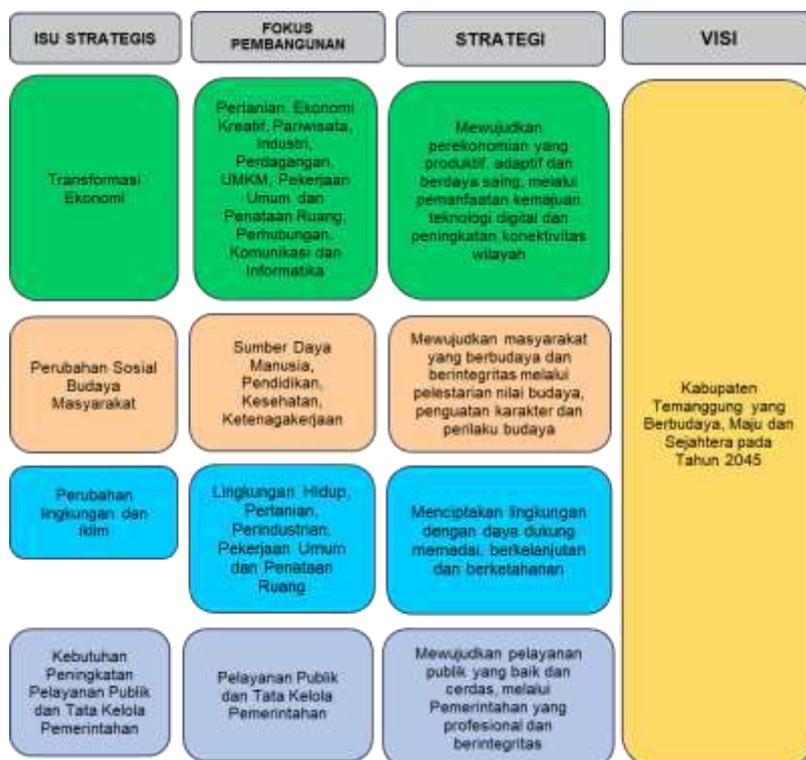
4.1.1. Rumusan Visi Daerah

Visi daerah dalam RPJPD disimpulkan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan Pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan berbagai proyeksi yang disusun secara logis sampai Tahun 2045. Perumusan visi daerah dalam rancangan RPJPD Kabupaten Temanggung dilakukan melalui tahapan penjaringan aspirasi masyarakat

melalui *google form*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pembahasan dengan perangkat daerah dengan memperhatikan RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045, Rekomendasi Visi KLHS RPJPD Kabupaten Temanggung, dan Tujuan Penataan Ruang RTRW Kabupaten Temanggung. Berikut terlampir adalah perumusan visi berdasarkan permasalahan pokok.

Tabel 4.1
Rumusan Pernyataan Visi Kabupaten Temanggung 2045

N	Permasalahan Pokok	Pokok Visi	Pernyataan Visi
-	Produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi belum optimal	Produktif, Berdaya Saing, dan Adaptif	Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045
-	Perkembangan investasi dan industri yang memiliki rantai nilai lokal rendah		
-	Belum optimalnya sektor ekonomi potensial (UMKM, Pariwisata, Pasar Daerah, Ekonomi Kreatif, dll)		
-	Iklim investasi yang belum berorientasi pasar		
-	Kemajuan Teknologi dan Digital yang sangat pesat, belum dikembangkan secara optimal		
-	Kebutuhan Peningkatan Konektivitas Wilayah		
-	Perkembangan proporsi penduduk usia non produktif semakin banyak	Sejahtera dan Berbudaya	
-	Kualitas hidup dan sumber daya manusia yang belum berkembang optimal	Daya Dukung Lingkungan, Berkelanjutan dan Berketahanan	
-	Pelestarian dan pengembangan nilai budaya serta internalisasi nilai budaya belum optimal		
-	Pemulihan kualitas lingkungan hidup		
-	Keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya alam	Baik dan Cerdas (<i>Good and Smart</i>)	
-	Ketahanan terhadap perubahan iklim ekstrem dan kebencanaan		
-	Penyediaan sarana prasana dan sumber daya manusia penunjang pelayanan publik yang merata		
-	Terpadunya perencanaan dan proses penganggaran		
-	Optimalnya sinkronisasi perencanaan sektoral dan kewilayahan		
-	Kapasitas Pembiayaan Daerah yang lebih mandiri		



Gambar 4.1
Rumusan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045
Berdasarkan Isu Strategis

Penjelasan visi Kabupaten Temanggung Tahun 2045 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Penjelasan Visi Kabupaten Temanggung 2045

Pernyataan Visi	Penjelasan
Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045	Berbudaya dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada pembentukan sistem sosial budaya yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan masyarakat melalui pelestarian nilai budaya, penciptaan masyarakat dengan karakter dan perilaku budaya yang kuat, pelayanan publik yang baik dan cerdas dengan budaya profesional dan berintegritas, serta lingkungan dengan daya dukung memadai, berkelanjutan dan berketahanan
	Maju dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada penciptaan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dengan nilai tambah dan rantai nilai lokal yang tinggi, adaptif terhadap perubahan dengan orientasi investasi terhadap pasar, ditunjang dengan teknologi, digital dan konektivitas yang optimal mendukung produktivitas wilayah
	Sejahtera dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, didukung oleh sumber daya manusia yang berkembang dan optimal.

Pada proses penyusunan visi, dokumen RPJPD Kabupaten Temanggung juga perlu mempedomani visi dokumen perencanaan vertikal

yaitu RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi. Berikut adalah integrasi visi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi.

Tabel 4.3
Padanan Visi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan Visi RPJP Nasional dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah

Visi Kabupaten Temanggung	Visi Provinsi Jawa Tengah	Visi Nasional
Berbudaya	Sejahtera	Berdaulat
	Berbudaya	Maju
	Berkelanjutan	Berkelanjutan
Maju	Penumpu Pangan dan Industri Nasional	Berdaulat
	Maju	Maju
Sejahtera	Sejahtera	Berdaulat
		Maju

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Data Diolah, 2023

Tabel 4.4
Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah		Visi RPJPD Kabupaten/ Kota	
Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan		Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045	
a.	Maju, meliputi substansi:	a.	Maju, meliputi substansi:
-	Daya saing	-	berdaya saing,
-	Modern	-	Berbasis teknologi
-	Inovatif	-	Produktif
-	Mandiri		
-	Tangguh		Adaptif
-	Aman		
b.	Sejahtera, meliputi substansi:	b.	Sejahtera, meliputi substansi
-	Terpenuhi Kebutuhan dasarnya	-	peningkatan kualitas hidup masyarakat
-	Memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan		melalui pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial
			berkelanjutan dan berketahanan
c.	Berbudaya, meliputi substansi:	c.	Berbudaya, meliputi substansi:
	Berkarakter kuat		berkarakter
	Menjaga Etika dan Norma		berintegritas
	Mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor		berbudaya
d.	Berkelanjutan, meliputi substansi:	d.	Berbudaya, meliputi substansi
	Kelestarian sumber Daya alam dan lingkungan hidup		daya dukung lingkungan hidup
	Risiko bencana		berkelanjutan dan berketahanan
c.	Tema khusus:		

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Visi RPJPD Kabupaten/ Kota
Penumpu pangan dan industri nasional	

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Data Diolah, 2024

Visi Berbudaya Kabupaten Temanggung selaras dengan visi Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dari RPJPN, serta selaras dengan visi Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Visi Maju RPJPD Kabupaten Temanggung selaras dengan visi Berdaulat RPJPN yang mencakup Ketahanan, Kesatuan, dan Mandiri, dan visi Maju yang mencakup Berdaya, Modern, Tangguh, Inovatif dan Adil, serta selaras dengan visi Mandiri, Maju, dan Sejahtera dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Adapun visi Sejahtera RPJPD selaras dengan visi Berdaulat dan Maju RPJPN, serta selaras dengan visi Sejahtera RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Selain keselarasan dengan dokumen vertikal, visi RPJPD juga perlu selaras dengan visi KLHS dan RTRW. Berikut adalah integrasi visi RPJPD dengan visi KLHS dan tujuan penataan ruang RTRW:

Tabel 4.5
Padanan Visi RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045
dengan Visi Rekomendasi KLHS dan Tujuan RTRW
Kabupaten Temanggung

Visi Rekomendasi KLHS	Visi Kabupaten Temanggung	Tujuan RTRW
Berkeadilan	Berbudaya	Mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
Berkelanjutan		
Berintegritas		
Bestari		
Berdaya saing	Maju	
Berkeadilan		
Berkelanjutan		
Berkeadilan	Sejahtera	
Berkelanjutan		
Bestari		

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Data Diolah, 2023.

Visi Sejahtera RPJPD Kabupaten Temanggung selaras dengan visi rekomendasi KLHS yaitu Berdaya Saing, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berintegritas, dan Bestari. Visi Berbudaya selaras dengan visi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berintegritas dan Bestari. Visi Maju selaras dengan visi Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berkelanjutan. Adapun Visi Sejahtera selaras dengan visi Berkeadilan, Berkelanjutan dan Bestari. Adapun tujuan

penataan ruang pada RTRW secara umum selaras dengan visi Sejahtera, Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

4.1.2. Sasaran Utama Visi

Pencapaian Visi Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045 tercermin dalam Sasaran Utama Visi sebagai berikut:

1) Peningkatan Pendapatan Perkapita

Peningkatan pendapatan perkapita mendukung pencapaian Sasaran Visi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan pendapatan perkapita didorong melalui peningkatan pembangunan sektor strategis seperti pertanian, industri, dan pariwisata yang diukur melalui indikator PDRB per kapita.

2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Visi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan indikator tingkat kemiskinan dan indeks gini.

3) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, peningkatan daya saing sumber daya manusia didorong dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 4.6
Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

No	Sasaran Utama Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2025-2039	2040-2045
1	Peningkatan pendapatan perkapita	PDRB per kapita	Juta Rupiah	38,70	44,73	89,46	134,19	178,92
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,70-9,00	6,45-6,75	4,2-4,5	1,95-2,25	0,00-0,46
3	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	IPM	Angka	72,76	74,57	76,38	78,19	80

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Data Diolah, 2024.

Upaya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045 dilakukan dengan mewujudkan 6 (enam) Misi pembangunan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rumusan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

Pernyataan Visi	Pokok Visi	Misi
Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045	Berbudaya	1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya
	Baik dan Cerdas (<i>Good and Smart</i>)	2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas
	Daya Dukung Lingkungan, Berkelanjutan dan Berketahanan	3. Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan
	Produktif, Adaptif, dan Berdaya Saing	4. Mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing
		5. Mengembangkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah
	Sejahtera	6. Mewujudkan masyarakat sejahtera

Misi 1. Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya

Membentuk masyarakat yang berbudaya merupakan hal mendasar dalam pembangunan daerah. Perkembangan teknologi yang cukup pesat menjadi ancaman lunturnya nilai budaya masyarakat. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya diharapkan akan meningkatkan pembangunan kebudayaan, kualitas keluarga dan kerukunan umat beragama. Dengan membangun dan memelihara masyarakat yang berbudaya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, kreatif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas membutuhkan komitmen yang kuat dari segenap unsur Pemerintah Daerah, serta dukungan dari masyarakat. Tuntutan agar birokrasi menjadi lebih dinamis dan mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga integritasnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 3. Mewujudkan Lingkungan yang Memiliki Daya Dukung Memadai, Berketahanan dan Berkelanjutan

Merupakan upaya menciptakan kondisi agar ekosistem dan sumber daya alam dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Lingkungan yang berketahanan berarti memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi, seperti perubahan iklim, fluktuasi cuaca, atau gangguan alam lainnya. Lingkungan hidup yang berkelanjutan diwujudkan dengan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan, tidak meningkatkan ketimpangan sosial, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Adaptif dan Berdaya Saing

Peningkatan produktivitas ekonomi daerah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien melalui pengembangan industri, pertanian, pariwisata, dan sektor potensial lainnya dengan menggunakan sumber daya secara optimal menuju perwujudan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Perwujudan ekonomi biru di Kabupaten Temanggung menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya perikanan darat yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem air tawar. Perwujudan ekonomi hijau di Kabupaten Temanggung menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Perekonomian daerah yang berdaya saing mencakup pengembangan keunggulan kompetitif di sektor-sektor kunci, peningkatan infrastruktur, inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil.

Misi 5. Mengembangkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Digital dan Peningkatan Konektivitas Wilayah

Pengembangan pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, pariwisata, dan pelayanan publik lainnya. Peningkatan konektivitas wilayah mencakup pembangunan infrastruktur baik jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan.

Misi 6. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dilakukan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, kompetensi sumber daya manusia, dan penyerapan tenaga kerja, serta menurunkan ketimpangan ekonomi – sosial.

Pada proses penyusunan Misi tersebut, dokumen RPJPD Kabupaten Temanggung juga telah mempedomani Misi Pembangunan pada RPJPD Provinsi. Berikut adalah integrasi Misi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan RPJPD Provinsi.

Tabel 4.8
Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Misi RPJPD Kabupaten Temanggung
Transformasi sosial	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya
Transformasi ekonomi	Mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing
	Mengembangkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah
Transformasi tata kelola	Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing
	Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan
	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya
Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mengembangkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah
Sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	Mengembangkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah
	Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan
Kestinambungan pembangunan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera
	Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan

Sumber: Bappeda Temanggung Data Diolah, 2024



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pada bagian ini memuat arah kebijakan dalam periode 5 tahunan dalam satuan tahapan pembangunan, sasaran pokok, dan indikator pembangunan



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Dengan kata lain arah kebijakan adalah prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Arah kebijakan di Kabupaten Temanggung di selaraskan dengan arah kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah, dimana Kabupaten Temanggung termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Gelangmanggung. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta untuk mendorong kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten yang mendukung koridor pengembangan Borobudur-Dieng dan Gelangmanggung meliputi:

- a. Mengendalikan pertumbuhan di Kawasan sepanjang koridor jalan nasional dan provinsi;
- b. Mengoptimalkan pengembangan Kawasan Pariwisata;
- c. Mengoptimalkan pengembangan Kawasan Agropolitan;
- d. Mengoptimalkan pengembangan minapolitan;
- e. Melestarikan Kawasan Cagar Budaya; dan
- f. Meningkatkan perlindungan Kawasan Lindung

Arah kebijakan di Kabupaten Temanggung diselaraskan dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung, dimana sebagai daerah penyangga maka Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mendukung dan melindungi daerah sekitar, baik dalam konteks lingkungan, ekonomi, maupun sosial maka konservasi lahan kritis di area hulu (Sumbing, Sindoro, Pahu) menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyusunan konsep penanganan lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung bersama dengan BPDAS Serayu Opak

Progo, BPDAS Pemali Jratun Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, Perum Perhutani, DKPPP, dan DPUPT agar program yang dijalankan berjalan sinergis dan saling melengkapi;

- b. Pembaharuan data inventarisasi lahan kritis minimal sekali dalam 5 tahun;
- c. Pembaruan perhitungan daya dukung dan daya tampung berbasis jasa lingkungan minimal sekali dalam 5 tahun;
- d. Melaksanakan upaya konservasi dan rehabilitasi, baik secara vegetatif berupa penanaman pohon, teknis berupa bangunan, maupun melalui pendekatan budaya;
- e. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung;
- f. Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Kabupaten;
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani agar lahan yang dikelola sesuai dengan kaidah konservasi, sehingga lahan tetap produktif dan meningkatkan kesejahteraan petani tanpa merusak lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung
Tahun 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN			
	PENYIAPAN DAN Penguatan Pondasi Transformasi 2025-2029	AKSELERASI TRANSFORMASI 2030-2034	PEMANTAPAN TRANSFORMASI 2035-2039	PERWUJUDAN VISI TEMANGGUNG 2045: BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA 2040-2045
Penguatan nilai budaya di Dalam aktivitas kehidupan masyarakat	Pembentukan karakter masyarakat	Akselerasi penguatan karakter masyarakat	Pemantapan karakter masyarakat melalui habituasi nilai-nilai budi pekerti dimulai dari keluarga dan satuan pendidikan formal dan non formal	Perwujudan karakter masyarakat berbudaya dan berbudi pekerti luhur
Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung pelayanan publik	Diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Diarahkan pada akselerasi reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Diarahkan pada pemantapan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Diarahkan pada perwujudan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana	Peningkatan kapasitas dan kebijakan pelayanan lingkungan, sumber daya alam,	Implementasi kebijakan pelayanan lingkungan, sumber daya alam, mitigasi	Pengendalian dan pengawasan pelayanan lingkungan, sumber daya alam, mitigasi	Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN			
	PENYIAPAN DAN PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI 2025-2029	AKSELERASI TRANSFORMASI 2030-2034	PEMANTAPAN TRANSFORMASI 2035-2039	PERWUJUDAN VISI TEMANGGUNG 2045: BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA 2040-2045
dan dampak perubahan iklim	mitigasi bencana, dan dampak perubahan iklim	bencana, dan dampak perubahan iklim	bencana, dan dampak perubahan iklim	
Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi	Diarahkan pada penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Temanggung, penguatan ekonomi kreatif, didukung dengan penguatan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi	Diarahkan pada akselerasi produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Temanggung, akselerasi ekonomi kreatif, didukung dengan akselerasi daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi	Diarahkan pada pemantapan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Temanggung, pemantapan ekonomi kreatif, didukung dengan pemantapan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi	Diarahkan pada perwujudan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Temanggung, perwujudan ekonomi kreatif, didukung dengan perwujudan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi
Penguatan akses dan konektivitas wilayah untuk menunjang sistem keterkaitan wilayah	Peningkatan kapasitas dan instrumen kebijakan infrastruktur wilayah didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang	Pemerataan infrastruktur wilayah didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkelanjutan didukung dengan perwujudan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang
Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial	Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial diarahkan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Akselerasi dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial diarahkan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Pemantapan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial diarahkan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Perwujudan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial diarahkan sesuai dengan standar pelayanan minimal

Sumber: Bappeda Temanggung Data Diolah, 2023

Penyusunan periode dan tema RPJPD Kabupaten Temanggung tersebut telah diselaraskan dengan periode dan tema pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah integrasi Misi RPJPD Kabupaten Temanggung dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5.2
Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kabupaten Temanggung dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Periode	Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Tema RPJPD Kabupaten Temanggung
2025-2029	Penguatan Landasan Transformasi	Penyiapan dan Penguatan Fondasi
2030-2034	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Transformasi
2035-2039	Pemantapan Transformasi	Pemantapan Transformasi (Pengembangan kapasitas dan skala)
2040-2045	Perwujudan Visi	Perwujudan Visi

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Data Diolah, 2024

Adapun arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Temanggung tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Periode Pertama Pembangunan (Tahun 2025-2029) Kabupaten Temanggung diarahkan pada tahapan **Penyiapan dan Penguatan Fondasi Transformasi**, yang meliputi arah kebijakan:

1) Penguatan Nilai Budaya didalam Aktivitas Kehidupan Masyarakat

Penguatan nilai budaya didalam aktivitas kehidupan masyarakat tahun 2025-2029 difokuskan pada tahap **internalisasi**.

Internalisasi dalam penguatan nilai budaya merujuk pada proses di mana nilai-nilai budaya organisasi atau masyarakat diintegrasikan ke dalam perilaku, kebijakan, dan praktik sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya dihargai tetapi juga dilaksanakan secara konsisten dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Internalisasi diarahkan pada:

- Peran keluarga dalam pembangunan karakter budi pekerti;
- Pendidikan karakter di satuan pendidikan formal dan non formal;
- Nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Pemerataan dan Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik

Pemerataan dan Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik tahun 2025-2029 difokuskan pada tahap **peningkatan produktivitas aparatur dan pemenuhan sarana prasarana**.

Pondasi awal untuk reformasi birokrasi adalah langkah-langkah fundamental yang harus diambil untuk memulai proses perubahan yang signifikan dalam struktur, proses, dan budaya birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di sektor publik yang didukung oleh sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Pondasi awal untuk reformasi birokrasi diarahkan pada peningkatan produktivitas aparatur dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai.

Peningkatan produktivitas aparatur melalui pengembangan kompetensi, optimalisasi proses kerja, pengelolaan kinerja yang efektif, peningkatan lingkungan kerja, dan penerapan sistem akuntabilitas serta transparansi. Sehingga aparatur dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian tujuan organisasi atau pemerintahan.

3) Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim tahun 2025-2029 difokuskan pada tahap **peningkatan kapasitas dan kebijakan.**

Peningkatan kapasitas dan kebijakan dalam pelayanan lingkungan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, dilakukan melalui pengembangan SDM, infrastruktur, dan teknologi, serta penyusunan dan implementasi kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Peningkatan kapasitas dan kebijakan diarahkan pada:

- Sumber daya alam
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Penyediaan sanitasi dan air minum aman
- Ketahanan pangan
- Penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana

4) Penguatan Produktivitas dan Skala Ekonomi untuk Seluruh Sektor Ekonomi

Penguatan Produktivitas dan Skala Ekonomi untuk Seluruh Sektor Ekonomi tahun 2025-2029 difokuskan pada tahap **analisis dan perencanaan jaringan ekonomi serta skala ekonomi untuk seluruh sektor.**

Pemerintah melakukan analisis dan perencanaan jaringan ekonomi secara menyeluruh, untuk dapat memastikan pengelolaan sumber daya dengan efisien, meminimalkan risiko, dan mengoptimalkan hasil ekonomi untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang diarahkan pada Analisis dan perencanaan jaringan ekonomi serta skala ekonomi untuk seluruh sektor.

5) Penguatan Akses dan Konektivitas Wilayah untuk Menunjang Sistem Keterkaitan Wilayah

Penguatan Akses dan Konektivitas Wilayah untuk Menunjang Sistem Keterkaitan Wilayah tahun 2025-2029 difokuskan pada tahap **peningkatan kapasitas dan kebijakan.**

Peningkatan kapasitas dan kebijakan dalam penguatan akses dan konektivitas wilayah melibatkan pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi, penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas SDM, integrasi wilayah melalui koridor ekonomi, serta monitoring dan evaluasi proyek. Sehingga

diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan antar wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, yang diarahkan pada Peningkatan kapasitas dan kebijakan jalan, jembatan, sumber daya air, fasilitas keselamatan, angkutan umum, dan simpul transportasi serta konektivitas jaringan, dan jaringan komunikasi, rumah layak huni, kawasan permukiman, didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang yang mendukung penguatan peran serta dalam pengembangan wilayah Gelangmanggung dengan tarikan KSPN Borobudur, Perkotaan Magelang serta kawasan sekitarnya.

6) Penguatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial

Penguatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial tahun 2025-2029 difokuskan pada tahap **memenuhan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta penguatan ketahanan dan perlindungan sosial.**

5.1.2 Arah Kebijakan Tahun 2030-2034

Periode Kedua Pembangunan (tahun 2030-2034) Kabupaten Temanggung diarahkan pada tahapan **Akselerasi Transformasi**, yang meliputi arah kebijakan:

1) Penguatan Nilai Budaya didalam Aktivitas Kehidupan Masyarakat

Penguatan Nilai Budaya didalam Aktivitas Kehidupan Masyarakat tahun 2030-2034 difokuskan pada tahap **Implementasi.**

Implementasi penguatan nilai budaya adalah proses sistematis untuk menanamkan, memperkuat, dan memastikan penerapan nilai-nilai budaya yang penting dalam konteks organisasi, masyarakat, atau negara. Tujuan dari implementasi ini adalah agar nilai-nilai tersebut menjadi bagian integral dari operasi sehari-hari, keputusan strategis, dan interaksi sosial, serta membentuk karakter dan identitas yang konsisten dengan budaya yang diinginkan. Implementasi diarahkan pada:

- Peran keluarga dalam pembangunan karakter budi pekerti dalam lingkup keluarga maupun satuan pendidikan formal maupun non formal.
- Pendidikan karakter di satuan pendidikan formal dan non formal
- Nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat

2) Pemerataan dan Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik

Pemerataan dan Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik tahun 2030-2034 difokuskan pada tahap **Profesionalisme Aparatur**.

Untuk mencapai profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dilakukan melalui penerapan standar dan kode etik profesional, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas layanan, integritas dan akuntabilitas, pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi dan koordinasi, serta penegakan hukum dan regulasi.

3) Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim tahun 2030-2034 difokuskan pada tahap **Implementasi Kebijakan**.

Implementasi kebijakan dalam penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana, dan dampak perubahan iklim dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup peningkatan infrastruktur, penerapan teknologi ramah lingkungan, pendidikan masyarakat, pengelolaan risiko bencana, pembangunan infrastruktur resilien, pengurangan emisi, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam. Implementasi kebijakan diarahkan pada :

- Sumber daya alam
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Penyediaan sanitasi dan air minum aman
- Ketahanan pangan
- Penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana.

4) Penguatan Produktivitas dan Skala Ekonomi untuk Seluruh Sektor Ekonomi

Penguatan Produktivitas dan Skala Ekonomi untuk Seluruh Sektor Ekonomi tahun 2030-2034 difokuskan pada tahap **Implementasi awal dan penguatan kelembagaan untuk semua sektor ekonomi**.

Implementasi awal dan penguatan kelembagaan untuk semua sektor ekonomi dilakukan melalui penilaian kebutuhan, perumusan kebijakan, memperkuat struktur kelembagaan, serta meningkatkan kapasitas dan koordinasi, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5) Penguatan Akses dan Konektivitas Wilayah untuk Menunjang Sistem Keterkaitan Wilayah

Penguatan Akses dan Konektivitas Wilayah untuk Menunjang Sistem Keterkaitan Wilayah tahun 2030-2034 difokuskan pada tahap **Pemerataan infrastruktur**.

Pemerataan infrastruktur adalah upaya untuk memastikan bahwa akses terhadap infrastruktur penting seperti transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi sehingga dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang atau terpinggirkan. Pemerataan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kesenjangan antara wilayah. Pemerataan infrastruktur diarahkan pada Pemerataan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, fasilitas keselamatan, angkutan umum, dan simpul transportasi serta konektivitas jaringan, dan jaringan komunikasi, rumah layak huni, kawasan permukiman, didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang yang mendukung penguatan peran serta dalam wilayah pengembangan Gelangmanggung dengan tarikan KSPN Borobudur, Perkotaan Magelang serta kawasan sekitarnya.

6) Penguatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial

Penguatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial tahun 2030-2034 difokuskan pada tahap **Peningkatan sistem layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pemberdayaan sosial**.

Peningkatan sistem layanan pendidikan dan kesehatan dilakukan untuk memastikan akses yang lebih baik dan kualitas yang lebih tinggi dalam pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat dan lebih produktif.

Peningkatan pemberdayaan sosial dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, mandiri, dan sejahtera. Dengan memperkuat kapasitas individu dan komunitas, mengurangi ketimpangan, memperbaiki kualitas hidup, dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, pemberdayaan sosial berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang diarahkan pada

- Peningkatan sistem layanan pendidikan yang inklusif;
- Peningkatan sistem layanan dan kesehatan yang tangguh dan responsif;

- Peningkatan pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

5.1.3 Arah Kebijakan Tahun 2035-2039

Periode Ketiga Pembangunan (tahun 2035-2040) Kabupaten Temanggung diarahkan pada tahapan **Pemantapan Transformasi (Pengembangan kapasitas dan skala)**, yang meliputi arah kebijakan:

1. Penguatan Nilai Budaya didalam Aktivitas Kehidupan Masyarakat

Penguatan Nilai Budaya didalam Aktivitas Kehidupan Masyarakat tahun 2035-2039 difokuskan pada tahap **Habitulasi**.

Penerapan habituasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya diteruskan dari generasi ke generasi, menjaga identitas budaya dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan global yang terus berkembang. Habitulasi diarahkan pada:

- Peran keluarga dalam pembangunan karakter budi pekerti;
- Pendidikan karakter di satuan pendidikan formal dan non formal;
- Nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pemerataan dan Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik

Pemerataan dan Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik tahun 2035-2039 difokuskan pada tahap **peningkatan kinerja pemerintah daerah**.

Peningkatan kinerja pemerintah daerah dilaksanakan melalui kombinasi dari penguatan kapasitas aparatur, peningkatan transparansi, reformasi proses, dan peningkatan keterlibatan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim tahun 2035-2039 difokuskan pada tahap **Pengendalian dan Pengawasan**.

Pengendalian dan pengawasan pelayanan lingkungan penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara efektif, sesuai dengan regulasi, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pengendalian dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pelayanan lingkungan

yang ditetapkan telah dipatuhi untuk meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan.

Pengendalian dan pengawasan diarahkan pada:

1. Sumber daya alam;
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Penyediaan sanitasi dan air minum aman;
4. Ketahanan pangan; dan
5. Penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana.

4. Penguatan Produktivitas dan Skala Ekonomi untuk Seluruh Sektor Ekonomi

Penguatan Produktivitas dan Skala Ekonomi untuk Seluruh Sektor Ekonomi tahun 2035-2039 difokuskan pada tahap **ekspansi dan spesifikasi penguatan produktivitas dan skala ekonomi**.

Ekspansi dan spesifikasi penguatan produktivitas dan skala ekonomi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan kapasitas produksi. Inovasi teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, optimasi proses, dan pengelolaan rantai pasokan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas. Ekspansi produksi, diversifikasi produk, dan aliansi strategis dapat membantu mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Sehingga diharapkan sektor ekonomi dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi.

5. Penguatan Akses dan Konektivitas Wilayah untuk Menunjang Sistem Keterkaitan Wilayah

Penguatan Akses dan Konektivitas Wilayah untuk Menunjang Sistem Keterkaitan Wilayah tahun 2035-2039 difokuskan pada tahap **Peningkatan Infrastruktur**.

Peningkatan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan interkoneksi antar daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pengembangan wilayah yang merata. Konektivitas yang baik memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan orang dengan lebih efisien, serta memfasilitasi integrasi ekonomi regional.

Peningkatan infrastruktur diarahkan pada jalan, jembatan, sumber daya air, fasilitas keselamatan, angkutan umum, dan simpul transportasi serta konektivitas jaringan, dan jaringan komunikasi, jaringan listrik, rumah layak huni, kawasan permukiman, didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang didukung dengan penguatan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi yang

mendukung penguatan peran serta dalam wilayah pengembangan Gelangmanggung dengan tarikan KSPN Borobudur, Perkotaan Magelang serta kawasan sekitarnya.

6. Penguatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial

Penguatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial tahun 2035-2039 difokuskan pada tahap **peningkatan mutu pelayanan dasar pendidikan yang inklusif dan kesehatan dan kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.**

Pelayanan Dasar Pendidikan yang inklusif adalah yang penyediaan pendidikan berkualitas tinggi yang dapat diakses oleh semua siswa, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau tantangan yang mereka hadapi.

Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan adalah upaya untuk memastikan semua individu menerima pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi beban penyakit, dan memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Penguatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam pembangunan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa mereka berperan aktif dalam pembangunan sehingga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPS) tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dapat mengembangkan kapasitas diri, menjadi mandiri, dan berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

5.1.4 Arah Kebijakan Tahun 2040-2045

Periode Keempat Pembangunan (tahun 2040-2045) Kabupaten Temanggung diarahkan pada tahapan **Perwujudan Visi Temanggung 2045: Berbudaya, Maju dan Sejahtera**, yang meliputi arah kebijakan:

1. Penguatan Nilai Budaya didalam Aktivitas Kehidupan Masyarakat

Penguatan Nilai Budaya didalam Aktivitas Kehidupan Masyarakat tahun 2040-2045 difokuskan pada tahap **Aktualisasi.**

Aktualisasi dilakukan untuk mengintegrasikan dan memperkuat nilai-nilai budaya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuannya untuk melestarikan, mempromosikan, dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal yang memperkaya kehidupan masyarakat, sambil

memastikan bahwa budaya tersebut relevan dan bermanfaat dalam konteks modern mencakup aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Aktualisasi diarahkan pada :

- Peran keluarga dalam pembangunan karakter budi pekerti
- Pendidikan karakter di satuan pendidikan formal dan non formal
- Nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat

2. Pemerataan dan Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik

Pemerataan dan Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik tahun 2040-2045 difokuskan pada tahap **Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.**

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik memerlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan, memastikan aksesibilitas dan kemudahan, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan kecepatan, dan keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

3. Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

Penguatan Kualitas Pelayanan Lingkungan, Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim tahun 2040-2045 difokuskan pada tahap **Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.**

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien, berkelanjutan, dan adil, serta untuk melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan sehingga dapat tercapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

4. Penguatan Produktivitas dan Skala Ekonomi untuk Seluruh Sektor Ekonomi

Penguatan Produktivitas dan Skala Ekonomi untuk Seluruh Sektor Ekonomi tahun 2040-2045 difokuskan pada tahap **konsolidasi dan keberlanjutan penguatan produktivitas dan skala ekonomi.**

Konsolidasi dan keberlanjutan penguatan produktivitas dan skala ekonomi di semua sektor memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan penyelarasan strategi, investasi dalam infrastruktur dan teknologi, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta perhatian terhadap dampak lingkungan dan sosial. Dengan menerapkan

langkah-langkah ini secara konsisten, sektor-sektor ekonomi dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

5. Penguatan Akses dan Konektivitas Wilayah untuk Menunjang Sistem Keterkaitan Wilayah

Penguatan Akses dan Konektivitas Wilayah untuk Menunjang Sistem Keterkaitan Wilayah tahun 2040-2045 difokuskan pada tahap **perwujudan akses dan infrastruktur yang berkelanjutan.**

Perwujudan akses dan infrastruktur yang berkelanjutan adalah upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga terjaga keseimbangan antara perkembangan dan keberlanjutannya dengan diarahkan pada perwujudan akses dan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, fasilitas keselamatan, angkutan umum, dan simpul transportasi serta konektivitas jaringan, dan jaringan komunikasi, jaringan listrik, rumah layak huni, kawasan permukiman, didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang yang berkelanjutan yang mendukung penguatan peran serta dalam wilayah pengembangan Gelangmanggung dengan tarikan KSPN Borobudur, Perkotaan Magelang serta kawasan sekitarnya.

6. Penguatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial

Penguatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial tahun 2040-2045 difokuskan pada tahap yaitu:

Ekosistem pendidikan yang inovatif dan berdaya saing mengacu pada pengembangan lingkungan pendidikan yang tidak hanya menyediakan akses dan kualitas pendidikan yang tinggi tetapi juga mempromosikan inovasi dan daya saing di tingkat lokal, nasional, dan global. Ekosistem ini mencakup berbagai elemen yang saling terhubung, termasuk lembaga pendidikan, teknologi, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu pelayanan kesehatan yang mencakup berbagai aspek yang saling terkait (aksesibilitas, efektivitas, keamanan, kepuasan pasien, dan keberlanjutan).

Keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera, Mewujudkan keluarga yang berkualitas, berketahanan, dan sejahtera melalui pendekatan yang terintegrasi, melibatkan pendidikan, pengelolaan

ekonomi, dukungan sosial, kesehatan, dan regulasi yang mendukung.

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator- indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan penahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan dan telah mempedomani sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.3
Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Temanggung dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Provinsi Jawa Tengah			Kabupaten Temanggung		
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	CJ01	Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial	AP.14	Kesehatan untuk Semua
	CJ02	Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif		AP.15	Pendidikan Berkualitas secara Inklusif
	CJ03	Perlindungan Sosial yang Adaptif		AP.16	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan	CJ04	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	Meningkatnya produktivitas ekonomi	AP.9	Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	CJ05	Penerapan ekonomi hijau			
	CJ06	Transformasi digital			
	CJ07	Integrasi ekonomi domestik dan global			
	CJ08	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		AP.10	Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
			Meningkatnya kapasitas layanan sarana, prasarana dan infrastruktur teknologi dan	AP.12	Kemajuan Teknologi yang Adaptif

Provinsi Jawa Tengah			Kabupaten Temanggung		
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	
			penunjang konektivitas wilayah		
				AP.13	Konektivitas Wilayah yang Inklusif
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	CJ09	Regulasi dan Tata kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	AP.4	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Profesional, Kolaboratif dan Adaptif
				AP.5	Transformasi Digital
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	CJ09	Regulasi dan Tata kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	AP.4	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Profesional, Kolaboratif dan Adaptif
				AP.5	Transformasi Digital
Terwujudnya Kondusivitas Wilayah didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ10	Ketentraman dan ketertiban serta demokrasi substansial			
	CJ11	Stabilitas ekonomi makro daerah	Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	AP.11	Stabilitas Ekonomi Daerah
	CJ12	Daya Saing daerah dan Ketahanan Wilayah			
Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ13	Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya lokal	AP.1	Pelestarian Seni dan Budaya Lokal
			Menurunnya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan	AP.2	Ketentraman Masyarakat
	CJ14	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	AP.3	Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender
Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam,	CJ15	Lingkungan hidup berkualitas	Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkualitas dan	AP.6	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan

Provinsi Jawa Tengah			Kabupaten Temanggung		
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	
Lingkungan Hidup dan Bencana			berkelanjutan		
	CJ16	Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan		AP.7	Kemandirian Pangan
	CJ17	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	AP.8	Resiliensi terhadap Bencana

Sumber: Bappeda Temanggung Data Diolah, 2024

Sasaran pokok yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 MISI 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya

Dengan arah kebijakan Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat (internalisasi) dengan sasaran pokok:

1) Meningkatkan pelestarian seni dan budaya lokal

Arah pembangunan dalam rangka meningkatnya pelestarian seni dan budaya lokal yaitu melalui “Pelestarian Seni dan Budaya Lokal” melalui:

- a. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya lokal sejak dini dengan edukasi mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil.
- b. Pelestarian seni, cagar budaya dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi ekspresi dan pemanfaatan budaya dan seni.

2) Menurunnya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan

Arah pembangunan dalam rangka menurunkan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan yaitu Peningkatan ketentraman masyarakat melalui:

- a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
- b. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
- c. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat;
- d. Pemantapan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini

3) Meningkatkan kualitas keluarga dan kesetaraan gender

Arah pembangunan dalam rangka meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender yaitu Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender

melalui:

- a. Pemberdayaan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
- b. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Sedangkan sasaran pokok, arah pembangunan beserta indikatornya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4
Sasaran Pokok dan Indikator Misi 1

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator		Satuan	Baseline SE	Target				
							2025	2029	2034	2039	2045	
S.1	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya lokal	AP.1	Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	18,92	23,92	28,92	33,92	34,17	
				2	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	15.000	15.750	16.500	17.250	18.000	
				3	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	20,78	22,78	24,78	26,78	30,11	
S.2	Menurunnya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan	AP.2	Ketentraman Masyarakat	4	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	8	7	5	3	0	
S.3	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	AP.3	Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	5	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,6 - 64,98	66,63 - 68,07	70,41 - 71,94	74,2 - 75,81	78,75- 80,45	
				6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Kali	0,38 - 0,36	0,36 - 0,32	0,33 - 0,27	0,31 - 0,23	0,28 - 0,17	

5.2.2 MISI 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Dengan arah kebijakan Pemerataan dan penguatan Sumber Daya manusia serta sarana prasarana infrastruktur pendukung pelayanan publik dengan sasaran pokok:

1) Meningkatnya kualitas tata kelola dan pemerintahan yang profesional dan berintegritas

Arah pembangunan dalam rangka meningkatnya kualitas tata kelola dan pemerintahan yang profesional dan berintegritas yaitu:

a. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Profesional, Kolaboratif dan Adaptif, melalui:

- Penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Adaptif adalah mampu berubah dan menyesuaikan kinerja dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat, partisipatif adalah munculnya keaktifan semua SDM berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya, berorientasi pada hasil sehingga bukan sebatas tumpukan kertas tetapi berdampak pada masyarakat.
- Akselerasi peningkatan kompetensi aparatur melalui penguatan manajemen aparatur, sehingga terwujud SDM yang profesional dan berintegritas tinggi, berdaya saing tinggi dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas, sehingga akan terwujud citra Aparatur yang positif di masyarakat.
- Penguatan kelembagaan

b. Transformasi Digital, melalui Digitalisasi semua sektor pelayanan publik yang terintegrasi dan didukung dengan infrastruktur serta SDM yang memadai.

Sedangkan sasaran pokok, arah pembangunan beserta indikatornya sebagaimana tabel berikut

Tabel 5.5.

Sasaran Pokok dan Indikator Misi 2

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator		Sat	Baseline SE	Target				
							2025	2029	2034	2039	2045	
S.4	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	AP.4	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Profesional, Kolaboratif dan Adaptif	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69,05	70,1	75	77,5	80	
				8	Indeks Reformasi Hukum	Angka	63,05	73,05	83,05	93,05	95	
				9	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,72	81,79	85,87	89,94	94,01	
				10	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,77	4	4,25	4,5	5	
		AP.5	Transformasi Digital	11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,35	3,76	4,18	4,59	5	

5.2.3 MISI 3: Mewujudkan Lingkungan yang Memiliki Daya Dukung Memadai, Berketahanan dan Berkelanjutan

Dengan arah kebijakan Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim dengan sasaran pokok:

1) Meningkatkan daya dukung lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan

Arah pembangunan dalam rangka meningkatnya daya dukung lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan yaitu:

a. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan melalui:

- Penguatan akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat terjaga. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank.
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi air, udara dan tanah.
- Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat, antara lain dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar menerapkan gaya hidup minim sampah, peningkatan daur ulang sampah, dan industrialisasi pengelolaan sampah.
- Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim sehingga terwujud lingkungan yang bersih dan sehat buat masyarakat.
- Penerapan prinsip ekonomi hijau untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan sehingga pertumbuhan ekonomi selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

b. Dalam merespon isu perubahan iklim maka permukiman memiliki potensi untuk mitigasi dampak negati dari perubahan iklim melalui beberapa kebijakan untuk:

- Pengembangan Kawasan Permukiman yang Hijau untuk mengurangi peningkatan suhu kawasan (mikro);
- Pengembangan kawasan permukiman yang mampu menyerap air hujan dan mengurangi *water run off* sebagai upaya konservasi air;
- Pengembangan kawasan permukiman yang mampu mitigasi

ancaman bencana kebakaran Kebijakan tersebut dapat dikembangkan dalam Dokumen RP3KP sebagai penjabaran Dokumen RPJPD dan RTRW khususnya pada perumahan rakyat dan kawasan permukiman

c. Kemandirian pangan melalui:

- Pemerataan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan sehingga mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan
- Pengendalian penurunan kualitas dan kuantitas lahan sehingga tidak terjadi kerusakan tanaman karena penurunan kualitas hasil tanaman bisa mengakibatkan penurunan nilai jualnya dan penurunan kuantitas bisa berakibat pada berkurangnya jumlah hasil yang seharusnya dijual sehingga dapat berdampak pada aspek sosial ekonomi.
- Penguatan keanekaragaman tanaman pangan

2) Meningkatkan kapasitas penanganan bencana

Arah pembangunan dalam rangka meningkatnya kapasitas penanganan bencana yaitu resiliensi terhadap Bencana melalui:

- Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu yang dapat dilaksanakan pada semua lini yang ada di lingkungan pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan
- Penguatan tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana sehingga mempercepat pemulihan kehidupan dan perekonomian masyarakat
- Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

Sedangkan sasaran pokok, arah pembangunan beserta indikatornya sebagaimana tabel 5.6.

Tabel 5.6
Sasaran Pokok dan Indikator Misi 3

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator	Satuan	Baseline SE	Target				
						2025	2029	2034	2039	2045	
S.5	Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	AP.6	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,46	75,63	75,85	76,07	76,33
				13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,06	28,06	40,06	68,06	88,06
				14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	58,75	61,56	64,38	67,19	70
				15	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	33,34	36,54	39,74	42,94	46,14
				16	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	113.628,91	2.502.115,00	4.890.601,08	7.279.087,17	9.667.573,25
				17	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	26,63	44,61	63,06	81,51	100
				18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	57,75	70	80	90	100
				AP.7	Kemandirian Pangan	19	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	9,70	8,06	6,42
		20	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	78,58	81	82,85	84,7	85,99		

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator		Satuan	Baseline SE	Target				
							2025	2029	2034	2039	2045	
S.6	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	AP.8	Resiliensi terhadap Bencana	21	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	105,69-105,16	97,88-96,46	90,07-87,76	82,26-79,05	74,45-70,35	

5.2.4 MISI 4: Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Adaptif dan Berdaya Saing

Dengan arah kebijakan Penguatan jaringan ekonomi serta Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi dengan sasaran pokok:

1) Meningkatkan produktivitas ekonomi.

Arah pembangunan dalam rangka meningkatnya produktivitas ekonomi yaitu:

a. Inovasi dan Produktivitas Ekonomi melalui:

- Peningkatan kapabilitas inovasi;
- Kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi;
- Penguatan kebijakan ekonomi hijau;
- Penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan;
- Penguatan digitalisasi ekonomi kreatif, didukung dengan penguatan daya saing sumber daya manusia.

b. Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui:

- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- Penguatan kerja sama antar kawasan perdesaan;
- pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan;
- Penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensial lokal desa dan potensi SDM di desa.

2) Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah

Arah pembangunan dalam rangka meningkatnya stabilitas ekonomi daerah yaitu stabilisasi ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah

Sedangkan sasaran pokok, arah pembangunan beserta indikatornya sebagaimana tabel 5.7.

Tabel 5.7.
Sasaran Pokok dan Indikator Misi 4

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator		Satuan	BaselineSE	Target				
							2025	2029	2034	2039	2045	
S.7	Meningkatnya produktivitas ekonomi	AP.9	Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	22	Kapabilitas Inovasi	Angka	1,9	2,3	2,8	3,3	3,9	
				23	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,30-2,17	2,18-1,70	1,69-1,30	1,29-0,71	0,72-0,42	
				24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,52	70	73	76	79,43	
				25	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,35	2,4	3,2	4	4,94	
				26	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	25	30	35	40	45	
				27	Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,90	4,34	4,71	5,17	6,90	
				28	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,35	28,45	29,55	30,65	31,75	
				29	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,58	4,93	5,37	5,81	6,33	
				30	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,49	4,12	5,75	7,37	9,00	

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator		Satuan	BaselineSE	Target			
							2025	2029	2034	2039	2045
				31	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	36,48-36,73	72,09-80,09	107,71-123,44	143,32-166,80	178,9-210,15
		AP.10	Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	32	Persentase Desa Mandiri	%	21,42	25	35	45	50
S.8	Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	AP.11	Stabilitas Ekonomi Daerah	33	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,49	0,49	0,59	0,76	1,14
				34	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,69	2,54	2,51	2,60	2,85
				35	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,32	2,21	2,20	2,25	2,37
				36	Disparitas Harga	%	±10	±10	±10	±10	±10
				37	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	16,97	18	19	20	20,75

5.2.5 MISI 5: Mengembangkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Digital dan Peningkatan Konektivitas Wilayah

Dengan arah kebijakan Penguatan akses dan konektivitas wilayah untuk menunjang sistem keterkaitan wilayah dengan sasaran pokok:

- 1) Meningkatkan kapasitas layanan sarana, prasarana, dan infrastruktur teknologi dan penunjang konektivitas wilayah dengan Arah pembangunan yaitu:
 - a. Kemajuan Teknologi yang Adaptif melalui:
 - Pemerataan akses jaringan digital yang memadai di semua desa/kelurahan dan di beberapa area pelayanan publik
 - Peningkatan kualitas layanan digital yang terintegrasi, tidak sebatas membangun aplikasi tetapi membangun aplikasi yang bisa berbagi pakai dengan aplikasi lain dalam pelayanan publik
 - b. Konektivitas Wilayah yang Inklusif melalui:
 - Peningkatan fasilitas keselamatan transportasi
 - Pemenuhan jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat
 - Penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya
 - Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman
 - c. Peningkatan kualitas insfrastruktur dasar permukiman

Sedangkan sasaran pokok, arah pembangunan beserta indikatornya sebagaimana tabel 5.8.

Tabel 5.8
Sasaran Pokok dan Indikator Misi 5

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator	Satuan	Baseline SE	Target				
						2025	2029	2034	2039	2045	
S.9	Meningkatnya kapasitas layanan sarana, prasarana dan infrastruktur teknologi dan penunjang konektivitas wilayah	AP.12	Kemajuan Teknologi yang Adaptif	38	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	62,26	80	90	95	100
		AP.13	Konektivitas Wilayah yang Inklusif	40	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89,5	90,88	92,25	93,62	95
				41	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	42,03	45,89	50,24	55,07	61,84

5.2.6 MISI 6: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Dengan arah kebijakan Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan sasaran pokok:

- 1) Meningkatnya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan arah pembangunannya yaitu:
 - a. Kesehatan untuk semua meliputi:
 - Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar dan memadai baik dari kualitas atau kuantitas
 - Pemenuhan SDM kesehatan baik tenaga medis maupun tenaga pendukung non medis
 - Pemenuhan SPM kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah
 - Penjaminan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai siklus hidup manusia
 - Perluasan penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat
 - b. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif meliputi:
 - Penguatan wajib belajar 13 tahun sehingga terwujud standar kompetensi sesuai pemerintah
 - Penataan kelembagaan pendidikan
 - Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di semua jenjang
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan lembaga pendidikan sesuai standar kompetensi yang ditentukan
 - Pengelolaan peserta didik di semua jenjang
 - Pemenuhan SPM pendidikan sesuai ketentuan pemerintah
 - c. Perlindungan Sosial yang Adaptif melalui:
 - Penurunan ketimpangan pendapatan
 - Pengembangan usaha ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat miskin dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat
 - Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin

Sedangkan sasaran pokok, arah pembangunan beserta indikatornya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.9
Sasaran Pokok dan Indikator Misi 6

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator	Satuan	Baseline SE	Target				
						2025	2029	2034	2039	2045	
S.10	Meningkatnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial	AP.14	Kesehatan untuk Semua	41	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,06	77,62	79,18	80,73	82,29
				42	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	4	3	2	1	1
				43	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	23,9	14,99	12,29	9,58	6,88
				44	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	92	95	98	100
				45	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	91	92	93	95
				46	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,42	96,44	97,46	98,48	99,5

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator		Satuan	Baseline SE	Target				
							2025	2029	2034	2039	2045	
		AP.15	Pendidikan Berkualitas secara Inklusif	47	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)							
					a. Literasi Membaca SD/Sederajat	%	66,35	69,37	72,4	75,42	78,45	
					b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	61,75	69,06	76,37	83,68	90,99	
					c. Numerasi SD/Sederajat	%	65,39	70,14	74,89	79,63	84,38	
					d. Numerasi SMP/Sederajat	%	37,45	49	60,55	72,1	83,65	
				48	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,08	8,49	8,9	9,3	9,71	
				49	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,98	14,8	15,61	16,42	
				50	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,97	7,74	8,52	9,29	10,06	
				51	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	96,46	100	100	100	100	

Sasaran Pokok		Arah Pembangunan		Indikator	Satuan	Baseline SE	Target				
						2025	2029	2034	2039	2045	
				52	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100	100
				53	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,05	0,45	0,95	1,4	2
		AP.16	Kriteria yang Adaptif	54	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	10,50 - 10,75	12,54 -14,33	14,33 – 17,91	16,12 – 21,48	17,91- 25,06
				55	Tingkat Kemiskinan	%	8,70-9,00	6,45-6,75	4,2-4,5	1,95-2,25	0,00-0,46
				56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,12- 20,32	21,62-22,32	23,12-24,32	24,62- 26,32	26,12- 28,32

Tabel 5.10

Cascading Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tahapan Arah Kebijakan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator dan Target RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

Visi	Sasaran Utama Visi	Misi	Arah Kebijakan	Tahapan Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline SE							
				PENYIAPAN DAN Penguatan PONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN VISI					Target							
												2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	2025	2029	2034	2039
Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045	1.Peningkatan Pendapatan Perkapita 2.Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan 3.Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1 Mewujudkan masyarakat yang berbudaya	1 Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat (internalisasi)	Pembentukan karakter masyarakat	Akselerasi penguatan karakter masyarakat	Pemantapan karakter masyarakat melalui habituasi nilai-nilai budi pekerti dimulai dari keluarga dan satuan pendidikan formal dan non formal	Perwujudan karakter masyarakat berbudaya dan berbudi pekerti luhur	S.1	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya lokal	AP.1	Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	18,92	23,92	28,92	33,92	34,17
												2	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	15.000	15.750	16.500	17.250	18.000
												3	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	20,78	22,78	24,78	26,78	30,11
												4	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	8	7	5	3	0
												5	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,6 - 64,98	66,63 - 68,07	70,41 - 71,94	74,2 - 75,81	78,75- 80,45
												6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Kali	0,38-0,36	0,36-0,31	0,33-0,27	0,31-0,22	0,28-0,17
		2 Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	2 Pemerataan dan penguatan Sumber Daya manusia serta sarana prasarana infrastruktur pendukung pelayanan publik	Diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Diarahkan pada akselerasi reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Diarahkan pada pemantapan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Diarahkan pada perwujudan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	S.4	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	AP.4	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Profesional Kolaboratif dan Adaptif	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69,05	70,1	75	77,5	80
												8	Indeks Reformasi Hukum	Angka	63,05	73,05	83,05	93,05	95
												9	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,72	81,79	85,87	89,94	94,01
												10	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,77	4	4,25	4,5	5

Visi	Sasaran Utama Visi	Misi	Arah Kebijakan	Tahapan Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline SE									
				PENYIAPAN DAN PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN VISI					Target									
												2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	2025	2029	2034	2039	2045	
									AP.5	Transformasi Digital	11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,35	3,76	4,18	4,59	5			
		3	Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan	3	Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim	Peningkatan kapasitas dan kebijakan pelayanan lingkungan, sumber daya alam, mitigasi bencana, dan dampak perubahan iklim	Implementasi kebijakan pelayanan lingkungan, sumber daya alam, mitigasi bencana, dan dampak perubahan iklim	Pengendalian dan pengawasan pelayanan lingkungan, sumber daya alam, mitigasi bencana, dan dampak perubahan iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan	S.5	Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	AP.6	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,46	75,63	75,85	76,07	76,33
											13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,06	28,06	40,06	68,06	88,06			
											14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	58,75	61,56	64,38	67,19	70			
											15	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	33,34	36,54	39,74	42,94	46,14			
											16	Penurunan Emisi GRK	TonCO2 eq	113.628,91	2.502.115,00	4.890.601,08	7.279.087,17	9.667.573,25			
											17	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	26,63	44,61	63,06	81,51	100			
											18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	57,75	70	80	90	100			
									AP.7	Kemandirian Pangan	19	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9,7	8,06	6,42	4,78	3,14			
											20	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	78,58	81	82,85	84,7	85,99			
								S.6	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	AP.8	Resiliensi terhadap Bencana	21	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	105,69-105,16	97,88-96,46	90,07-87,76	82,26-79,05	74,45-70,35		
		4	Mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing	4	Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor	Diarahkan pada penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten	Diarahkan pada akselerasi produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten	Diarahkan pada pemantapan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten	Diarahkan pada perwujudan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten	S.7	Meningkatnya produktivitas ekonomi	AP.9	Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	22	Kapabilitas Inovasi	Angka	1,9	2,3	2,8	3,3	3,9
											23	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,30-2,17	2,18-1,70	1,69-1,30	1,29-0,71	0,72-0,42			
											24	Tingkat	%	66,52	70	73	76	79,43			

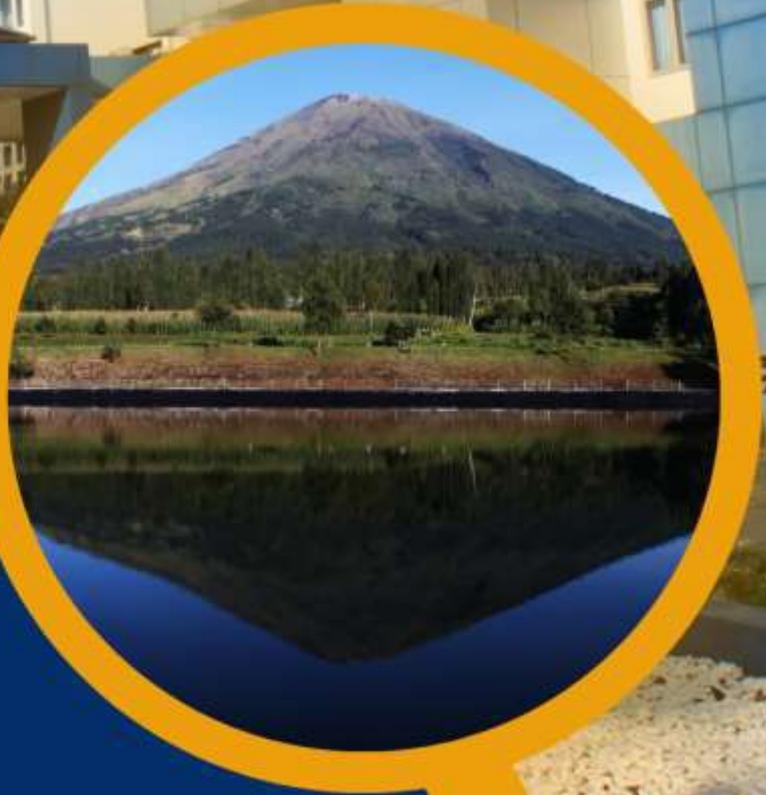
Visi	Sasaran Utama Visi	Misi	Arah Kebijakan	Tahapan Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline SE								
				PENYIAPAN DAN Penguatan PONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN VISI					Target								
												2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	2025	2029	2034	2039	2045
		wilayah			pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang	pengendalian rencana tata ruang	dan pengendalian rencana tata ruang	dan pengendalian rencana tata ruang		wilayah										
		6 Mewujudkan masyarakat sejahtera	6 Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial	Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial diarahkan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Akselerasi dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial diarahkan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Pemantapan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial diarahkan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Perwujudan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial diarahkan sesuai dengan standar pelayanan minimal	S.10	Meningkatnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial	AP.14	Kesehatan untuk Semua	40	Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	42,03	45,89	50,24	55,07	61,84	
												41	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,06	77,62	79,18	80,73	82,29	
												42	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	4	3	2	1	1	
												43	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	23,9	14,99	12,29	9,58	6,88	
												44	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	92	95	98	100	
												45	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	91	92	93	95	
												46	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,42	96,44	97,46	98,48	99,5	
												47	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)							
													a. Literasi Membaca SD/Sederajat	%	66,35	69,37	72,4	75,42	78,45	
													b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	61,75	69,06	76,37	83,68	90,99	
													c. Numerasi SD/Sederajat	%	65,39	70,14	74,89	79,63	84,38	
													d. Numerasi SMP/Sederajat	%	37,45	49	60,55	72,1	83,65	



BAB VI

PENUTUP

Memuat harapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2045 serta menggarisbawahi tentang pentingnya RPJPD bagi pembangunan daerah tahun 2025-2045



BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu dua puluh tahun kedepan sampai tahun 2045.

RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 merupakan pedoman untuk:

1. Penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah; dan
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Temanggung.

Kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 antara lain sebagai berikut:

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko agar tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai yang direncanakan;
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah agar dapat menjamin pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan;
3. Kerangka pengendalian dilaksanakan secara terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko;
4. Mekanisme perubahan dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dan perubahan regulasi, dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan
5. Optimalisasi keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan akuntabel.

Keberhasilan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dalam pembangunan daerah tergantung pada komitmen dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan segenap pemangku kepentingan, juga konsistensi dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003